



PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA DILI



Direktorat
Kebudayaan

7

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

711 487
SUS
P

**Pembinaan Disiplin di Lingkungan
Masyarakat Kota Dili**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PERMUSEUMAN**

LIBRARY OF CONGRESS

PHOTODUPLICATION SERVICE

DATE: 01/01

ALBANY, N.Y.

12222

H
5/1/94



Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Dili

PENULIS :

P. Susilo

Drs. Ekanto Heru Subroto

Dra. Dara Windiyarti

Drs. Dewa Made Sugiarta

PENYUNTING :

P. Susilo

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
NILAI-NILAI DUDAYA TIMOR TIMUR**

1993/1994

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT PERMUSEUMAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Timor Timur Tahun Anggaran 1993/1994 selesai mencetak buku dengan judul " **PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA DILI** ".

Buku tersebut merupakan hasil kegiatan awal yang dilakukan oleh suatu Tim pada Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Timor Timur Tahun Anggaran 1992/1993. Kegiatan ini dimaksudkan menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa kita dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Keberhasilan dalam penulisan ini adalah berkat kerja keras dan kerjasama yang baik dari segenap anggota Tim dengan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih baik kepada segenap anggota Tim maupun pihak-pihak yang terkait.

Dalam penulisan buku ini mungkin masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan, untuk itu kepada semua pihak yang bersedia menyampaikan sumbang saran dan perbaikan, akan diterima secara terbuka dan senang hati.

Mudah-mudahan buku ini memberikan sumbangan dan bermanfaat bagi masyarakat luas dalam rangka tercapainya pembangunan bangsa dan negara kita tercinta.

Dili Agustus 1993

Pemimpin Bagian Proyek



Dara Windiyarti
Dra. Dara Windiyarti
Nip. 131859626



**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI TIMOR TIMUR**

Dengan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira dengan diterbitkannya buku yang berjudul : **PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA DILI**, oleh Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Timor Timur Tahun Anggaran 1993/1994. Saya menilai, dengan diterbitkannya buku ini, selain merupakan upaya penggalian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan tradisional, juga merupakan upaya pelestarian kebudayaan tradisional tersebut.

Penggalian, pembinaan dan pengembangan budaya tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur, akan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional serta menunjang terwujudnya Ketahanan Nasional yang lebih mantap.

Saya harapkan buku ini dapat memperkaya kepustakaan mengenai khasanah budaya bangsa yang merupakan sumber informasi bagi masyarakat terutama generasi muda, sehingga mereka tidak akan kehilangan jejak dalam menelusuri dan melestarikan hasil budaya para leluhur atau para pendahulunya.

Mudah-mudahan buku ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat besar bagi upaya pembinaan dan pengembangan serta pelestarian kebudayaan bangsa kita.

Dili, Agustus 1993

Kepala,



[Handwritten Signature]
R. TRI SUWARTANTA
NIP. 130163013

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI TIMOR TIMUR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR PETA | vii |
| DAFTAR FOTO | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Masalah | 3 |
| C. Tujuan | 7 |
| D. Ruang Lingkup | 16 |
| E. Metodologi | 19 |
| BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN | 21 |
| A. Gambaran Umum Kota Dili | 21 |
| B. Gambaran Umum Kecamatan Dili Barat | 30 |
| C. Gambaran Umum Desa Komoro | 36 |
| D. Berbagai Permasalahan Kota | 44 |
| BAB III. DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN DESA KOMORO | 47 |
| A. Disiplin Dalam Penanganan Limbah Keluarga/Sampah | 49 |
| B. Disiplin Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial | 54 |
| C. Disiplin Terhadap Administrasi Pemerintahan | 64 |
| D. Disiplin Dalam Hubungan Ketetangaan | 70 |

| | | |
|---------|--|-----|
| BAB IV. | DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM | 77 |
| | A. Disiplin Di Lingkungan Pasar/Perkotaan | 78 |
| | B. Disiplin Di Lingkungan Terminal | 92 |
| | C. Disiplin Di Lingkungan Tempat Hiburan | 99 |
| | D. Disiplin Di Jalan Raya | 106 |
| BAB V. | UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN PADA MASYARAKAT KOTA | 115 |
| | A. Pembinaan Oleh Pemerintah | 115 |
| | B. Pembinaan Oleh Tokoh Masyarakat | 123 |
| BAB VI. | A. Kesimpulan | 127 |
| | B. Saran-Saran | 130 |
| | DAFTAR KEPUSTAKAAN | 133 |
| | LAMPIRAN | 135 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Tabel 1 : Penduduk Kotif Dili Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 | 23 |
| 2. Tabel 2 : Penduduk Kotif Dili Menurut Laju Pertumbuhan Antara Tahun 1980 - 1990 | 23 |
| 3. Tabel 3 : Penduduk Kotif Dili Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Per Kecamatan Th 1990 | 24 |
| 4. Tabel 4 : Jumlah Sekolah Negeri Dan Swasta Di Kotif Dili Tahun 1992/1993 | 24 |
| 5. Tabel 5 : Jumlah Guru Dan Murid Negeri Dan Swasta Kotif Dili Menurut Tingkat Sekolah Tahun 1992/1993 | 25 |
| 6. Tabel 6 : Tempat Ibadah Menurut Jenis Dan Agama Di Kotif Dili | 26 |
| 7. Tabel 7 : Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Dan Rumah Tangga Di Kecamatan Dili Barat Tahun 1990 | 31 |
| 8. Tabel 8 : Penduduk Dili Barat Per Desa Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 | 32 |
| 9. Tabel 9 : Penduduk Dili Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1990 | 32 |
| 10. Tabel 10 : Pertumbuhan Penduduk Dili Barat Th 1991... | 33 |
| 11. Tabel 11 : Penduduk Desa Komoro Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 1990 | 41 |
| 12. Tabel 12 : Penduduk Desa Komoro Berdasarkan Mata-pencaharian Tahun 1991..... | 43 |
| 13. Tabel 13 : Jumlah Kendaraan Di Timor Timur Tahun 1987 - 1992 | 108 |
| 14. Tabel 14 : Data Laka Lantas Tahun 1991/1992 | 111 |

DAFTAR PETA

| | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Peta 1 : Propinsi Timor Timur | 20 |
| 2. Peta 2 : Kabupaten Dili | 27 |
| 3. Peta 3 : Kota Administratif Dili | 28 |
| 4. Peta 4 : Kecamatan Dili Barat | 38 |
| 5. Peta 5 : Desa Komoro | 48 |

DAFTAR FOTO

| | Halaman |
|--|---------|
| 1. Foto 1 : Kantor Kepala Desa Komoro | 59 |
| 2. Foto 2 : Balai Pertemuan Karang Taruna Desa Komoro..... | 59 |
| 3. Foto 3 : Upaya Pembinaan Dari Muspika Terhadap Hansip | 68 |
| 4. Foto 4 : Upaya Meningkatkan Disiplin Warga Masya- rakat | 68 |
| 5. Foto 5 : Sarana Pembuangan Sampah Di Desa Komoro | 73 |
| 6. Foto 6 : Sarana Kamar Mandi Keluarga Sangat Seder- hana | 73 |
| 7. Foto 7 : Kegiatan Olahraga Karang Taruna Desa Ko- moro | 80 |
| 8. Foto 8 : Kegiatan Menambang Pasir Di Sungai Komoro | 80 |
| 9. Foto 9 : Suasana Dalam Hubungan Jual Beli Di Pasar Komoro | 90 |
| 10. Foto 10 : Suasana Kegiatan Di Pasar Komoro | 90 |
| 11. Foto 11 : Penertiban Jual Beli Di Sembarang Tempat Oleh Polisi Pamong Praja | 95 |
| 12. Foto 12 : Suasana Di Pertokoan Kota Dili | 95 |
| 13. Foto 13 : Suasana Di Terminal Bis Komoro | 104 |
| 14. Foto 14 : Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Umum ... | 104 |
| 15. Foto 15 : Tidak Ada Tanda Jalan Sebagai Pemisah Jalur Lalu Lintas | 109 |
| 16. Foto 16 : Gedung Bioskop Seroja Teater | 109 |
| 17. Foto 17 : Upaya Dalam Ajakan Mematuhi Rambu-Rambu Lalu Lintas | 117 |
| 18. Foto 18 : Tampak Rapi Berjualan Di Tempat Rekreasi .. | 117 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehadiran kota Dili tidak dapat dipisahkan dari sejarah pendudukan bangsa Portugis di pulau Timor. Kekuasaan Portugis di pulau Timor dan Solor secara resmi baru dinyatakan pada tahun 1681, ketika daerah ini oleh kerajaan Portugis di kawasan Asia masuk kekuasaannya dengan ibukota Goa. Dengan demikian penjajahan Portugis di pulau Timor sebenarnya secara administratif baru dimulai pada tahun 1681, meskipun sebelumnya telah terjadi penindasan dan pendudukan kekuasaan Liurai.

Sejak itu Pemerintahan Portugis berusaha menenpatkan seorang wakil pemerintah di pulau Timor sebagai *Capitao-Mor*, tetapi usaha ini digagalkan oleh keluarga Tupas, Antonio de Hornay dan Mateus da Costa. Pada tahun 1702 Pemerintah Portugis mengangkat Antonio Coelho Guerreiro sebagai penguasa dan memilih Lifau sebagai tempat kedudukan.

Tetapi kehadiran Coelho Gerreiro ditantang kaum Tupas dan hanya bertahan sampai tahun 1705. Pada tahun itu Lifau dikepung oleh kaum Tupas yang terkenal dengan nama Perang Oekusi, Antonio Guerreiro lari ke Manatuto.

Pada tahun 1761 muncul lagi seorang Tupas yang kuat : Francisco de Hornay da Costa, yang berambisi menegakkan kembali kekuasaan Tupas di pulau Timor.

Menghadapi serangan kaum Tupas dan tekanan V O C, Gubernur Portugis Antonio Jose Teles de Menezes beserta seluruh stafnya pada tanggal 11 Agustus 1769, mereka terpaksa meninggalkan Lifau mencari tempat yang aman ke arah timur dengan perahu. Pada tanggal 10 Oktober 1769, mereka mendapatkan dataran berpaya-paya yang merupakan perkampungan nelayan dan banyak tumbuh pohon Aidila (pepaya).

Lokasi ini dipilih menjadi tempat kedudukan Gubernur karena merupakan tempat yang strategis terlindung oleh pulau Atauro dari kemungkinan serangan Tupas dan V O C.

Dari kata "Aidila" yang banyak tumbuh disitu kemudian berubah

menjadi "Dili". Sejak tanggal 10 Oktober 1769 Dili menjadi tempat kedudukan Gubernur Portugis.

Tetapi pada masa itu orang lebih mengenal "Prasa" atau kota tempat pemusatan tentara, baru kemudian Adilia atau Dili. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Timor Portugis.

Kota Dili sejak tahun 1834, mulai dibangun dan pernah terbakar. Pada tahun 1856 penduduk kota Dili baru ada 3.017 orang, yang beragama Katolik ada 2.047 orang.

Pada tahun 1926, Antonio de Oliveira Salazar muncul sebagai orang kuat yang membentuk negara baru yang disebut Estada Novo. Pemerintah Antonio de Oliveira Salazar telah mempertegas status Timor Portugis sebagai daerah jajahan Portugis dengan membagi penduduk pribumi menjadi "Masyarakat beradab" dan yang belum "beradab".

Pada tahun 1950 tercatat ada 1.541 orang pribumi yang digolongkan sebagai "beradab" (civilizado) sedang bagian terbesar 434.907 orang masih disebut sebagai masyarakat yang belum beradab (nao civilizado).

Yang dianggap masyarakat beradab adalah mereka yang menurut politik asimilasi telah mencapai tingkat "CIVILIZADO-POTUGUESA" dan untuk mencapai tingkat peradaban Portugis mereka harus mengikuti sistem pendidikan Portugis yang menanamkan nilai-nilai budaya Portugis.

Sebenarnya usaha pendidikan di Timor Portugis pada awalnya dimulai oleh para Misionaris pada tahun 1734 di Oekusi. Tokoh Misionaris yang terkenal dalam pengembangan pendidikan adalah Pastor Medeiros yang membuka sekolah di sekitar tahun 1878 yaitu di Dili, Manatuto, Laelo, Liquica dan Bazartete. Kemudian membuka sekolah dan sarama bagi anak Liurai dan tokoh masyarakat bertempat di Lahane-Dili. Anak-anak ini dididik dengan harapan agar dikemudian hari dapat tampil menjadi pemimpin masyarakat orang Timor.

Pada tahun 1879 Suster-suster Canosians membuka sekolah dan asrama anak-anak puteri di Dili. Kemudian pada tahun 1905 suster-suster Canosians juga membuka sekolah dan sarama putri di Soibada.

Pada tahun 1936 di Soibada dibangun Seminari Diosis oleh Pastor Jaime Garcia Goulart, peranan Pendidikan Seminari Soibada di bawah pimpinan Pastor Januario Coelho da Silva sangat penting artinya bagi masyarakat Timor, karena melalui pendidikan ini merupakan generasi

yang memperoleh pendidikan modern. Tahun 1950 Seminari ini dipindahkan ke Dili di bawah pimpinan Pastor Jaime, kemudian pindah ke Dare pada tahun 1951, dan akibat peristiwa perang saudara yang terjadi maka Seminari ini pindah lagi ke Dili di Lahane. Dili menjadi pusat pemerintahan dan Pendidikan.

Mobilitas penduduk pada tahun 1970 terjadi lewat urbanisasi. Dili sebagai ibukota pada waktu itu penduduk mencapai 17.000 orang atau 2,7 % dari seluruh penduduk Timor Portugis yang berjumlah 610.000 orang. Walaupun penduduk Dili rendah tetapi mempunyai perbedaan besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota-kota lain di Timor Portugis. Penduduk Manatuto ada 2.092 orang, Baucau berpenduduk 1.918 orang dan Bobonaro 1.075 orang. Disamping itu terdapat 53 buah kota kecil (vila) yang masing-masing penduduk kurang lebih 14.000 orang.

Dengan penduduk yang jumlahnya masih kecil, kota Dili merupakan kota yang bersih dan indah karena masih mudah dikendalikan dan ditata. Dili merupakan sebuah kota lama yang dirancang oleh Portugis dengan baik yang banyak taman dan monument. Pelabuhan Dili terletak di sebuah Teluk yang nyaman, terlindung oleh Tanjung Fatukama di sebelah Timur dan Pulau Atauro di sebelah Utara. Sedang di latar belakang kota Dili terdapat barisan pegunungan yang membujur, dari arah Timur Hera sampai Tasi Tolu di bagian Barat. Namun karena pesatnya pembangunan dan transportasi, maka pelabuhan Dili kini sudah terasa sempit untuk dapat menampung kapal-kapal yang akan berlabuh.

B. M A S A L A H

Dili sebagai ibukota propinsi Timor Timur yang didirikan oleh Portugis pada tanggal 10 Oktober 1769, telah sarat dengan peristiwa bersejarah.

Timor Portugis sampai tahun 1865 masih berada di bawah pemerintahan Goa, kemudian tahun 1870 Timor Portugis dijadikan koloni dengan seorang Gubernur yang harus bertanggung jawab kepada Macao. Baru pada tahun 1896 Gubernur Timor Portugis di Dili berada langsung di bawah pemerintahan pusat Lisabon pada waktu itu yang menjabat Gubernur adalah Celestino da Silva.

Pada masa itu penjajah mulai memperhatikan memperbaiki infrastruk-

tur daerah dan mulai diperhatikan pendidikan rakyat. Tetapi pemberontakan rakyat terhadap kekuasaan Portugis terus saja berkobar di Timor Portugis, puncak perlawanan rakyat terjadi pada tahun 1911-1913, ketika Raja Manufahi Dom Boaventura mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Portugis yang terkenal dengan perang Manufahi.

Pemberontakan Dom Boaventura baru dapat dipadamkan setelah Portugis menggunakan politik perdamaian tradisional yaitu setelah komandan pasukan Portugis mengadakan perdamaian dengan melakukan "*Sumpah Darah*" dengan para Liurai setempat. Para Liurai (Raja) menerima surat pengangkatan sebagai kepala sebuah wilayah tertentu dengan wewenang yang terbatas berdasarkan peraturan pemerintah Kolonial Portugis.

Penguasa Portugis dengan taktik pemberian piagam pengangkatan (Carta Patente) kepada para Liurai telah melicinkan usaha menanam kekuasaan dan pengaruhnya melalui struktur adat dan tradisional. Dengan demikian beban rakyat makin bertambah, di samping itu harus setia kepada pemerintah tradisional ia juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dari pemerintah Kolonial Portugis.

1. Akibat Penjajahan Portugis

Pemerintah Kolonial Portugis sangat membatasi mobilitas penduduk ke luar propinsi Timor Portugis. Hubungan rakyat lebih banyak dilakukan dengan pemerintah Portugis, antara penguasa Portugis dengan para Liurai sebagai aparat pemerintah dan rakyat yang dijajah, hubungan ini terbatas dalam hal pemerintahan. Akibatnya rakyat Timor Portugis terisolasi tidak mengetahui bagaimana kehidupan saudara-saudaranya yang berada di Timor Barat dan pulau-pulau lain dalam wawasan nusantara.

Namun terdapat sikap hubungan yang terbuka dengan para Misionaris dan petugas-petugas agama Katolik. Di kota Dili masyarakat pedesaan yang dianggap belum beradab dapat bertemu dengan orang malae (sebutan dalam bahasa Tetum untuk orang asing). Persentuhan dengan kebudayaan malae, apakah itu malae Portugis, malae Sina (Cina), malae metan (orang Angola) telah memberi dampak kepada penduduk desa yang datang ke Dili untuk mengenal budaya asing, walaupun mereka belum sempat mengenal pendidikan formal dan masih berpegang pada kebudayaan tradisional. Hubungan orang

Timor dengan orang malae telah membawa masuknya pengaruh Portugis dalam bidang pendidikan, kesenian dan lain-lain.

Dengan adanya kontak-kontak hubungan penduduk Timor dengan orang luar telah terjadi pula hubungan perkawinan antara orang Portugis dengan orang Timor atau keturunan Tupas dan ada pula perkawinan orang Timor dengan keturunan Cina.

Orang Cina didatangkan dari Macao untuk bekerja di bidang perdagangan terutama di Kota Dili.

2. Peranan Mercado Municipal Dili

Mercado Municipal Dili dibangun oleh Pemerintah Portugis sekitar tahun 1948 sebagai pusat perbelanjaan bagi warga masyarakat kota Dili. Mercado Municipal berarti pasar kota Madya. Di atas pintu gerbang utama terdapat gambar escudo dikalungi daun oliveira yang melambangkan status pasar ini sebagai pasar pemerintah Portugis.

Bangunan Mercado Municipal berbentuk salib, bagian sayap kiri dan kanan dipergunakan untuk menjual sayur-sayuran dan bahan kebutuhan sehari-hari. Sedang di bagian depan dan belakang untuk menjual bahan pakaian, barang-barang kelontong dan peralatan kebutuhan rumah tangga.

Selain itu di belakang bagian sayap kiri terdapat bangunan berbentuk bundar, pada masa Portugis bangunan ini merupakan arena sabung ayam di Mercado Municipal Dili. Kebudayaan sabung ayam masih merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat Dili. Kegiatan pasar di Mercado Municipal ini berlangsung sampai awal tahun 1988, karena setelah dibangunnya pasar Dili Barat di Komoro dan pasar Dili Timur di Becora maka Mercado Municipal tidak digunakan lagi sebagai tempat perdagangan tetapi sebagai arena promosi atau pameran. Namun setelah Mercado Municipal diperbaiki pada sekitar tahun 1990 hingga akhir tahun 1992 belum dimanfaatkan lagi.

3. Keadaan Kota Dili

Dili yang dipergunakan sebagai tempat kedudukan Gubernur dan pusat pemerintahan sejak tanggal 10 Oktober 1769, terletak di daratan rendah yang dikelilingi bukit dan laut. Pada masa pemerintahan Portugis sampai tahun 1970 penduduk kota Dili baru sampai 17.000 orang. Tetapi setelah integrasi (17 - 7 - 1976) keadaan penduduk Dili Barat/Ti-

mur pada tahun 1986 sudah ada 90.906 orang, dan pada tahun 1988 penduduk Dili Barat/Timur ada 93.713 orang, kemudian pada tahun 1990 sudah menjadi 115.019 orang. Betapa pesatnya pertumbuhan penduduk kota Dili.

Penduduk Dili Barat yang pada tahun 1988 baru mencapai 45.349 orang, pada tahun 1990 sudah mencapai 61.984 orang. Pesatnya pertumbuhan penduduk kota Dili yang pada tahun 1970 baru mencapai 17.000 orang dan pada tahun 1990 menjadi 115.019 orang. Selain akibat adanya urbanisasi juga adanya pendatang dari luar Timor Timur seperti bertambahnya aparat pemerintah, pedagang dan pengusaha.

Bertambahnya penduduk kota Dili yang demikian pesat telah menimbulkan masalah, karena lajunya pertumbuhan penduduk belum seimbang dengan lajunya fasilitas dan sarana yang tersedia, seperti; masalah perumahan, sarana air bersih dan pasaran kerja yang tersedia.

Akibat pergolakan yang ditinggalkan oleh Portugis yang melanda Timor Timur sejak tahun 1974 sampai tahun 1976, Kota Dili semakin padat karena banyak penduduk dari desa yang menetap di kota Dili. Mereka memerlukan papan, sandan, pangan dan pakaian. Walaupun pemerintah telah mengambil langkah-langkah tetapi masalah urbanisasi belum dapat dituntaskan antara lain :

- masalah hak guna tanah;
- masalah perumahan penduduk;
- masalah penggunaan pipa air bersih;
- masalah kurangnya lapangan kerja dan tenaga kerja terdidik.

4. Keadaan Pendidikan

Sarana pendidikan yang berada di kota Dili sebagai pusat pendidikan yang ditinggalkan oleh Pemerintah Portugis sbb.:

- a. Pre Primaria (Taman Kanak-Kanak) selama 1 tahun bagi anak-anak usia 6 tahun;
- b. Escola Primaria (Sekola Dasar 4 tahun);
- c. Escola Preparatoria (Persiapan Sekolah Lanjutan 2 tahun);
- d. Escola Liceu Geral (SMP);
- e. Escola Technica de Artese Oficies (ST);
- f. Escola Cielo Complementaris dos Liceu (SMA).

Setelah integrasi rakyat Timor Timur ke dalam negara kesatuan RI menjadi propinsi ke 27 sejak tanggal 17 Juli 1976, perkembangan pen-

didikan sangat pesat, dan menjadi kewajiban pemerintah beserta masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sekolah, sarana belajar dan memenuhi tenaga kependidikan.

5. Masalah Ketertiban dan Disiplin Warga Kota

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1976 maka sejak tanggal 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi Propinsi yang ke 27 dalam Negara Kesatuan R.I dengan Dili sebagai ibukota Propinsi Timor Timur.

Dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota Dili setelah integrasi maka kota Dili ditetapkan sebagai kota Administratif pada tanggal 19 Nopember 1981, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1981.

Menurut keterangan Walikota Dili Domingos M.D. Soares, SH. MS. kota Dili sebenarnya pada masa yang lalu sudah setingkat dengan Kota Madya. Pada masa pemerintahan Portugis, kota Dili dipimpin oleh seorang Presidente do Concelho da Camara Municipal yang bersifat otonom dan tidak berada di bawah Administrador do Concelho de Dili.

Dalam rangka upaya meningkatkan kota Dili sebagai kotamadya pada tahun 1987 telah dicanangkan "**Dili Bertais**" yang bersifat kota Dili bersih, tertib, aman, indah, sehat, dan sopan.

C. T U J U A N

Tujuan penulisan ini adalah untuk menghimpun, mengungkapkan dan mendiskripsikan keadaan masyarakat kota Dili sebagai kota terbesar di Propinsi Timor Timur yang banyak mengalami perubahan dalam pertumbuhannya sejak masa kekuasaan Pemerintah Kolonial Portugis hingga berintegrasi menjadi Propinsi ke 27 dalam lingkungan Negara Kesatuan R.I.

Kota Dili sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Timor Timur sejak tanggal 17 Juli 1976 telah banyak mengalami perubahan. Pada tahap awal guna menjalankan roda pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur telah dilaksanakan pengadaan aparatur serta administrasi di bidang pemerintahan. Tujuannya supaya struktur dan sistem pemerintahan Daerah Tingkat I yang berlaku di Negara RI dapat diketahui dan dilaksanakan secara berdayaguna di Timor Timur terutama di kota Dili sebagai pusat Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

1. Status Kota Dili

Pertumbuhan dan perkembangan kota Dili sejak menjadi ibukota Propinsi Timor Timur dalam lingkungan Negara Kesatuan RI nampak demikian pesat bila dibandingkan dengan kota Dili saat masih di bawah kekuasaan Kolonial Portugis baik ditinjau dari perkembangan penduduk, fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, lalu-lintas, komunikasi, perkembangan teknologi dan lain-lain.

Ketika masih di bawah pemerintahan Kolonial Portugis pada tahun 1970 jumlah penduduk Dili baru ada 17.000 orang, kemudian berdasarkan hasil sensus yang diselenggarakan pada tahun 1980 penduduk Dili sudah ada 67.344 orang terdiri dari laki-laki 36.000 orang dan perempuan 31.344 orang.

Melihat perkembangan kota yang demikian pesat, maka pada tanggal 19 Nopember 1981 pemerintah telah mengantisipasi melalui Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1981 yaitu kota Dili ditetapkan sebagai kota Administratif, dengan pertimbangan :

- a. Adanya perkembangan dan kemajuan pada kecamatan Dili Barat dan Dili Timur sehingga dipandang perlu mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah tersebut secara khusus, guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai aspirasi masyarakat kecamatan Dili Barat dan Dili Timur.
- b. Bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Dili Barat dan Dili Timur telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus.
Berdasarkan pertimbangan maka dibentuklah kota Administratif Dili selaras dengan ketentuan pasal 72 ayat (4) Undang-undang nomor: 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.

2. Upaya Pembinaan Disiplin Warga Masyarakat Kota Dili

Dengan pertambahan penduduk kota Dili yang setiap tahun terus meningkat, selain akibat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, juga akibat perkembangan pembangunan pendidikan, sosial dan ekonomi yang terdapat di kota Dili. Untuk itu kota Dili terus dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga kota dalam hal sara-

na dan prasarana sesuai dengan keperluan kehidupan masyarakat perkotaan.

a. Fasilitas Perumahan dan Pegawai

Kota Dili yang pernah menjadi pusat pemerintahan Gubernur Timor Portugis yang ditinggal lari oleh Gubernur Lemos Pires pada tanggal 25 Agustus 1975, ternyata dikemudian hari banyak mengalami perubahan.

Setelah kota Dili sejak tanggal 17 Juli 1976 menjadi ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur kota ini mengalami perkembangan yang demikian pesat. Perkembangan ini sejalan dengan peranan kota Dili sebagai ibukota Propinsi yang ke 27 dalam lingkungan Negara Kesatuan RI.

Untuk itu sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah lebih menekankan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Timor Timur. Kebijaksanaan pembangunan pemerintahan desa dilaksanakan dengan menetapkan jumlah Suco pada masa Kolonial Portugis. Setelah diadakan study, pada masa yang lalu ada 408 Suco ditambah dengan struktur dan lembaga pemerintahan tradisional maka ditetapkan sebanyak 442 desa.

Dalam rangka menunjang kelancaran roda pemerintahan, pada tahun 1989 di Timor Timur terdapat 17.253 pegawai negeri yang bekerja pada berbagai instansi. Khusus untuk pengangkatan pegawai negeri golongan I dan II diutamakan putera-putera yang berasal dari Daerah Timor Timur.

Sedang untuk para pegawai eks pemerintah kolonial Portugis telah diadakan penyesuaian kepangkatan menurut peraturan yang berlaku.

Pemerintah RI juga memberikan tunjangan pensiun kepada para pensiunan bekas pegawai pemerintah Kolonial Portugis.

Sebagian besar pegawai-pegawai struktural dan pegawai administratif di Tingkat I dan Kantor Wilayah berkedudukan di kota Dili. Karena itu beban kota Dili sebagai kota administratif semakin bertambah, bukan saja harus menampung para urban, para pedagang musiman, tetapi dengan semakin mantapnya pemerintahan dan bertambahnya aparat instansi pemerintah maupun swasta diperlukan adanya suatu peraturan dan ketentuan yang dapat mengatur sistem dari kehidupan masyarakat perkotaan yang bersifat majemuk.

Kepada penduduk yang datang menetap di kota Dili, pemerintah telah mengadakan penataan pemukiman penduduk. Pada akhir bulan Agustus 1982 di Dili telah diresmikan pemakaian sejumlah rumah sederhana. Di Bairro Pite telah dibangun Perumahan BTN bagi pegawai negeri dan swasta dengan angsuran ringan selama 5 tahun sampai 20 tahun.

Melalui koordinasi Pemerintah Daerah telah dibangun Perumahan Dinas di Pantai Kelapa, di Komoro dan di Hera. Selain itu masing-masing instansi pemerintah dan swasta juga berusaha mengatasi kebutuhan perumahan pegawai dengan membangun perumahan dan mess pegawai. Melalui Koperasi Handayani dengan bantuan PT. Surik Mas, Kanwil Depdikbud berusaha mengatasi kekurangan perumahan pegawai di Bekora, Dili Timur. Selain itu perumahan Surik Mas pada tahun 1990 juga telah dibangun perumahan di Manleuwana dan Fatuhada Dili Barat. Namun demikian masih banyak para urban yang datang dari daerah pedesaan yang membangun rumah-rumah sederhana di tanah-tanah milik negara yang belum di huni tanpa izin pemerintah. Tetapi pembangunan rumah di tanah milik negara ini juga dilakukan oleh para pegawai negeri yang belum mempunyai tempat tinggal seperti yang terdapat di desa Komoro.

Untuk keperluan rumah tangga mereka membuat sumur-sumur pompa, tetapi seperti di Bekora Dili Timur karena struktur tanahnya yang sulit air maka untuk keperluan air bersih semata-mata tergantung pada saluran P A M, untuk itu sangat diperlukan pemasangan pipa air yang memadai dari perusahaan P A M yang berwenang.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan perumahan di kota Dili, maka P L N telah mengimbangi dengan peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Kaikoli dan Komoro Dili Barat. Sebagai akibat dari perkembangan pembangunan di bidang pendidikan dan teknologi, peningkatan daya P L N mutlak diperlukan guna dapat memberikan pelayanan kepada warga masyarakat kota Dili. Namun demikian karena kebutuhan aliran listrik terus meningkat masih terdapat warga yang kurang disiplin dalam penggunaan aliran listrik yang masih perlu diadakan penertiban.

**Jumlah Pelanggan dan Distribusi Listrik PLN
Tahun 1989**

| Kabupaten | Jumlah Pelanggan | V A Tersedia Pelanggan | Kwh Jual | Nilai Kwh Rp. |
|-----------|------------------|------------------------|------------|---------------|
| Dili | 6.427 | 13.279.000 | 15.842.655 | 2.556.559 |

b. Fasilitas Angkutan Darat, Laut dan Udara

Untuk melayani transportasi penduduk kota Dili terdapat angkutan umum yang dilayani oleh Bus DAMRI, Bus milik Perusahaan Swasta, Taxi, Mikrolet, dan angkutan pedesaan.

Angkutan Bus Kota melayani jalur Mercado-Bemori pp, Mercado-Komoro pp, Bidau-Komoro pp, Bekora-Bemori-Kaikoli-Mercado pp, Mercado Bairro-Pite Manleuwana pp.

Untuk taxi jalurnya dapat meliputi seluruh kota Dili sampai ke Bandar Udara, bahkan dapat mengantar penumpang ke luar kota.

Terminal Bus luar kota bagian barat terdapat di Tasi Tolu untuk jurusan Liquica, Ermora, Maliana, Atambua, dan Kupang. Untuk terminal Bus luar kota bagian timur terdapat di Kamea dengan Bus jurusan Manatuto, Baucau, Viqueque dan Lospalos.

Jalan raya dalam kota Dili sudah diaspal dengan mulus, bahkan jalan aspal ini meliputi seluruh kota Kabupaten. Bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Kolonial Portugis yang diaspal hanya dalam kota Dili sudah menuju keseluruhan Kabupaten hingga semua jenis kendaraan dapat dengan tenang menuju ke seluruh kota Kabupaten di Propinsi Timor Timur.

Pelabuhan Dili merupakan pelabuhan terbesar di Propinsi Timor Timur, setiap minggu terdapat dua kapal penumpang besar yang menyinggahi pelabuhan Dili yaitu KM Tatamailau dan Kelimutu yang menuju Surabaya, dan Indonesia Bagian Timur. Selain sebagai pelabuhan antar pulau pelabuhan Dili juga merupakan pintu perdagangan ke luar negeri.

Pelabuhan Udara Dili, terletak di Komoro yang jaraknya sekitar 7 Km dari kota Dili. Bandar Udara ini terus dibenahi dan disempurnakan dengan fasilitas yang memadai. Tiap hari ada dua pesawat yang menda-

darat di Bandar Udara Komoro yaitu pesawat F 28 dengan route Surabaya-Denpasar-Kupang-Dili pp, dan Yogyakarta-Surabaya-Denpasar-Dili pp, selain itu Pesawat Hercules AURI hampir setiap hari minggu menyinggahi Pelabuhan Udara Komoro.

c. Pengaturan Lalu-lintas dalam Kota

Untuk pengaturan lalu-lintas dalam kota Dili sudah cukup memadai dengan adanya lampu lalu-lintas yang terdapat pada setiap perempatan kota dan rambu-rambu lalu-lintas yang terpasang pada setiap jalan.

Sebagian besar lalu-lintas kendaraan dalam kota Dili diatur jalan satu arah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sedang beberapa jalur jalan dalam kota yang menuju ke arah luar kota masih berpapasan atau dua arah. Sebenarnya pengaturan lalu-lintas dalam kota Dili sudah cukup memadai, tetapi sarana parkir (terminal) dan lebar jalan masih perlu ditambah untuk memenuhi tuntutan perkembangan transportasi dalam kota Dili.

Keadaan kemacetan lalu-lintas pada jam-jam sibuk nampak setiap hari di jalan Bekora terutama di depan pasar Bekora Dili Timur. Demikian pula di jalan Komoro pasar Dili Barat.

Walaupun Polisi lalu-lintas sudah setiap pagi hari mengatur lalu-lintas dengan baik, tetapi pada siang hari saat petugas tidak ada jalan-jalan di tempat tersebut acap kali macet, karena beberapa pengemudi angkutan umum sering berhenti seandainya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang ramai tersebut.

Disiplin pengemudi, pedagang eceran, dan pejalan kaki masih perlu ditingkatkan disiplin mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan seperti rambu-rambu larangan yang dilanggar menyebabkan sering terjadinya kecelakaan.

3. Fasilitas Umum

Telekomunikasi

Selain pembangunan sarana transportasi untuk memenuhi kebutuhan warga kota Dili, di bidang telekomunikasi sejak bulan Mei 1979 telah beroperasi Stasiun Bumi Kecil melalui Sistem Komunikasi Satelit Domestik "*Palapa*".

Warga kota Dili dapat berhubungan melalui telepon dengan saudara-saudaranya dari Sabang sampai Merauke. Selain itu sejak tanggal 30

Mei 1988 telah beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Parpostel; Sentral Telephon Otomat Digital dengan Nomor Kode Wilayah (0390) berkapasitas 2000 lines unit. Pemakaian pulsa pada tahun 1988 sudah mencapai 90.000 pulsa rata-rata tiap bulan, dan pada tahun 1992 tiap bulan sudah lebih dari 100.000 pulsa.

Untuk pelayanan telephon umum bagi warga kota Dili, tiap-tiap sudut jalan dan tempat-tempat umum seperti di Puskesmas, Kantor-kantor Pemerintah, Sekolah dan Terminal sudah terdapat telephon umum menggunakan koin yang dapat dipergunakan selama 24 jam tiap hari.

Hubungan melalui Telegram dan Fax juga sudah dapat dilaksanakan oleh warga kota Dili. Selain itu fasilitas Radio dan Televisi Umum sudah tersebar di tempat-tempat umum di Balai Desa dan Kantor-kantor Pemerintah, sehingga apa yang terjadi di Tanah Air dan di Negara-negara lain, apabila ditayangkan melalui TVRI maka langsung dapat diketahui oleh masyarakat kota Dili.

Tempat rekreasi dan istirahat

Bagi para wisatawan asing maupun domestik apabila berkunjung ke kota Dili dapat istirahat dan menginap di Hotel atau Losmen yang ada di Dili sbb :

1. Hotel Resende di Jln. Bispo de Medeiros
2. Hotel Turismo di Jln. Sa da Bandeira
3. Hotel Dili di Jln. Bispo de Medeiros
4. Hotel Mahkota Timor di Jln. Americo Thomas
5. Losmen Basmery di Jln. Alburqueque
6. Losmen Taufiq di Jln. Americo Thomas
7. Wisma Cendana di Jln. Americo Thomas

Penginapan ini cukup memadai bagi kota Dili yang berpenduduk lebih dari 115.000 jiwa.

Apabila warga kota Dili pada waktu sore hari ingin berjalan-jalan dan bersantai-santai di Taman, maka di Taman telah tersedia tempat-tempat duduk. Untuk ukuran kota Dili sebenarnya taman-taman tersebut cukup banyak tetapi beberapa tempat nampak kurang terawat dan masih kurang kesadaran dari para pengunjung untuk turut serta memelihara fasilitas yang tersedia misalnya dengan mencoret-mencoret dan menggunakan tempat duduk tidak semestinya.

Beberapa Taman kota yang dapat dipergunakan sebagai tempat wisa-

wisata budaya seperti antara lain :

1. Taman Bunda Maria di Lecidere Dili Timur;
2. Taman Monumen Infante D. Henrique di depan Kantor Gubernur;
3. Mercado Municipal Dili di Jalan Bispo de Medeiros;
4. Taman Gereja Balide di Balide;
5. Taman Mercusuar di Pantai Farol;
6. Taman Mini Dili di Farol;
7. Taman Monumen Integrasi terletak di belakang Pelabuhan Dili;
8. Taman Pantai di belakang Kodim Dili;
9. Taman Tugu Manuel de Jesus Pires di depan Diosis Dili;
10. Taman Tugu Arthur do Canto Resende di Pantai Farol Dili Barat;
11. Altar Sri Paus di Tasi Tolu Dili Barat;
12. Pantai Pasir Putih di Dili Timur;
13. Taman Wisma Negara di Lahane Dili Timur.

Selain yang telah disebutkan ini masih ada beberapa tempat yang dapat dipergunakan sebagai tempat rekreasi bagi warga masyarakat kota Dili. Misalnya tempat lomba motor cros di Tasi Tolu dan tempat hiburan di Bioskop di pusat kota Dili serta tempat-tempat pemandian di pantai kota Dili.

Fasilitas Lapangan Olahraga

Fasilitas lapangan olahraga yang paling banyak di kota Dili adalah lapangan tenis. Dapat diketahui bahwa hampir tiap instansi di kota Dili mempunyai lapangan tenis yang terletak di sudut-sudut Kantor.

Kemudian fasilitas lapangan olah raga Volly menduduki rangking ke dua, karena hampir tiap instansi mempunyai lapangan Volly. Sedang lapangan bulu tangkis masih sangat terbatas. Sarana tinju dan olahraga bela diri seperti karate dan pencak silat sudah ada organisasinya dan mendapat pembinaan dari Top Organisasi yang bersangkutan. Selain itu ada organisasi bela diri tenaga dalam seperti : SN (Satria Nusantara) dan Budi Suci.

Untuk fasilitas lapangan sepak bola bagi kota Dili dirasa masih kurang. Lapangan sepak bola yang ada ialah : Stadion Munisipal Dili, Lapangan Pramuka dan Lapangan Komoro. Stadion Municipal Dili selain dipergunakan untuk pertandingan sepak bola juga dipergunakan untuk perlombaan-perlombaan atletik.

Disiplin penonton dalam menyaksikan pertandingan sepak bola, baik

di Stadion Municipal maupun di lapangan Pramuka masih perlu ditingkatkan. Walaupun pada kedua lapangan ini sudah ada tempat pembatas, tembok lapangan, tetapi terdapat penonton yang duduk di atas tembok dan tempat-tempat yang tidak semestinya.

Tempat Beribadat

Penduduk kota Dili pada umumnya merupakan warga kota yang taat beribadat dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan hidup beragama antara umat, beragama, intern umat dalam masing-masing agama, dan antara golongan agama dengan pemerintah telah terjalin dengan baik.

Penganut agama Katolik merupakan mayoritas di Timor Timur terutama di kota Dili. Namun toleransi antar pemeluk agama cukup baik.

Di Dili terdapat 5 (lima) pemeluk agama yang diakui oleh pemerintah yaitu : agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu dan Budha yang masing-masing mempunyai tempat peribadatan. Selain itu di Timor Timur juga masih terdapat kelompok masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan warisan budaya spiritual dari nenek moyang. Tempat beribadat umat Katolik yang ada di Dili seperti antara lain : Katedral, Gereja Balide, Gereja Motael, Gereja Bekora dan masih ditambah lagi beberapa Kepala yang ada di Dili Barat dan Dili Timur.

Untuk beribadat umat Islam terdapat Mesjid di Kampung Alor, di Perumnas Bairopite dan masih ditambah beberapa Surau. Bagi umat Hindu mempunyai Pura dan umat Budha ada Wihara. Sedang tempat beribadat Umat Kristen Protestan seperti antara lain Gereja Hosana dan Gereja-gereja Kristen yang lain.

Pembinaan umat beragama telah dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing Pemimpin Umat yang bersangkutan. Karena mayoritas penduduk kota Dili khususnya dan Timor Timur pada umumnya memeluk agama Katolik, maka warga kehidupan umat katolik sangat nampak di Timor Timur. Perkembangan Umat Katolik di Timor Timur ternyata lebih pesat setelah sejak tanggal 17 Juli 1976, rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Negara Kesatuan RI menjadi Propinsi yang ke 27. Sedang adanya pergolakan yang melanda Timor Timur.

Pendidikan Ketrampilan

Dalam upaya meningkatkan ketrampilan generasi muda di Dili terdapat beberapa Pusat Latihan yang diusahakan oleh Pemerintah maupun Swasta. Tempat-tempat kursus ketrampilan tersebut seperti antara lain :

1. BLK (Balai Latihan Kerja) yang diusahakan oleh Depnaker, memberikan ketrampilan: tukang kayu, tukang batu, pandai besi, menjahit dan mengetik/administrasi.
2. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) yang diusahakan oleh Pendidikan Masyarakat Kanwil Depdikbud memberikan pendidikan ketrampilan; kursus menjahit, kursus akuntansi, dan kejar usaha.
3. Kursus-kursus ketrampilan yang diusahakan oleh swasta antara lain : Komputer, Bahasa Inggris, Salon Perawatan kulit dan rambut.
4. Ketrampilan tenun tais, menganyam dari daun pandan atau lontar dan pembuatan gerabah dari tanah liat, masih secara tradisional dilaksanakan oleh warga masyarakat, dengan pembinaan dari Kanwil Departemen Perindustrian.

Pembinaan Wawasan Nusantara

Fasilitas pendidikan formal dan non formal sudah terdapat di Dili, namun untuk mendukung keberhasilan di bidang pendidikan formal dan non formal perlu adanya sarana, yang dapat menanamkan sikap yang tepat sebagai bangsa yang tidak terdapat di sekolah. Dengan mempelajari berbagai warisan budaya yang menjadi koleksi museum dapat mengetahui hubungan dengan kebudayaan berbagai suku daerah yang ada di Indonesia, bagaimana asal-usul dan cita-cita bangsa Indonesia, di masa depan.

Karena itu adanya Museum Negeri di Dili sangat penting artinya bagi masyarakat Timor Timur, dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

D. RUANG LINGKUP

Berdasarkan sasaran dan tujuan penulisan, maka ruang Lingkup dari penulisan ini adalah kota Administratif Dili, namun akan lebih menekankan pada wilayah Kecamatan Dili Barat sedang sebagai sampel pemukiman dipilih desa Komoro, yang termasuk wilayah Kecamatan Dili Barat.

Walaupun lokasi Komoro terletak di dalam kota Dili tetapi dipergunakan istilah Desa yang wilayahnya dipimpin oleh seorang Kepala Desa, karena sampai saat penulisan ini belum ada Kelurahan di Kabupaten Dili (Timor Timur) sehingga yang berlaku adalah struktur Pemerintahan Desa.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai bahan obyek penelitian. Pada Wilayah Kecamatan Dili Barat terdapat lebih banyak pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum daripada Wilayah Kecamatan Dili Timur. Sebagian besar kantor-kantor Pemerintah dan Swasta serta pertokoan terletak di Wilayah Kecamatan Dili Barat, penduduk yang terbanyak di Kota Dili terdapat di Desa Komoro Kecamatan Dili Barat.

Kantor-kantor yang terletak di Kecamatan Dili Barat seperti antara lain :

1. Kantor Gubernur KDH Tk. I Timor Timur;
2. Kejaksaan Tinggi Timor Timur;
3. Bappeda Tk. I Timor Timur;
4. Kanwil Depdikbud Propinsi Timor Timur
5. Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi Timor Timur;
6. Kanwil Departemen Sosial Propinsi Timor Timur;
7. Kanwil Departemen Perdagangan Propinsi Timor Timur;
8. Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Timor Timur;
9. Kanwil Departemen PU Propinsi Timor Timur;
10. Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Timor Timur;
11. BPN Propinsi Timor Timur;
12. Dolog Timor Timur;
13. BKKBN Propinsi Timor Timur;
14. Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Timor Timur;
15. Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Timor Timur;
16. DPRD Tk. I Timor Timur;
17. Kanwil Departemen Pertanian Propinsi Timor Timur;
18. Kolakops dan Korem 164 Wiradharma Timor Timur;
19. Polwil Timor Timur;
20. Ka Lanud Timor Timur;
21. Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Timor Timur;
22. Dinas P dan K Tk. I Timor Timur;
23. Dinas Pertanian dan lain-lain;

24. Dinas Pariwisata;
25. Dinas Sosial;
26. Dinas Kesehatan
27. Walikota Dili;
28. Biro Pusat Statistik dan lain-lain;
29. Kanwil Departemen Transmigrasi;
30. Kantor KPKN Timor Timur;
31. Perpustakaan Daerah Timor Timur;
32. Museum Negeri Timor Timur (persiapan).

Tempat-tempat umum yang ada di wilayah Dili Barat seperti antara lain :

1. Gedung Olah raga Matahari Tertib;
2. Balai Pertemuan Prajurit;
3. Gedung Pertemuan Sang Surya;
4. Balai Penataran Guru;
5. Sanggar Kegiatan Koperasi;
6. Balai Latihan Koperasi;
7. Sanggar Pramuka;
8. Taman Mini Dili;
9. Pelabuhan Laut Dili;
10. Bandar Udara Komoro;
11. Terminal Bus Komoro;
12. Gedung Bioskop Seroja;
13. Taman-taman kota dan Pantai;
14. Pasar Komoro;
15. Lapangan Sepak Bola Komoro;
16. Gedung Telkom/Stasiun Bumi Palapa;
17. Kantor Pos;
18. RRI dan TVRI;
19. K N P I ;
20. Pusat Latihan Tinju;
21. Tempat lomba Motor Cros;
22. BIP (Balai Informasi Pertanian)

Selain itu toko-toko dan pusat perdagangan serta Dekranasda berada di Dili Barat.

Mengingat status kota Dili sebagai Kota Administratif, maka Walikota Administratif Dili memegang peranan penting dalam upaya mengatur ketertiban dan kedisiplinan warga kota agar dapat mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat kota Dili demi tercapainya kota Dili bertais.

Untuk penertiban bangunan telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan yang diketuai oleh Walikota Administratif Dili yang anggota-anggotanya terdiri dari Instansi terkait. Untuk bangunan baru harus memiliki IMB, sedang bagi bangunan lama diadakan pendataan untuk mendapatkan IMB dengan persyaratan memenuhi peraturan yang berlaku.

Untuk penertiban KTP bagi warga masyarakat Dili, Pemda Tk. II Dili telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 11 tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah nomor : 06 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

E. METODE PENELITIAN

1. Metode dan prosedur penelitian yang dipergunakan;

- a. Studi Kepustakaan;
- b. Studi lapangan pengumpulan data;

2. Prosedur pelaksanaan :

- a. Penyusunan rencana kerja dan prasurevei;
- b. Penentuan lokasi dan informasi;
- c. Perekaman dan pencatatan;
- d. Pembuatan denah, peta dan dokumentasi;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data;
- f. Analisa, diskusi dan pengambilan kesimpulan;
- g. Penulisan naskah;
- h. Mengedit, mengetik dan mencetak pembuatan ilustrasi;
- i. Pencetakan dan Penerbitan.

PROVINSI TIMOR TIMUR



Sumber: BAPPEDA TKI TIMOR TIMUR

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA DAN DAERAH PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA DILI

1. Lokasi dan Keadaan Umum

a. Lokasi

Kota Adiminstratif Dili terletak di Kabupaten Dili dan berada antara $8^{\circ} 7' \text{ LS}$ - $8^{\circ} 31' \text{ LS}$ dan $125^{\circ} 26' \text{ BT}$ - $125^{\circ} 42' \text{ BT}$. Luas wilayahnya 153,595 Km², terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Dili Barat dengan luas wilayah 63,345 Km² dan Kecamatan Dili Timur dengan luas wilayah 90,250 Km². Sedangkan jumlah desa yang berada di Kota Administratif Dili ada 26 desa, terdiri dari Kecamatan Dili Barat berjumlah 11 desa dan Dili Timur berjumlah 15 desa.

Batas-batas Kota Administratif Dili adalah :

di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wetar

di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aileu

di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Liquica

di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metinaro

b. Keadaan Daerah

Keadaan geografis terdiri dari daratan pada bagian pesisir utara dan daerah pegunungan pada bagian selatan. Dari segi geomorologi menunjukkan bahwa struktur tanahnya terdiri dari batuan metamorf dan endapan alluvial.

Sungai-sungai yang ada Kotif Dili mengalir pada saat musim penghujan dan tidak mengalir pada saat musim kemarau. Sungai-sungai tersebut adalah sungai Komoro dan sungai di Bekora dan sungai di Kamea.

Keadaan iklim Kotif Dili adalah tropis, dengan suhu udara terendah berkisar antara 18° C - 20° C , dan Udara tertinggi berkisar antara 32° C - 34° C .

Iklim berpengaruh dalam suatu daerah terutama terhadap kehidupan flora dan fauna . Terjadinya iklim disuatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain curah hujan, angin dan kelembaban udara. Demikian halnya di Kotif Dili, bulan basah terjadi lebih kurang empat bulan yaitu Desember, Januari, Pebruari, Maret dan bu-

lan kering terjadi lebih kurang empat bulan yaitu Juli, Agustus, September dan Oktober. Sedangkan bulan April, Mei, Juni, Juli merupakan bulan kondisi udara lembab.

Musim hujan berlangsung dari bulan Desember sampai bulan April dan musim kemarau dari bulan Juni sampai bulan Oktober, sedangkan bulan Mei merupakan musim peralihan. Dalam hal curah hujan, sangat bervariasi yaitu di pesisir Utara rata-rata 500-1000 mm per tahun dan di daerah selatan rata-rata lebih dari 1.500-2.000 mm per tahun dan di daerah pegunungan mencapai 2.500-3.000 mm per tahun.

2. Pola Perkampungan

Rumah-rumah penduduk Kotif Dili memperlihatkan bahwa sebagian besar berderet memanjang sejajar dengan jalan dan sebagian lagi merupakan rumah-rumah yang mengelompok. Rumah-rumah penduduk yang berderet memanjang sejajar dengan jalan adalah rumah-rumah yang terletak di pusat kota, kompleks rumah dinas, perumahan rakyat BTN, pertokoan dan sebagian rumah penduduk dipinggiran kota. Rumah-rumah tersebut rata-rata memiliki halaman yang digunakan sebagai tempat anak-anak bermain dan taman, bahkan ada yang dimanfaatkan untuk menanam singkong, pisan dan jagung, yaitu rumah-rumah yang tidak memiliki halaman adalah pertokoan.

Rumah-rumah penduduk yang mengelompok adalah rumah-rumah yang berada di pinggiran kota. Rumah-rumah tersebut memiliki halaman tempat bermain di tengah atau di depan rumah masing-masing.

Mengenai bentuk (arsitektur) dan bahan bangunan sangat bervariasi, mengingat penduduk Kotif Dili yang bersifat majemuk. Untuk daerah pertokoan, sebagian besar merupakan rumah-rumah peninggalan pemerintah kolonial Portugis dengan ciri khas cerobong asap yang tinggi dan bangunan dapur yang terpisah dengan bangunan induknya. Sedangkan untuk di kampung-kampung merupakan bangunan dengan bentuk seperti umumnya bangunan di Indonesia terutama rumah-rumah dinas dan perumahan rakyat BTN. Di samping itu, juga terdapat rumah-rumah rakyat dengan bentuk tradisional Timor Timur yang memanfaatkan tangkai daun lontar (bebak) sebagai dinding dan daun lontar atau rumbia sebagai atapnya.

Adapun jumlah rumah yang ada di Kotif Dili pada tahun 1991 adalah 20.993 unit, terdiri atas Kecamatan Dili Barat sebanyak

11.877 unit dan Keca-matan Dili Timur sebanyak 9.046 unit (sumber : Kantor Statistik Timor Ti-mur).

3. Kependudukan

Keadaan penduduk kota Dili terus berkembang/meningkat sesuai dengan sensus penduduk adalah sebagai berikut : pada tahun 1980 berjumlah 67.344 jiwa, tahun 1986 berjumlah 90.906 jiwa, tahun 1988 berjumlah 101.785 jiwa dan pada tahun 1990 berjumlah 115.019. Sedangkan jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Penduduk Kotif Dili per kecamatan menurut jenis kelamin tahun 1990

| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Sex Ratio |
|-----|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1. | Dili Barat | 34.735 | 27.249 | 61.984 | 127 |
| 2. | Dili Timur | 29.069 | 23.966 | 53.035 | 121 |
| | J u m l a h | 63.804 | 51.215 | 115.019 | 124 |

Tabel 2

Penduduk Kotif Dili menurut laju pertumbuhan per tahun antara tahun 1980-1990 (dalam %)

| No. | Kecamatan | Jumlah | Penduduk | Laju Petumbuhan |
|-----|-------------|--------|----------|-----------------|
| | | 1980 | 1990 | Penduduk |
| 1. | Dili Barat | 27.128 | 61.984 | 8,61 |
| 2. | Dili Timur | 33.022 | 53.035 | 4,85 |
| | J•u m l a h | 60.150 | 115.019 | 6,73 |

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Timor Timur

Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh angka kelahiran juga perpindahan penduduk dari luar kota Dili dan propinsi. Dengan demikian kepadatan penduduk tahun 1990 rata-rata 748,82 jiwa/Km².

Tabel 3
Penduduk Kotif Dili menurut kelompok dan jenis kelamin
per Kecamatan Tahun 1990

| No. | Kelompok Umur | Kec. Dili Barat | | Kec. Dili Timur | | Jumlah |
|-----|---------------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|
| | | L | P | L | P | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0 - 4 tahun | 4.927 | 4.465 | 4.222 | 3.884 | 17.498 |
| 2. | 0 - 9 tahun | 4.019 | 3.726 | 3.901 | 3.395 | 15.041 |
| 3. | 10 - 14 tahun | 2.785 | 2.335 | 2.422 | 2.126 | 9.668 |
| 4. | 15 - 24 tahun | 4.431 | 3.280 | 3.647 | 2.979 | 14.337 |
| 5. | 20 - 24 tahun | 5.211 | 3.660 | 4.110 | 3.104 | 16.085 |
| 6. | 25 - 29 tahun | 4.470 | 3.342 | 3.426 | 2.578 | 13.866 |
| 7. | 30 - 34 tahun | 2.996 | 3.040 | 2.355 | 1.699 | 9.070 |
| 8. | 35 - 39 tahun | 1.934 | 1.395 | 1.526 | 1.191 | 6.046 |
| 9. | 40 - 44 tahun | 1.311 | 926 | 978 | 761 | 3.976 |
| 10. | 45 - 49 tahun | 1.090 | 659 | 824 | 784 | 3.347 |
| 11. | 50 - 54 tahun | 671 | 513 | 640 | 545 | 2.369 |
| 12. | 55 - 59 tahun | 361 | 292 | 370 | 306 | 1.329 |
| 13. | 60 - 64 tahun | 235 | 249 | 292 | 256 | 1.032 |
| 14. | 65 - 69 tahun | 122 | 133 | 174 | 162 | 591 |
| 15. | 70 - 74 tahun | 95 | 89 | 89 | 90 | 363 |
| 16. | 75 - tahun | 77 | 95 | 113 | 106 | 391 |
| | J u m l a h | 34.735 | 27.249 | 29.069 | 23.966 | 115.019 |

4. Keadaan Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Kotif Dili pada saat ini (1992/1993) adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kotif Dili
Tahun 1992/1993

| No. | Nama Sekolah | Negeri | Swasta | Jumlah |
|-----|--------------|--------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TK | 1 | 9 | 10 |
| 2. | SD | 31 | 9 | 40 |
| 3. | SMP | 5 | 6 | 11 |
| 4. | SMA | 4 | 6 | 10 |
| 5. | SMEA | 1 | - | 1 |
| 6. | SMKK | 1 | - | 1 |
| 7. | STM | 1 | - | 1 |
| 8. | SMP S/SMIK | 1 | - | 1 |
| 9. | UNTIM | - | 1 | 1 |
| 10. | IPI | - | 1 | 1 |
| 11. | UT | 1 | - | 1 |
| 12. | POLITEKNIK | 1 | - | 1 |
| | J u m l a h | 47 | 32 | 79 |

Sedangkan jumlah murid dan murid adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah guru dan murid negeri dan swasta Kotif Dili
menurut tingkat sekolah Tahun 1992/1993

| No. | Tingkat Sekolah | Guru | | Murid | |
|-----|-----------------|------|--------|--------|--------|
| | | Neg. | Swasta | Neg. | Swasta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SD | 525 | 152 | 17.096 | 3.217 |
| 2. | S M T P | 160 | 105 | 3.090 | 959 |
| 3. | S M T A | 294 | 144 | 4.331 | 2.309 |
| | J u m l a h | 979 | 401 | 24.517 | 6.485 |

Dari data di atas maka dapat diketahui ratio antara guru dan murid.

5. Pola Kehidupan Sosial Ekonomi

Pola kehidupan sosial di Kotif Dili pada dasarnya tidak berbeda dengan pola kehidupan sosial di daerah lain di Timor Timur. Pola kehidupan umumnya masih bersifat gotong royong, kekeluargaan ini terlihat dalam hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya terutama dengan kerabatnya sendiri.

Demikian halnya kegiatan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, baik sebagai keluarga batih maupun keluarga luas.

Pola kehidupan yang bersifat gotong royong dan kekeluargaan ini lambat laun bisa pudar. Hal ini disebabkan oleh proses modernisasi dan urbanisasi yang pada gilirannya akan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan terhadap pola-pola sosial dan ke pola sosial yang baru, di dalam segala aspek kehidupan suatu masyarakat.

Mata pencaharian penduduk Kotif Dili adalah sebagai petani, pegawai negeri, ABRI, pedagang, Perajin, tukang, peternak unggas, nelayan. Di samping mata pencaharian pokok, mereka juga mempunyai mata pencaharian sampingan seperti dalam bidang peternakan (sapi, kerbau, babi, kuda kambing/domba, ayam dan itik), dalam bidang perkebunan (kelapa, kapok), dalam bidang pertanian (tomat dan sayuran).

Secara ekonomis, dapat terlihat bahwa daya dukung tanah pertanian semakin sempit sebagai akibat dari perkembangan perkotaan. Namun di sektor lain ada perubahan-perubahan peningkatan penghasilan, ber-

kat kerja keras tenaga PPS dan PPL, latihan ketrampilan, penyuluhan dan bimbingan.

6. Pola Kehidupan Beragama

Mengenai pola kehidupan beragama, di Kotif Dili memiliki 5 golongan agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Dari kelima agama tersebut yang memiliki penganut terbesar adalah agama Katolik pada tahun 1991 berjumlah 94.944 orang, kemudian berturut-turut agama Islam dengan jumlah penganut 9.899 orang, Protestan 7.014 orang, Budha 1.913 orang dan Hindu dengan jumlah penganut 1.825 (sumber : Kandep Agama Dili). Jika dilihat dari perbandingan antara penganut agama yang satu dengan yang lain, maka penganut agama Katolik lebih mendominasi daripada agama yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Kotif Dili mayoritas beragama Katolik.

Dalam hal sarana ibadah, di Kotif Dili telah dibangun tempat-tempat ibadah baik yang sudah permanen, semi permanen maupun yang masih darurat. Adapun jumlah bangunan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

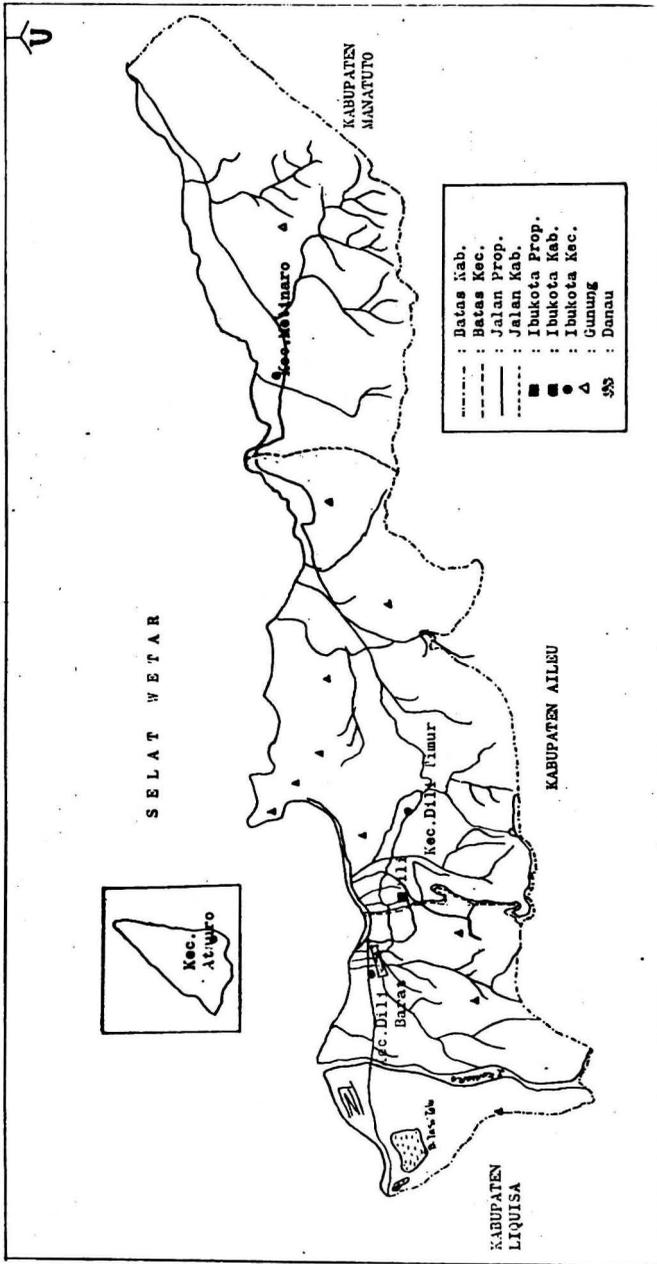
Tabel 6
Tempat Ibadah menurut jenis dan agama
di Kotif Dili Tahun 1991

| No. | Agama | Tempat Ibadah | | | Jumlah |
|-----|-------------|---------------|----------|---------|--------|
| | | Permanen | Semi Per | Darurat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Islam | 8 | 9 | 1 | 18 |
| 2. | Katolik | 6 | 21 | 23 | 50 |
| 3. | Protestan | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 4. | Hindu | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Budha | 1 | - | - | 1 |
| | J u m l a h | 20 | 33 | 34 | 87 |

Sumber : Kandep Agama Dili

Jika dilihat perbandingan antara jumlah penganut dengan jumlah tempat ibadah yang tersedia, dapat dikatakan cukup memadai, sehingga kegiatan beragama dapat berjalan dengan lancar.

KABUPATEN DILI



Dilihat dari kesediaan dana ketaatan penganut agama dapat dikatakan bahwa para warga/penduduk Kotif Dili adalah merupakan masyarakat yang agamais dan patuh serta tekun dalam melaksanakan kewajiban ibadah agamanya masing-masing. Hal itu dapat dilihat dari padatnya pengikut dalam melaksanakan ibadah agamanya baik di gereja-gereja pada tiap hari minggu, di mesjid-mesjid/sula pada jumat dan hari-hari biasa, serta di Pura dan di Vihara pada hari-hari besar agama tersebut.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DILI BARAT

1. Lokasi dan Administrasi

a. Lokasi

Kecamatan Dili Barat merupakan salah satu kecamatan di Kotif Dili, berada di bagian barat yang merupakan pusat perkotaan Dili. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir semua perkantoran, pertokoan dan fasilitas umum berada di Kecamatan Dili Barat.

Kecamatan Dili Barat memiliki luas wilayah 63,345 Km², yang terbagi dalam 11 desa.

Batas-batas Kecamatan Dili Barat adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wetar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aileu

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Liquica

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dili Timur.

Keadaan iklim Kecamatan Dili Barat sama dengan keadaan iklim Kotif Dili yaitu beriklim tropis, dengan suhu dan kelembaban udara yang sama pula.

a. Administrasi

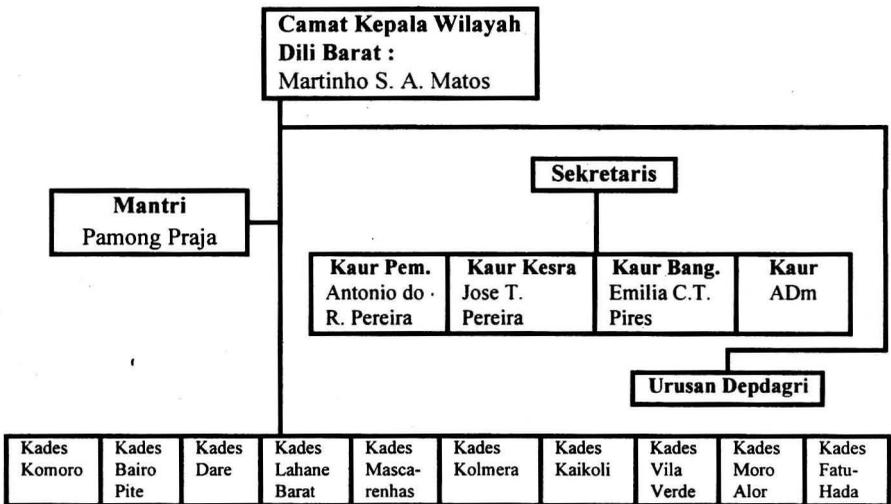
Secara administrasi Kecamatan Dili Barat merupakan bagian dari Kotif Dili, yang terdiri atas 11 desa yaitu Desa Komoro dengan luas wilayah 26,435 Km², Desa Bairro Pite 6,320 Km², Desa Dare 21,720 Km², Desa Lahane Barat 3,170 Km², Desa Mascarenhas 0,700 Km², Desa Kolmera 0,440 Km², Desa Kaikoli 0,630 Km², Desa Vila Verde 1,955 Km², Desa Motael 0,980 Km², Desa Moro Alor 0,320 Km² dan Desa Fatuhada 0,675 Km² (Sumber : Kantor Kecamatan Dili Barat).

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan, Camat dibantu oleh seorang sekretaris yang membantu Camat dalam melaksanakan

administrasi kecamatan serta membawahi beberapa bagian (seksi) seperti :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Kesejahteraan Rakyat
- c. Urusan Pembangunan
- d. Urusan Administrasi

Selanjutnya dapat dilihat struktur (susunan) organisasi dan tata kerja pemerin-tahan Kecamatan Dili Barat di bawah ini :



Pembagian di atas, dimaksudkan untuk memperlancar penyampaian-penyampaian yang datang dari tingkat atas (lebih tinggi) dan demi kelancaran tugas-tugas/pekerjaan secara efisien dan efektif sehingga memungkinkan tercapainya hasil yang semaksimal mungkin.

2. Pola Perkampungan

Rumah-rumah penduduk Kecamatan Dili Barat yang terbagi dalam 11 desa, meliputi desa Komoro, Bairo Pite, Dare, Lahane Barat, Masca-renhas, Kolmera, Kaikoli, Vila Verde, Motael, Moro Alor dan Fatuhada memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah-rumah berderet memanjang sejajar dengan jalan dan memiliki halaman yang berfungsi sebagai taman dan tempat bermain anak-anak.

Di samping pola rumah yang memanjang, juga terdapat rimah-rumah yang mengelompok ini dengan ini dibangun tanpa memperhatikan jalan atau tanpa memperhitungkan jalan masuk menuju kampung, sehingga ada kesan semrawut dan tidak beraturan. Namun demikian rumah-rumah tersebut juga memiliki ha-laman yang terletak di depan rumah yang biasanya dipergunakan untuk menanam bunga dan tempat bermain anak-anak.

Rumah-rumah yang berpola memanjang adalah rumah-rumah yang dibangun secara permanen dan semi permanen. Sedangkan rumah-rumah yang berpola memanjang mengelompok adalah rumah-rumah yang dibangun secara semi permanen dan darurat.

Mengenai jumlah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal adalah berjumlah 10.646 unit, sedangkan jumlah rumah tangga adalah 11.544. Lebih lanjut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 7
Jumlah bangunan tempat tinggal dan
Rumah tangga di Kecamatan Dili Barat Th. 1990

| No. | D e s a | Tempat Tinggal | Rumah Tangga |
|-----|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Komoro | 3.133 | 3.362 |
| 2. | Bairo Pite | 2.678 | 2.716 |
| 3. | D a r e | 260 | 276 |
| 4. | Lahane Barat | 445 | 458 |
| 5. | Mascarenhas | 665 | 876 |
| 6. | Kaikoli | 775 | 916 |
| 7. | Kolmera | 234 | 306 |
| 8. | Vila Verde | 967 | 1.059 |
| 9. | Motael | 734 | 793 |
| 10. | Moro Alor | 202 | 228 |
| 11. | Fatuhada | 553 | 554 |
| | J u m l a h | 10.646 | 11.544 |

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Timor Timur

Jika dilihat dari jumlah tempat tinggal dan jumlah rumah tangga, masih terdapat perbedaan yaitu 1.898. Jumlah tersebut merupakan jumlah rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal atau jumlah tempat tinggal yang harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah pemilikan tempat tinggal yang ada di Kecamatan Dili Barat belum merata. Namun hal itu da-

pat diatasi dengan cara sebagian besar atau sejumlah 435 rumah tangga menempati bangunan bukan tempat tinggal. Dengan demikian jumlah rumah tangga yang tidak memiliki tempat tinggal relatif sedikit atau sejumlah 463 rumah tangga atau 4,01 %.

3. Kependudukan

Keadaan penduduk di Kecamatan Dili Barat semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 berjumlah 61.984 jiwa, kemudian pada awal tahun 1991 sudah meningkat menjadi 63.642 dan pada akhir tahun 1991 meningkat lagi menjadi 66.963 jiwa.

Tabel 8
Penduduk Dili Barat per desa menurut
Jenis kelamin tahun 1990

| No. | D e s a | L | P | Jumlah (L&P) | Sex Ratio |
|-----|--------------|--------|--------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Komoro | 10.295 | 7.905 | 18.200 | 130 |
| 2 | Bairo Pite | 7.335 | 6.155 | 13.490 | 119 |
| 3 | D a r e | 778 | 725 | 1.503 | 107 |
| 4 | Lahane Barat | 1.574 | 1.369 | 2.943 | 115 |
| 5 | Mascarenhas | 2.444 | 1.824 | 4.268 | 134 |
| 6 | Kaikoli | 2.497 | 1.857 | 4.354 | 134 |
| 7 | Kolmera | 897 | 661 | 1.558 | 136 |
| 8 | Vila Verde | 3.631 | 2.841 | 6.472 | 128 |
| 9 | Motael | 2.686 | 1.937 | 4.623 | 139 |
| 10 | Moro Alor | 835 | 648 | 1.483 | 129 |
| 11 | Fatuhada | 1.763 | 1.327 | 3.090 | 133 |
| | J u m l a h | 34.735 | 27.249 | 61.984 | 127 |

Sumber : Kantor Statistik Prop. Timor Timur.

Tabel 9
Penduduk Dili Barat menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Tahun 1990.

| No. | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0 - 4 tahun | 4.927 | 4.465 | 9.392 |
| 2. | 5 -14 tahun | 6.804 | 6.061 | 12.865 |
| 3. | 15 - 24 tahun | 9.642 | 6.940 | 16.582 |
| 4. | 25 - 34 tahun | 7.466 | 5.432 | 12.898 |
| 5. | 35 - 44 tahun | 3.345 | 2.321 | 5.566 |
| 6. | 45 - 54 tahun | 1.761 | 1.172 | 2.933 |
| 7. | 55 - 64 tahun | 596 | 541 | 1.137 |
| 8. | 65 - 74 tahun | 217 | 222 | 439 |
| 9. | 75 - tahun | 77 | 95 | 172 |
| | J u m l a h | 34.735 | 27.249 | 61.984 |

Sumber : Kantor Statistik Prop. Timor Timur

Dari data tersebut di atas, jika dikelompokkan dalam produktif dan tidak produktif, adalah sebagai berikut : Kelompok usia yang tidak produktif (0-4 dan 55 ke atas) berjumlah 23.405 jiwa atau sekitar 38 %, sedangkan kelompok usia produktif (15-54 tahun) berjumlah 37.979 jiwa atau 62 %. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penduduk Kecamatan Dili Barat dapat dikatakan sebagai penduduk yang produktif.

Mengenai pertumbuhan penduduk berdasarkan angka kelahiran dan kematian serta perpindahan penduduk, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 10
Pertumbuhan penduduk Dili Barat tahun 1991

| No. | D e s a | Penduduk awal bln | Lahir | Mati | Datang | Pindah | Penduduk akhir bln |
|-----|--------------|-------------------|-------|------|--------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Komoro | 15.896 | 924 | 8 | 1.753 | 69 | 18.496 |
| 2. | Bairo Pite | 14.636 | 25 | 10 | 180 | 67 | 14.744 |
| 3. | D a r e | 1.752 | 7 | - | - | - | 1.759 |
| 4. | Lahane Barat | 1.923 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1.932 |
| 5. | Mascarenhas | 3.316 | - | - | 18 | - | 3.334 |
| 6. | Kaikoli | 3.515 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3.506 |
| 7. | Kolmera | 2.799 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.810 |
| 8. | Vila Verde | 6.485 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6.490 |
| 9. | Motael | 5.321 | - | 1 | 45 | 30 | 5.335 |
| 10. | Moro Alor | 1.612 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1.619 |
| 11. | Fatuhada | 3.488 | 9 | 1 | 124 | 3 | 3.617 |
| | Jumlah | 60.743 | 994 | 64 | 2.159 | 190 | 63.642 |

Sumber : Kantor Kecamatan Dili Barat

Data tersebut di atas, dapat diketahui perkembangan penduduk Kecamatan Dili Barat antara yang lahir dan yang mati dan antara yang datang dan yang pindah selama satu tahun, menunjukkan bahwa mobilitas penduduk relatif rendah yaitu sekitar 4,77 %. Namun khusus desa Komoro menunjukkan bahwa mobilitas penduduk cukup tinggi yaitu sekitar 16,35 %.

4. Keadaan Pendidikan

Di Kecamatan Dili Barat pada tahun 1992/1993 terdapat 19 sekolah dasar dengan jumlah murid 9.568, Sekolah Mengengah Pertama berjumlah 6 buah de-ngan jumlah siswa 2.419 dan sekolah Menengah Tingkat Atas dengan jumlah siswa 2.540 siswa.

Sedangkan jumlah guru untuk tingkat SD berjumlah 359 guru, untuk tingkat SMTP berjumlah 140 guru dan untuk tingkat SMTA berjumlah 140 guru. (Sumber : Kandep Dikbud Dili).

Jika dilihat perbandingan jumlah guru dan murid, maka dapat dilihat pula ratio guru-murid. Ratio guru-murid SD adalah 1 : 25,65, ratio guru-murid SMTP adalah 1 : 17,21 dan ratio guru-murid untuk SMTA adalah 1 : 18,14. Ratio guru-murid tersebut masih dalam taraf ideal.

Tingkat kesertaan sekolah cukup tinggi, mengingat jumlah penduduk usia sekolah SD, SMTP, SMTA (6-20 tahun) adalah 21.162 jiwa, sedangkan jumlahsiswa SD, SMP, dan SLTA adalah 14.527 siswa. Jadi jumlah penduduk usia sekolah yang tidak sekolah masih ada 6.635 jiwa atau 38,60 %.

5. Pola Kehidupan Sosial Ekonomi

Hubungan sosial antar warga cukup baik, meskipun kadang-kadang terjadi konflik sosial. Untuk mempererat hubungan persaudaraan antar sesama warga masyarakat, dapat terwujud melalui kegiatan/aktivitas sosial dalam bentuk organisasi atau perkumpulan, misalnya organisasi-organisasi PKK, Karang Taruna, olah raga dan kesenian.

Hubungan tolong menolong dapat dikatakan baik, terutama dalam hal kesusahan. Apabila ada kematian, maka tetangga di sekitarnya akan segera datang membantu segala sesuatu yang diperlukan tanpa ada yang meminta.

Kebiasaan ini dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Sedangkan tolong yang belum bersifat kesusahan, seperti perkawinan, ulang tahun dan sebagainya, orang akan datang membantu jika diminta/diundang.

Dalam kehidupan keluarga, laki-laki/suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Penghasilan keluarga terutama bersumber dari penghasilan kepala keluarga/suami, meskipun ada yang bersumber dari istri. Dalam kenyataannya, banyak para istri yang bekerja, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang dan sebagainya. Tujuan atau motivasi para istri yang bekerja ini sangat bervariasi.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Dili Barat sebagian besar adalah sebagai petani, kemudian lainnya sebagai pedagang, nelayan, pegawai negeri, dan swasta, ABRI, Hansip, sopir, buruh dan tukang.

Pada tahun 1992 yang bermata pencaharian sebagai petani ada 8.062 orang, sebagai buruh tani berjumlah 5.981 orang PNS 4.840 orang pedagang 2.705 orang, buruh ada 1.821 orang, ABRI 1.356 orang, tukang batu 759 orang, tukang kayu 709 orang, hansip 159 orang dan swasta ada 275 orang. Sedangkan yang berstatus sebagai penganggur berjumlah 2.214 orang (sumber : Kantor Kecamatan Dili Barat).

6. Pola Kehidupan Beragama

Kecamatan Dili Barat yang berpenduduk 63.642 jiwa (1991) memiliki lima golongan agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Adapun jumlah penganutnya sebagai berikut : Islam berjumlah 7.763 orang, Katolik 48.288 orang, Protestan 4.364 orang, Hindu ada 1.554 orang dan Budha berjumlah 316 orang. Sedangkan jumlah rohaniawan sebagai berikut: Islam berjumlah 43 (Iman dan Kotip), Katolik berjumlah 65 (Pastor, Bruder, Suster, Katekis), Protestan berjumlah 31 (Pendeta dan Guru Injil), Hindu dan Budha tidak ada (Kandep Agama Kabupaten Dili 1992).

Jika dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah penganut agama, adalah 63.642 dibanding 62.285, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesertaan penduduk dalam beragama cukup tinggi. Sedangkan tingkat kesetiaan dalam menjalankan ibadah agama masing-masing dapat dilihat banyaknya pengikut dalam kegiatan beragama, misalnya jumlah pengikut pada waktu sembahyang yang Jumat di Mesjid-mesjid, pengikut sembahyang misa pada hari minggu di Gereja-gereja, juga pada hari-hari tertentu di Pura dan Vihara.

Tempat-tempat ibadah yang ada di Kecamatan Dili Barat baik yang sudah permanen, semi permanen dan yang darurat terdiri dari : Islam berjumlah 13 unit, Katolik berjumlah 38 unit, Protestan berjumlah 15 unit, sedangkan Hindu dan Budha tidak ada.

C. GAMBARAN UMUM DESA KOMORO

1. Lokasi dan Administrasi

a. Lokasi

Desa Komoro terletak di bagian barat kota Dili kurang lebih 5 Km dari pusat Kota, dengan luas wilayah 26.435 Km².

Batas-batas desa Komoro adalah :
Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Wetar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aileu
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Liquica
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Fatuhada dan desa Fatumetan
Dili Barat.

Mengenai keadaan geografis, keadaan iklim, suhu dan curah hujan, tidak berbeda dengan keadaan di Kotif Dili, karena desa Komoro merupakan desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Dili Barat.

b. Adinistrasi

Secara administrasi, desa Komoro termasuk dalam wilayah Kecamatan Dili Barat, sebagai bagian dari Daerah Tingkat II Kotif Dili, yang terbagi dalam dua Kecamatan yaitu Kecamatan Dili Barat dan Dili Timur.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mengolah administrasi desa serta membawahi beberapa bagian (seksi) seperti :

1. Urusan Pemerintahan, dengan tugas-tugas :
 - melaksanakan keputusan pemerintah dan instansi serta petunjuk-petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Camat Kelapa Wilayah mengenai masalah-masalah pemerintahan Desa;
 - membina kegiatan dan perkembangan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga.
2. Urusan Pembangunan desa, dengan tugas-tugas :
 - menghimpun dana dan sarana untuk melaksanakan pembangunan;
 - membantu memelihara, mengatasi dan melaporkan kepada pimpinan desa mengenai kerusakan perlengkapan desa termasuk jalan-jalan, selokan-selokan dan lain-lain.
3. Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dengan tugas-tugas:
 - mengusahakan agar anak-anak dapat bersekolah demi meningkatkan kecerdasan bangsa;
 - mengusahakan dan sosial untuk menolong fakir miskin.
4. Urusan Keuangan, dengan tugas-tugas:

- membuat pembukaan desa, pembukuan pemasukan semua jenis pajak, redistribusi, dan pengeluaran.

5. Urusan Umum, dengan tugas-tugas :

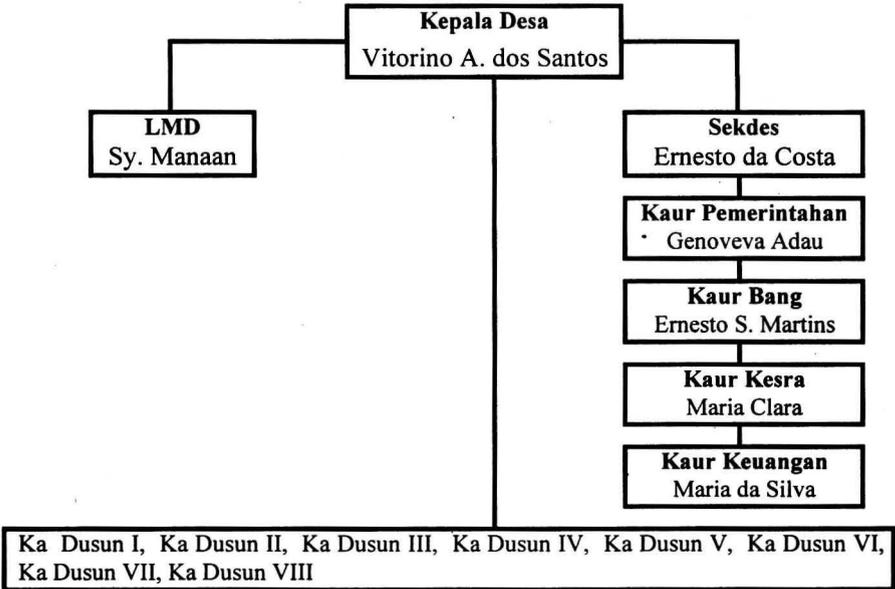
- mengurus administrasi perkantoran;
- memelihara lingkungan perkantoran.

Selanjutnya desa Komoro dibagi dalam 8 Dusun, yaitu :

- 1) Dusun I : Manleuwana, terbagi dalam 4 RT yaitu : RT 1 Kp. Manleuwana, RT2 Kp. Haslaran, RT3 Kp. Lesibutak, RT4 Kp. Beduku.
- 2) Dusun II : Bebunuk, terbagi dalam 4 RT, yaitu : RT1 Kp. Bebunuk, RT2 Kp. Falaran, RT3 Kp. Tuti, RT4 Kp. Lurumata.
- 3) Dusun III : Aimutin, terbagi dalam 4 RT, yaitu : RT1 Kp. Aimutin I, RT2 Kp. Aimutilaran, RT3 Kp. Aimutin II, RT4 Kp. Fomento.
- 4) Dusun IV : Marinir, terbagi dalam 6 RT yaitu : RT1 Kp. Marinir, RT2 Kp. Beto T, RT3 Kp. Beto B.A. RT4 Kp. BetoB.B, RT5 Kp. Raikutu, RT6 Mess Pemda Tk. I
- 5) Dusun V : Baru, terbagi dalam 7 RT yaitu : RT1 Kp. Baru A, RT2 Kp. Baru B, RT3 Kp. Baru C, RT4 Kp. Baru D, RT5 Kp. Baru E, RT6 As. Pol, RT7 Kp. Merdeka.
- 6) Dusun VI : Pante Kelapa, terbagi dalam 4 RT yaitu : RT1 Kp. Pante Kelapa I, RT2 Kp. Pante Kelapa II, RT3 Kp. Pante Kelapa III, RT4 Kp. Pante Kelapa IV.
- 7) Dusun VII: Perumdis, terbagi dalam 5 RT yaitu : RT1 Kp. Perumdis A, RT2 Kp. Perumdis B, RT3 Perumdis C, RT4 Perumdis D RT5 Kp. Perum Keuangan.
- 8) Dusun VIII: Korem terbagi dalam 5 RT yaitu : RT1 As. Korem I, RT2 As. Korem II, RT3 As. Korem III, RT4 As. Korem IV, RT5 As. 744.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan mengenai struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Komoro berikut ini :

**Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Komoro**



Pembagian di atas dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas/pekerjaan sehari-hari secara efisien dan efektif, sehingga memungkinkan tercapainya hasil yang maksimal, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Di samping organisasi dan tata laksana pemerintahan, juga terdapat organisasi/lembaga seperti :

- 1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah yang menghimpun semua golongan dalam masyarakat, guna menggerakkan partisipasi (keikutsertaan) seluruh anggota masyarakat.
- 2) Organisasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai organisasi kaum wanita (ibu-ibu) yang merupakan suatu gerakan untuk mensejahterakan keluarga dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Pola Perkampungan dan Kondisi Fisik Kampung

a. Pola Perkampungan

Seperti desa-desa lain yang ada di Kecamatan Dili Barat, pola perkampungan desa Komoro sebagian besar adalah bentuk memanjang, yaitu berderet memanjang sejajar dengan jalan. Pola perkampungan dengan bentuk demikian sebagian besar adalah perkampungan rumah-rumah dinas, rumah-rumah yang dibangun oleh BTN atau Perumnas.

Di samping pola perkampungan dengan bentuk memanjang, terdapat pola perkampungan yang mengelompok. Perkampungan dengan pola demikian adalah rumah-rumah yang dibangun tanpa memperhatikan jalur-jalur, cukup mengelompok tanpa ada pembatas/pagar antara rumah yang satu dengan rumah yang lain.

b. Kondisi Fisik Kampung

Keadaan dan Kondisi fisik desa Komoro secara singkat dapat disimpulkan belum memadai. Hal ini dapat dibuktikan dari perbandingan jenis rumah rakyat yang ada di desa Komoro. Jenis rumah darurat berjumlah 1.278 unit, rumah semi permanen berjumlah 110 unit dan rumah permanen berjumlah 223 unit. Sedangkan rumah dinas berjumlah 327 unit, rumah kantor 20 unit, dan rumah swasta berjumlah 3 unit (sumber : Kantor Desa Komoro).

Dari data di atas dapat dilihat jumlah rumah rakyat secara keseluruhan yaitu 1.948 unit. Dari jumlah tersebut 1.278 unit merupakan rumah darurat, dan 680 unit merupakan jenis rumah semi permanen, permanen dan rumah-rumah dinas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk desa Komoro masih menempati rumah-rumah darurat yang menggunakan material triplek, seng atau rumbia/daun lontar sebagai atapnya.

Mengenai pemerataan pemilikan rumah, dapat dilihat dari perbandingan jumlah rumah dan jumlah KK yang ada. Jumlah rumah seluruhnya adalah 1.948 unit, sedangkan jumlah KK adalah 3.718, sehingga dapat disimpulkan perbandingan jumlah rumah dengan jumlah KK adalah 1 : 1,9.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengenai keadaan rumah-rumah rakyat baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum memadai.

Sasaran dan prasarana yang merupakan salah satu penunjang berlang-

sungnya kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah sarana transportasi yang cukup baik. Prasarana berupa jalan sebagian besar sudah diaspal, terutama jalan-jalan utama yang menghubungkan antar dusun, desa dan kecamatan. Jalan yang masih merupakan jalan tanah adalah sebagian jalan-jalan yang menghubungkan antara kampung-kampung jalan-jalan yang menghubungkan antar kampung ini sebagian lagi sudah diaspal. Walaupun sebagian masih merupakan jalan tanah namun dilalui dengan kendaraan roda empat.

Kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan pokok terutama untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk minum, masak dan mencuci. Untuk memenuhi kebutuhan ini telah tersedia fasilitas PAM. Di dusun-dusun tersedia tenki-tanki air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain fasilitas yang telah tersedia, masyarakat sendiri juga membuat sumur-sumur pompa. Air dari sumur ini cukup bersih sehingga dapat dimanfaatkan sebagai air minum, masak dan mencuci.

3. Kependudukan

Penduduk desa Komoro pada tahun 1990 berjumlah 18.200 jiwa, terdiri dari 10.295 laki-laki dan 7.905 perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Penduduk Desa Komoro menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Tahun 1990

| No. | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | 0 - 4 tahun | 1.598 | 1.374 | 2.972 |
| 2. | 5 - 14 tahun | 2.018 | 1.796 | 4.814 |
| 3. | 15 - 24 tahun | 2.660 | 1.813 | 4.473 |
| 4. | 25 - 34 tahun | 2.376 | 1.711 | 4.087 |
| 5. | 35 - 44 tahun | 1.062 | 676 | 1.638 |
| 6. | 45 - 54 tahun | 467 | 293 | 760 |
| 7. | 55 - 64 tahun | 143 | 146 | 289 |
| 8. | 65 - 74 tahun | 54 | 77 | 121 |
| 9. | 75 - tahun | 17 | 29 | 46 |
| | J u m l a h | 10.295 | 7.905 | 18.200 |

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Timor Timur

Mengenai perkembangan penduduk desa Komoro, dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa jumlah penduduk desa Komoro pada tahun 1990 adalah 18.200 jiwa sedangkan pada tahun 1991 berjumlah 19.085 jiwa, yang terdiri atas 9.738 jiwa adalah laki-laki dan 9.347 jiwa adalah perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam kurun waktu satu tahun jumlah penduduk desa Komoro telah bertambah 885 jiwa atau meningkat sekitar 4,862 persen.

4. Keadaan Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan, pemerintah telah berusaha meningkatkan kesempatan bagi setiap generasi muda atau anak usia sekolah (6-20 tahun). Untuk melaksanakan usaha tersebut, pemerintah berusaha mencukupi fasilitas pendidikan, yaitu dengan membangun gedung-gedung sekolah.

Adapun jumlah sekolah yang ada di desa Komoro adalah tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dua Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dengan adanya fasilitas pendidikan yang cukup memadai, diharapkan dapat menampung anak usia sekolah atau pun generasi muda di desa Komoro dan sekitarnya.

5. Pola Kehidupan Sosial Ekonomi

Hubungan sosial dapat terjadi karena adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial di desa Komoro dapat dikatakan pada umumnya bersifat positif. Hal ini dapat dilihat dari hubungan dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tua, anak dengan anak saat makan bersama, saat nonton TV bersama dan sebagainya. Interaksi sosial dapat pula terjadi dengan penduduk luar/masyarakat luas, misalnya saat berkunjung/silaturahmi dengan keluarga lain, saat memberikan penyuluhan-penyuluhan atau saat dalam pertemuan-pertemuan lain sejenis.

Hubungan tolong menolong sesama warga di desa Komoro dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari rasa solidaritas dan kesetiakawanan warga yang tinggi. Misalnya, jika ada warga yang mendapat musibah kematian maka warga sekitarnya dan bahkan yang jauhpun akan segera datang untuk membantu membereskan segala kebutuhan yang diperlukan. Rasa untuk menolong ini timbul secara spontan, tanpa

ada yang meminta. Hubungan tolong menolong ini juga terjadi dalam hal yang bersifat suka cita, misalnya ada warga yang mempunyai hajat/mengadakan perkawinan/pernikahan, maka warga disekitarnya akan membantu mempersiapkan segala keperluan jika diminta oleh keluarga yang punya hajat tersebut. Jadi ada perbedaan antara tolong dalam kesusahan dan dalam hal kegembiraan. Adanya saling tolong menolong ini menunjukkan bahwa warga desa Komoro mempunyai tingkat kerukunan yang cukup tinggi.

Untuk mempererat hubungan persaudaraan antar sesama warga masyarakat, dapat diwujudkan melalui kegiatan/aktifitas sosial dalam bentuk organisasi/ perkumpulan dan lembaga sosial seperti LMD, LKMD, PKK, PKB, Kesenian dan olahraga.

Dalam hal mata pencaharian, warga desa Komoro sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, kemudian berturut-turut PNS, ABRI, Pedagang, sopir, buruh, wanra, Polisi, Nelayan, Kamra LLAJR, Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 12
Penduduk Desa Komoro berdasarkan mata pencaharian tahun 1991

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----|---------------------|-------------|
| 1. | Petani | 3.124 orang |
| 2. | Buruh | 53 orang |
| 3. | Nelayan | 38 orang |
| 4. | Pedagang | 157 orang |
| 5. | PNS | 727 orang |
| 6. | ABRI | 310 orang |
| 7. | Wanra | 43 orang |
| 8. | Kamra | 28 orang |
| 9. | Polisi | 39 orang |
| 10. | Sopir | 57 orang |
| 11. | LLAJR | 8 orang |
| 12. | Polisi Pamong Praja | 3 orang |
| | Jumlah | 4.587 orang |

Sumber: Kantor Desa Komoro

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian yaitu 4.587 orang, sebagai petani berjumlah 3.124

orang atau sekitar 68,10 %. Sedangkan yang lain yaitu 1.463 orang atau sekitar 31,90 % sebagai buruh, Nelayan, Pedagang, PNS, ABRI, Wanra, Kamra, Polisi, Sopir, LLAJR dan Polisi Pamong Praja. Jadi nampak sekali bahwa penduduk desa Komoro sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani atau prosentasinya sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan program pemerintah daerah yang memprioritaskan sektor pertanian.

6. Pola Kehidupan Beragama

Seperti desa-desa lain yang ada di Kotif Dili, desa Komoro memiliki lima kelompok agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Dari kelima agama tersebut yang memiliki penganut/pemeluk terbanyak adalah agama Katolik. Jumlah penganut agama Katolik di desa Komoro adalah 11.794 orang, kemudian agama Protestan dengan jumlah penganut 1.890 orang, agama Hindu 278 orang, dan Budha 18 orang (Kantor Desa Komoro 1991). Dari data tersebut dapat dilihat perbedaan yang sangat menyolok, antara jumlah penganut agama Katolik dengan agama lainnya. Agama Katolik memang merupakan agama mayoritas di Propinsi Timor Timur.

Dilihat dari tingkat kesertaan, dapat dikatakan tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Komoro tahun 1991 adalah 19.058 jiwa, sedangkan jumlah pengikut agama berjumlah 15.910 orang, maka jumlah penduduk yang bukan/belum sebagian pengikut agama berjumlah 3.148 orang. Mengenai tingkat kesetiaan, dalam menjalankan ibadah agama, dapat dilihat dari banyaknya pengikut dalam kegiatan-kegiatan agama pada tempat-tempat ibadah dari masing-masing agama.

D. BERBAGAI PERMASALAHAN KOTA

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai masalah timbul di perkotaan. Kurang memadainya prasarana dan sarana, kurangnya pemahaman warga kota terhadap tata tertib dan aturan-aturan yang berlaku serta kurang berpartisipasi warga kota dalam peningkatan kota akan menimbulkan masalah-masalah kota. Demikian halnya di Kotif Dili, berbagai permasalahan timbul sebagai akibat dari kurangnya kedisiplinan warga kota dalam mematuhi segala tata tertib dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, di samping kurang memadainya prasarana dan sarana yang ada di kota.

Dalam rangka upaya peningkatan kota Administratif Dili menuju pembentukan Kotamadya yang diperkirakan 2 - 3 tahun lagi, perlu adanya peningkatan kualitas aparat, kemampuan managerial serta prasarana dan sarana yang layak untuk memenuhi kriteria pembentukan suatu kotamadya. Dalam peningkatan kualitas, Kotif Dili telah mencaangkan Dili Bertaiss (bersih, tertib, aman, indah, sehat dan sopan) sejak tahun 1987, namun upaya perwujudannya, baru terlaksana sejak tahun 1990 mulai Januari.

Dalam upaya menjadikan Dili sebagai Kota Bertaiss ada 3 program pokok yang dilaksanakan oleh Walikota yaitu :

- a. Program fungsional, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi struktur kelembagaan Kotif.
- b. Program operasional, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah kepada tujuan operasional dengan ciri-ciri sebagaimana dicanangkan oleh semboyan Bertaiss.
- c. Program khusus, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan, melalui terobosan-terobosan khususnya peranan Yayasan Dili Bertaiss sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang "Environment & City Lifestyle" yaitu berupaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan, yang ada dengan jalan menghimpun dana dan daya warga kota yang ingin berpartisipasi dalam mengembangkan kota Dili dalam segala aspek kehidupan.

Ketiga program tersebut telah dilaksanakan, kendatipun dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan efisien, karena kondisi atau problem struktural/mendasar yang dapat dijumpai di setiap instansi khususnya instansi sipil di seluruh Timor Timur, yang berkisar pada kondisi kualitas manusia dan management tugasnya (The man behind the tusk). Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Walikota, baik dalam meningkatkan kualitas pegawai (disiplin, etos kerja dan lain-lain), maupun upaya dalam melaksanakan terobosan tertentu dalam melaksanakan program-program tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan Dili Bertaiss, namun masih terdapat berbagai masalah kota yang menjadi hambatan. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- a. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
- b. Disiplin dan etos kerja karyawan belum membudaya

- c. Prasarana dan sarana belum memadai, antara lain :
- Belum meratanya pemasangan trotoar di pinggir jalan raya digunakan untuk jalan kaki , terutama anak-anak sekolah yang jelas mengganggu lalu lintas.
 - Kegiatan pemasangan trotoar yang mengganggu lalu lintas, yaitu tanah galian dan material/pasir memakan tempat atau setengah dari lebar jalan raya.
 - Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang belum merata/-kurang memadai, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.
- d. Partisipasi warga kota masih kurang, yaitu kurangnya partisipasi warga kota terhadap lingkungan kota, misalnya masih ada sebagian warga yang melemparkan atau bekas pembungkus ke jalan raya.
- e. Pemahaman, kesadaran dan disiplin warga kota terhadap aturan-aturan dan tata tertib yang berlaku masih kurang antara lain :
- Belum semua sopir Bus kota memahami dan menyadari akan arti dan pentingnya halte bus yaitu sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, namun masih menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.
 - Banyaknya pelanggar rambu-rambu lalulintas terutama sopir-sopir kendaraan umum, misalnya parkir kendaraan justru di tempat yang ada rambunya dilarang parkir berhenti di tempat letter S (dilarang stop).
 - Masih banyak sopir kota yang memutasi/membalik kendaraannya diperempatan jalan, bukan di terminal karena di tempat tersebut (perempatan) tidak ada Polisi yang berjaga.

BAB III

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN DESA KOMORO

Proses pembagunan Timor Timur dilakukan secara bertahap, **pertama**, tahap rehabilitasi, Oktober 1976-Maret 1977 dengan sarana utama merehabilitasi seluruh prasarana dan sarana umum, seperti rumah sakit, balai pengobatan, sekolah, sarana telekomunikasi dan perhubungan, di samping itu diadakan peningkatan keterampilan kepada para pegawai agar mereka dapat memahami sistem administrasi pemerintah yang berlaku.

Kedua, tahap konsolidasi, April 1977 - Maret 1978 dengan sarana utama melanjutkan serta meningkatkan langkah-langkah pembangunan sebelumnya, sehingga menjangkau penataan dan perbaiki yang lebih luas, misalnya pemantapan aparatur pemerintahan, peningkatan pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan dan sebagainya.

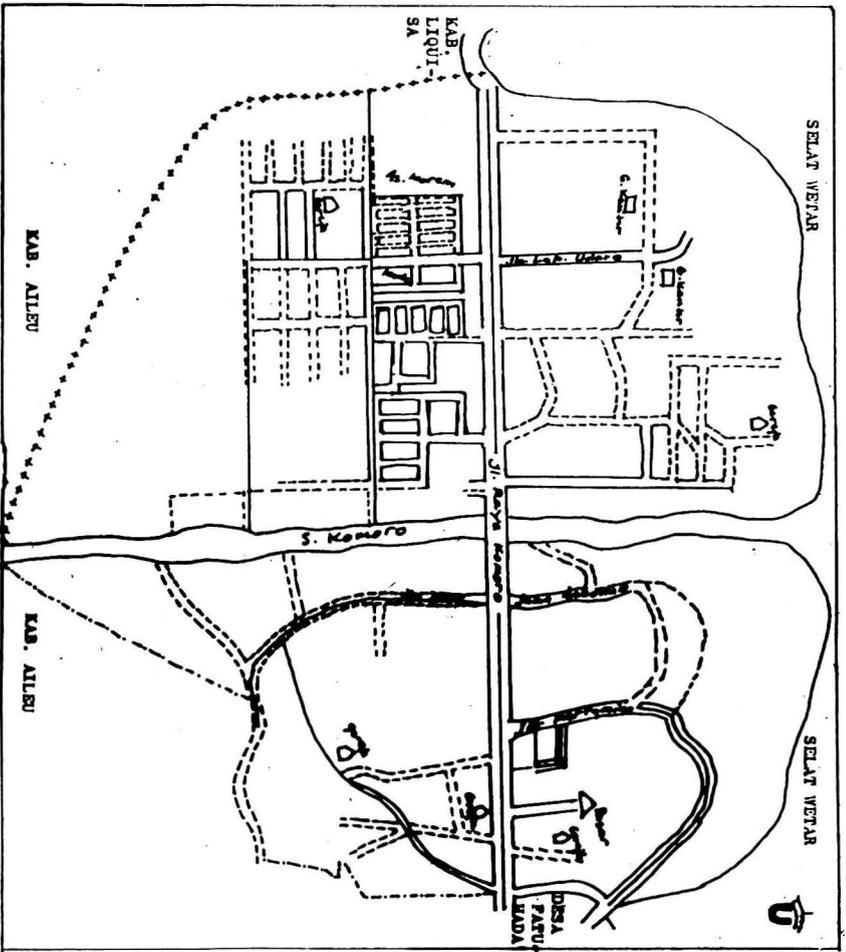
Ketiga, tahap stabilisasi, April 1978 - Maret 1982 dengan sarana utama pemantapan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparat pemerintah daerah secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian pemerintah daerah Timor Timur siap menyongsong tahapan pembangunan jangka pendek serta rencana pembangunan lima tahun IV (1984-1989).

Perlu dijelaskan bahwa sampai awal tahun 1993 di wilayah Kotif Dili, belum terbentuk Kelurahan. Dalam usaha menyukseskan program pemerintahan daerah dalam pembangunan maka warga masyarakat desa Komoro selalu mengadakan pembenahan pada aparat desanya, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa, anggota LMD/LKMD, Kepala Dusun serta Kepala Rukun Tetangga (RT).

Dalam pembenahan ini pertama diadakan pada aparatnya apakah program kerja yang direncanakan tersebut sudah dapat menyongsong program pembangunan pemerintah daerah atau belum. Seandainya belum, maka program tersebut segera diadakan pembenahan setelah program kerja tersebut sudah mantap maka aparat desa secara bersama-sama dengan instansi terkait mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat desa Komoro baik itu pembinaan terhadap :

- a. Disiplin dalam Penanganan Limbah Keluarga/Sampah
- b. Disiplin dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Sosial.

DESA KONORO



- c. Disiplin terhadap Administrasi Pemerintahan.
- d. Disiplin dalam Hubungan Ketetanggan.

A. DISIPLIN DALAM PENANGANAN LIMBAH KELUARGA/ SAMPAH

Mempermasalahkan pengadaan perumahan bagi golongan berpenghasilan rendah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan orang-orang dari golongan sektor informal yang umumnya juga berpenghasilan rendah, tetapi sifat alamiahnya berbeda sekali dengan rekan-rekannya yang bekerja di sektor formal seperti Pegawai Negeri, Penjaga Toko, atau pekerjaan kantor lainnya.

Masalah yang lebih memusingkan dalam rangka urbanisasi yang pesat adalah adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa pada umumnya para penduduk kota dan yang berurbanisasi ke kota sebagian besar adalah golongan berpenghasilan rendah yang berasal dari daerah-daerah yang berlatarbelakang agraris dan pertukangan. Umumnya golongan ini mempunyai pendidikan rendah, kurang memiliki ketrampilan maupun modal, akibatnya mereka cenderung bergerak di sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima, penjual rokok, surat kabar di samping-samping jalan, gerobak dorong tukang becak, penjaja keliling, pedagang keliling, pedagang eceran, buruh harian dan pekerja kasar dan tidak tetap lainnya (Herlin M : 1986; 133).

Di samping itu pula dalam rangka menanggulangi penduduk yang padat sebagai akibat adanya urbanisasi, maka sebagai realisasi/wujud nyata usaha pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dibangun penyediaan air bersih pedesaan, jamba keluarga dan sarana pembuangan air limbah, unit perpipaan, sumur artesis, unit perlindungan mata air, unit penampungan air hujan, sumur pompa tangan dangkal, unit sumur pompa tangan dalam, unit sumur gali, unit sarana mandi dan cuci (AB Lapian : 1988; 84-99).

Di lain pihak tinjauan dari segi ilmu pendidikan kesejahteraan keluarga ditegaskan, setiap keluarga masalah rumah, halaman dan penanganan air limbah keluarga ditegaskan, setiap keluarga masalah rumah, halaman dan penanganan air limbah keluarga/sampah merupakan problema yang sangat kompleks dan perlu penanganan secara kontinyu agar terhindar dari penyakit, dan yang perlu diperhatikan juga masalah tempat tinggal/rumah harus memenuhi syarat-syarat seperti :

daerah yaitu dari Kotif Dili yang berupa tong /bak yang dibuat dari drum.

Pemerintah daerah turut serta menangani sampah yang ada di sekitar kota Dili dalam rangka mensukseskan programnya yaitu program " Dili Bertaiss " yaitu Bersih, Tertib, Aman, Indah, Sehat dan Sopan. Biasanya sampah-sampah ini dikumpulkan dalam tong sampah/bak sampah keluarga, kemudian setiap penuh dipindahkan ke tempat/bak sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dalam penanganan sampah tampaknya warga desa Komoro sudah mulai sadar hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan warga dalam membuang sampah dengan memanfaatkan sarana baik yang disediakan oleh masing-masing warga maupun sarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bantuan pemerintah daerah kepada warga masyarakat desa Komoro terhadap penanganan sampah tidak saja berupa sarana dari bak tetapi juga pemerintah daerah menyediakan berupa truk pengangkut serta tenaganya untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Petugas pengangkutan sampah dari pemerintah daerah biasanya mengangkut sampah-sampah yang ada di desa Komoro satu kali dalam seminggu. Pada kesempatan ini warga masyarakat walaupun mendapat bantuan tenaga pengangkut sampah dari pemerintah daerah tetap tidak tinggal diam, tetapi turut berpartisipasi membantu petugas memindahkan sampah dari tempat masing-masing ke truk sampah yang dibawah oleh petugas.

Di samping warga ikut aktif membantu petugas memindahkan sampah juga dibantu oleh HANSIP, hal ini ada hubungannya dengan tugas HANSIP, dimana warga masyarakat desa Komoro yang tinggal pada komplek perumahan dalam menciptakan lingkungan yang aman terutama diserahkan pada HANSIP, karena mengingat warga masyarakat yang tinggal pada komplek perumahan mayoritas pegawai negeri, sehingga tidak semua dapat melaksanakan giliran jaga malam pada pos siskamling. Maka dari itu aparat desa mengambil langkah dengan jalan memungut biaya berupa iuran sebesar Rp. 2.500,- tiap kepala keluarga setiap bulan. Uang iuran ini dipergunakan untuk membantu HANSIP yang bertugas jaga malam pada pos-pos jaga (pos siskamling). Dalam upaya mewujudkan keamanan lingkungan secara kontinyu aparat desa bekerja sama dengan Babinsa/Binpolda memeriksa dua kali dalam satu malam yaitu pada pukul 22.00 wita dan pukul

04.00 wita ke pos-pos siskamling. Tujuan mengadakan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah hansip yang mendapat tugas pada malam itu menjalankan tugasnya atau tidak. Seandainya ada hansip yang bertugas tidak datang maka hansip tersebut ditanyakan apakah dia meminta ijin atau tidak, seandainya tidak minta ijin maka hansip tersebut diberi sanksi, tindakan yang pertama; berupa peringatan, kedua berupa peringatan berat dan seandainya peringatan satu dan dua tidak dilaksanakan maka hansip tersebut dikeluarkan sebagai anggota. Dan di samping itu pula aparat desa mengambil tindakan pada anggota hansip apabila dalam melaksanakan tugasnya mengganggu orang lain seperti mabuk-mabuk, mengadakan pungutan secara liar kepada warga masyarakat, karena itulah maka hansip turut aktif disamping meningkatkan keamanan lingkungan juga dalam menangani kebersihan lingkungan.

Seandainya truk pengangkut sampah terlambat datang dalam satu minggu, maka warga secara bergotong royong membakar sampah tersebut yang kemudian abu dari sampah tersebut ada yang memanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

Got/parit pada masyarakat desa Komoro hanya ada pada masyarakat yang tinggal pada komplek perumahan sehingga dalam penanganan pembuangan air limbah warga masyarakat memanfaatkan sarana got yang ada pada rumah masing-masing warga. Pada musim hujan got/parit ini menimbulkan masalah karena keadaan got tidak ada pembuangan atau buntu, sehingga di musim penghujan memerlukan penanganan yang serius. Dan begitu juga masalah penanganan kesehatan lingkungan warga masyarakat desa Komoro pada masing-masing rumah sudah dilengkapi dengan kamar mandi dan WC sehingga tidak perlu buang air besar jongkok pada sekitar lingkungan pekarangan.

Lain halnya dengan tingkat kedisiplinan warga masyarakat desa Komoro yang tinggal di luar komplek perumahan, masih rendah baik dalam penanganan kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan serta pemanfaatan pekarangan, hal ini disebabkan karena budaya atau tradisi mereka masih kuat dan didukung oleh latar belakang pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi membuang sampah dengan seenaknya pada lingkungan pekarangan dan di samping itu pula masih dijumpai adanya warga masyarakat jika buang air besar jongkok di sekitar pekarangannya.



- 4) Pendidikan dan latihan
- a. *Ketrampilan pemuda nelayan*
Sasaran kuantitatif 20 orang dengan tujuan meningkatkan mutu profesionalisme nelayan.
 - b. *Latihan pembuatan batako*
Sasaran kuantitatif 50 orang dengan tujuan memberi bekal ke-trampilan dan meningkatkan mutu profesionalisme tukang batu.
 - c. *Latihan tukang kayu*
Sasaran kuantitatif 50 orang dengan tujuan meningkatkan/memberikan bekal ketrampilan dan meningkatkan mutu profesionalisme tukang kayu.
 - d. *Latihan kepemimpinan*
Sasaran kuantitatif 10 orang dengan tujuan memberikan bekal kepemimpinan bagi anggota karang taruna.
- 5) Penataran-penataran
- a. *Penataran P4 pola pendukung 25 jam*
Sasaran kuantitatif 100 orang dengan tujuan membina sikap nasionalisme dan meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan guna membentuk pemuda Pancasila.
 - b. *Penataran pembinaan kejar paket A dan paket B*
Sasaran kuantitatif 10 orang dengan tujuan meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan belajar mengajar kejar paket A dan B.

Kemasyarakatan

Rincian kegiatan dalam kemasyarakatan adalah :

- 1) Bakti sosial yang terdiri dari :
- a. *Penhijauan lingkungan desa*
Sasaran kuantitatif adalah lingkungan rumah dan tanah-tanah kosong serta pinggir jalan desa, dengan tujuan memelihara dan melestarikan alam lingkungan desa.
 - b. *Ketertiban lingkungan desa*
Sasaran kuantitatif adalah lingkungan rumah, kantor dan rumah ibadah serta jalan-jalan, dengan meningkatkan kebersihan lingkungan, pemukiman dan desa
 - c. *Jamban keluarga dan MCK umum*
Sasaran kuantitatif adalah rumah penduduk dan balai-balai pertemuan, dengan tujuan meningkatkan cara hidup sehat.

- 2) Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah
Sasaran kuantitatif setiap hari besar nasional dan daerah, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
- 3) Posyandu dan keluarga berencana
Sasaran kuantitatif disetiap posyandu dan setiap keluarga, dengan tujuan meningkatkan kepedulian pemuda terhadap kesehatan dan kehidupan berkeluarga.
- 4) Siskamling
Sasaran kuantitatif disetiap RT/RK dan pos kamling, dengan tujuan terbinanya masyarakat (pemuda) yang tertib aman terkendali.

Usaha

Rincian kegiatan dalam usaha ini adalah:

- 1) Usaha industri batako
Sasaran kuantitatif satu unit industri batako, dengan tujuan membuka lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan serta pengadaan dana/kas karang taruna.
2. Penambangan kuantitatif satu lokasi penambangan batu pasir, dengan tujuan membuka lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan serta pengadaan dana/kas karang taruna.
3. Pengadaan air bersih
Sasaran kuantitatif satu unit pengelolaan sumur bor, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Keolahragaan

Rincin kegiatan keolahragaan ini adalah :

- 1) Pemasaran olahraga
Sasaran kuantitatif seluruh pemuda desa, dengan tujuan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan pemuda
- 2) Pembentukan klub olahraga
Sasaran kuantitatif satu klub olahraga desa dengan tujuan membina prestasi olahragawan, sehingga dikenal dengan Klub AN-DECO (klub anak-anak desa Komoro).
Pertandingan-pertandingan seperti: sepak bola, volly ball, sepak takrow, atletik, gerak jalan, basket ball dan permainan tradisio-

dapat dilihat adanya saling mengingatkan teman dalam meminum keras hendaknya jangan sampai mabuk dan lebih-lebih mabuk-mabukan di jalan, ini sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Serta karang taruna tunas harapan ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah remaja misalnya: ada anggota karang taruna mempunyai masalah dengan teman atau dengan tetangga maka karang taruna ikut menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas sehingga dapat menekan terjadinya perkelahian diantara remaja.

Seandainya karang taruna tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka masalah tersebut diserahkan kepada kepala desa, seandainya kepala desa juga tidak dapat menyelesaikannya maka masalah tersebut diserahkan kepada pihak berwajib.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pemuda pemudi masyarakat desa Komoro apabila tidak masuk menjadi anggota karang taruna adalah berupa; teguran/peringatan sampai tiga kali dan apabila peringatan yang diberikan baik yang diberikan oleh kepala desa maupun ketua karang taruna tidak juga dihiraukan maka pemuda atau pemudi tersebut dikucilkan sebagai warga masyarakat desa Komoro dan disamping itu pula jika ada keperluannya datang ke kantor desa untuk mengurus surat-surat tidak akan dilayani/ditolak. Jadi pemuda dan pemudi masyarakat desa Komoro jika ada keperluan mengurus surat-surat di Kantor desa, maka kepala desa selalu menanyakan apakah yang bersangkutan tercatat sebagai anggota karang taruna atau tidak, seandainya tidak maka pemuda tersebut mendapat peringatan atau belum dilayani dalam pengurusan surat-suratnya.

Begitu juga warga masyarakat desa Komoro terutama ibu-ibu dan remaja putri turut aktif menyongsong program pemerintah daerah maupun program pemerintah desa melalui wadah organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Adapun susunan pengurusnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan kelompok kerja.

Kelompok kerja ini dibagi dalam empat kelompok kerja yaitu kelompok kerja satu membidangi penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Kelompok kerja dua membidangi pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Kelompok kerja tiga membidangi sandang, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Kelompok kerja empat membidangi kesehatan, kelestarian

hidup lingkungan dan perencanaan sehat. Masing-masing kelompok kerja ini dipimpin oleh ketua kelompok kerja.

Program kerja organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) desa Komoro adalah terdiri dari :

1. Organisasi
2. Pendidikan
3. Kemasyarakatan
4. Usaha-usaha
5. Keolahragaan
6. Kesenian

Organisasi

Rincian Kegiatannya adalah :

a. Pembentukan pengurus

Sasaran kuantitatif dalam pembentukan pengurus ini adalah satu wadah kepengurusan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan kelompok-kelompok kerja. Target yang ingin dicapai adalah terbentuknya pengurus yang mampu bertanggung jawab untuk mempersatukan seluruh wanita dalam wadah PKK desa.

b. Pembinaan organisasi

Sasaran kuantitatif adalah organisasi PKK desa, rayon dan kelompok kerja, dengan tujuan membina kepengurusan/organisasi agar mampu secara maksimal melaksanakan semua program.

c. Pembentukan rayon

Sasaran kuantitatif sebanyak delapan rayon dengan tujuan mobilisasi seluruh anggota dalam wadah PKK desa, sehingga mampu mengembangkan tenaga dalam pembangunan desa.

d. Penataran pengurus dan anggota PKK

Sasaran kuantitatif 24 orang pengurus dan 4 kelompok kerja, dengan tujuan meningkatkan mutu profesionalisme pengurus dan anggota.

e. Kegiatan kewannitaan

Sasaran kuantitatif seluruh anggota PKK desa dengan tujuan mengembangkan daya pikir dan kreasi serta meningkatkan hubungan antara anggota yang semakin akrab guna persatuan dan kesatuan.



gota mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan anggota PKK, maka mereka berusaha menyempatkan diri untuk menghadiri pertemuan tersebut, karena mereka merasa malu jika tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut dan seandainya tidak dapat hadir maka mereka maka mereka akan memin-ta ijin lewat anggota yang lain dan memberikan alasannya tidak dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

C. DISIPLIN TERHADAP ADMINISTRASI PEMERINTAH

Warga masyarakat desa Komoro baik yang tinggal berbaur dengan kompleks perumahan maupun warga yang tinggal pada pola perkampungan yang terpencar, tampaknya masalah kedisiplinan terhadap administrasi pemerintahan belum dapat dikatakan mencapai 100 %. Walaupun demikian aparat desa tidak tinggal diam, mereka selalu mengadakan pembinaan terhadap warganya untuk menyadarkan agar berdisiplin terhadap administrasi pemerintahan, baik itu masalah yang menyangkut:

1. Disiplin terhadap administrasi akte kelahiran
2. Disiplin terhadap administrasi akte perkawinan
3. Disiplin terhadap administrasi lapor-melapor (musibah)
4. Disiplin terhadap administrasi pengurusan surat-surat seperti : memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan pengurusan surat-surat lainnya.

Disiplin Terhadap Administrasi Akte Kelahiran

Sesuai dengan hasil wawancara 59 % responden menyatakan dirinya sudah memiliki akte kelahiran dan seandainya ada penambahan anggota keluarga (melahirkan) segera melapor diri pada Ketua RT, RW dan kepala desa dan selanjutnya mereka segera mengurus akte kelahiran tersebut.

Tingkat kesadaran terhadap disiplin administrasi kelahiran ini tidak bisa lepas dari usaha aparat desa mengadakan pembinaan terhadap warganya, pembinaan ini biasanya dilakukan pada saat warga masyarakat melapor diri bahwa jumlah anggota keluarganya bertambah. Pada saat warga melapor inilah aparat desa/kepala desa memanfaatkan untuk mengingatkan agar segera mengurus akte kelahiran anaknya dan pada kesempatan itu pula diinformasikan memiliki akte kelahiran sangat ber-

guna, di samping dapat menunjukkan bahwa anak tersebut sah juga dapat dipergunakan untuk mendapatkan tunjangan anak bagi status orang tuanya pegawai negeri serta berguna untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, karena di sekolah-sekolah sebagai salah satu persyaratan murid baru harus melampirkan akte kelahiran serta sebagai persyaratan dalam melamar pekerjaan. Bertitik tolak dari itulah maka warga masyarakat desa Komoro semakin sadar akan pentingnya memiliki akte kelahiran.

Namun 41 % dari warga masyarakat Komoro ternyata belum memiliki kesadaran tentang perlunya memiliki akte kelahiran, hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan kondisi ekonomi yang masih rendah, dan mereka inilah yang tinggal pada pola perkampungan yang terpencar.

Dalam pengurusan akte kelahiran kepala desa memberikan kemudahan kepada warganya, agar dalam mengurus akte hendaknya diurus sendiri dan tidak menggunakan perantara orang lain, untuk menghindari berkembangnya calo-calo pegawai-pegawai liar, sehingga dapat menggunakan biaya sedikit mungkin.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mempunyai akte kelahiran terus dibangkitkan melalui pembinaan-pembinaan baik dilakukan pada pertemuan formal maupun informal.

Seandainya ada salah seorang warga tidak memiliki akte kelahiran, dari aparat desa tidak memberikan sanksi, hanya aparat desa memperingatkan kepada warga yang tidak memiliki akte kelahiran, biasanya akan mengalami hambatan dalam pengurusan administrasi misalnya mendaftarkan anak sekolah, mencari pekerjaan dan lain-lain.

Disiplin terhadap administrasi perkawinan

Demikian juga halnya dalam disiplin administrasi perkawinan aparat desa selalu mengingatkan pada warganya agar segera mengurus akte perkawinannya apabila dan seorang warga yang baru menikah serta menghimbau pada warga yang sudah lama menikah juga harus segera melengkapi akte perkawinannya melalui catatan sipil.

Warga masyarakat desa Komoro dalam disiplin administrasi perkawinan sudah menunjukkan disiplin yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari sikap warga apabila menikah segera melapor diri pada kantor desa dan mengurus surat nikahnya ke Gereja dan catatan sipil. Kedisiplinan

warga yang tinggi karena ditunjang oleh penduduk desa Komoro mayoritas memeluk agama Katolik, maka akte perkawinan atau surat nikah ini sangat diperlukan disamping menunjukkan sah sebagai suami istri juga sebagai syarat dalam sakramen permandian anak dan di samping itu juga sebagai syarat dalam mengurus akte kelahiran di catatan sipil.

Akte perkawinan serta kelahiran dipergunakan sebagai syarat dalam melengkapi berkas untuk mendapatkan tunjangan keluarga bagi yang statusnya pegawai negeri.

Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat desa terhadap warga yang tidak tertib adalah berupa teguran/peringatan, dan semata-mata sanksi tersebut dititikberatkan kepada masing-masing warga, seandainya tidak mempunyai akte perkawinan atau surat nikah warga tersebut akan mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat karena tidak memenuhi norma-norma/etika dalam kehidupan masyarakat.

Aparat desa Komoro disamping menginginkan ketertiban administrasi perkawinan, kelahiran, juga menginginkan agar warganya tertib dalam administrasi lapor melapor dalam kaitan dengan musibah/keamatan, kedatangan tamu yang menginap.

Warga desa Komoro tingkat kedisiplinan dalam lapor melapor (halangan kematian) sudah tinggi, hal ini disebabkan karena sudah merupakan tradisi masyarakat apabila kena musibah (halangan duka) maka segera anggota keluarga melaporkan musibah tersebut baik kepada Ketua RT, Ketua RW maupun kepada Kepala Desa dan pada saat melapor ini biasanya tidak mengenal waktu siang maupun malam.

Kedisiplinan sikap warga yang tinggi ini di samping ditunjang oleh tradisi masyarakat juga tujuannya memberikan informasi kepada keluarga (famili) yang lain agar segera datang untuk membagi duka sehingga dengan tradisi ini warga desa Komoro apabila ada warga kena musibah duka maka keluarga (familia) maupun tetangga dengan segera datang dan memberikan bantuan untuk meringankan beban pada keluarga yang kena musibah duka.

Walaupun tingkat kedisiplinan warga desa Komoro sudah tinggi terhadap lapor melapor dalam musibah, aparat desa juga selalu memberikan pengarahan-pengarahan pada warganya tentang pentingnya laporan apabila kena musibah sebab ada hubungannya dengan mutasi data jumlah penduduk masyarakat desa Komoro. Dan apabila ada seorang

warga yang kena musibah kematian dan terlambat melapor maka keluarga yang kena musibah tersebut mendapat sanksi adat yang berupa kecaman-kecaman dari keluarga (familia) dan di samping itu juga mendapat sanksi dari kepala desa berupa teguran dan kepala desa menanyakan sebab-sebab keterlambatan melapor, dan pada kesempatan itu pula kepala desa menghimbau warga yang lainnya untuk segera melapor jika kena musibah kematian.

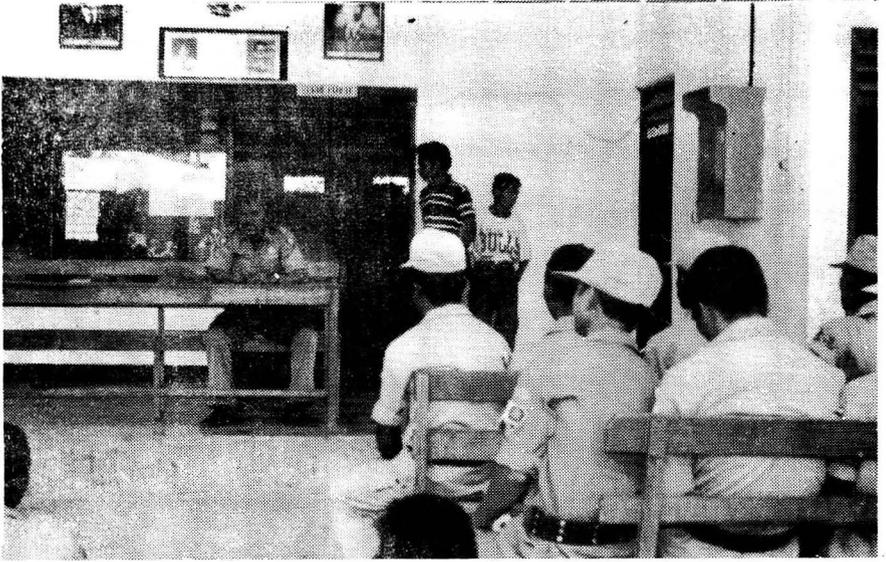
Selain itu untuk memelihara ketertiban desa Komoro maka setiap warga yang kedatangan tamu sampai bermalam diwajibkan melapor kepada Ketua RT setempat.

Disiplin terhadap Administrasi Pengurusan Surat-surat

Dalam pengurusan surat-surat baik itu pengurusan surat-surat baik itu pengurusan surat-surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun pengurusan surat-surat lainnya seperti; surat kelakuan baik, surat perjalanan, surat kenal lahir, surat perkawinan, surat ijin dan lain-lain. Ini semuanya diurus di kantor desa, maka Kepala desa selalu menghimbau kepada warganya agar dalam pengurusan surat-surat selalu mentaati peraturan/ketentuan yang ada sudah ada atau dengan kata lain dalam pengurusannya harus menggunakan jalur birokrasi dan jangan melanggar aturan tersebut. Yang dimaksud dengan jalur birokrasi adalah dalam mengurus surat-surat harus melalui Ketua RT Ketua RW lalu ke kantor desa. Seandainya ada salah seorang warga yang hendak mengurus surat-surat datang ke kantor desa tanpa membawa surat pengantar dari Ketua RW maka warga tersebut tidak dilayani dalam pengurusan surat-suratnya.

Tujuan aparat desa tidak melayani atau menolak dalam pengurusan surat yang tidak membawa surat pengantar adalah untuk mendidik atau membiasakan warga masyarakat berdisiplin dalam pengurusan surat-surat. Dasar penolakan tersebut karena aparat desa sudah menginformasikan kepada warganya tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan surat-surat, informasi ini disampaikan lewat pertemuan-pertemuan formal maupun informal, disamping itu juga di kantor desa sudah ada pemberitahuan tentang syarat-syarat tersebut.

Apa yang diharapkan kepala desa terhadap warganya, berdisiplin terhadap pengurusan surat-surat belum diwujudkan 100 % mencapai sasaran, ini terbukti dengan adanya kasus yang muncul seperti adanya



Upaya pembinaan dari Muspika terhadap Hansip



Upaya meningkatkan Disiplin Warga Masyarakat

Kartu Tanda Penduduk (KTP) liar, yang dimaksudkan liar disini adalah dalam pencarian kartu tanda penduduk tersebut tidak berdasarkan jalur birokrasi, melainkan warga masyarakat membeli kartu tanda penduduk pada salah seorang pegawai/petugas dari Kecamatan. Dengan adanya petugas yang bisnis KTP, maka dapat membawa dampak negatif terhadap administrasi pemerintahan desa serta dapat mencemarkan nama desa.

Munculnya kartu tanda penduduk liar ini disebabkan karena; ada aparat/petugas yang mencari keuntungan sebagai calo yang menjual balikan kartu tanda penduduk serta ditunjang adanya ketuhan warga masyarakat akan kartu tanda penduduk sangat mendesak. Karena hal inilah maka warga masyarakat mengambil jalan pintas dengan membeli kartu tanda penduduk walaupun dengan harga/biaya yang jauh lebih besar dibanding dengan biaya administrasi mengurus kartu tanda penduduk pada kantor desa.

Adanya kasus kartu tanda penduduk liar ini diketahui pada saat aparat desa Komoro mengadakan operasi kartu tanda penduduk dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan desa Komoro.

Di samping itu juga untuk mengadakan pembinaan disiplin pada warga masyarakat yang pada saat operasi tidak memiliki identitas diri berupa KTP, maka orang tersebut diberikan pembinaan tentang pentingnya memiliki kartu identitas diri berupa kartu tanda penduduk, setelah diberikan pembinaan maka warga tersebut diwajibkan mengurus KTP dimana ia bertempat tinggal.

Dalam upaya menanggulangi munculnya kartu tanda penduduk aspal (asli tapi palu) maka aparat desa Komoro selalu memberikan pengarahan-pengarahan pada warga masyarakat agar dalam mengurus kartu tanda penduduk harus melalui jalur yang sudah ditetapkan yaitu; membawa surat keterangan dari Ketua RW kemudian dibawa ke kantor desa. Dalam kesempatan ini pula kepala desa menyampaikan sanksi terhadap warga yang tidak disiplin, adalah di samping mendapat teguran/ peringatan dari kepala desa juga dalam pengurusan surat-surat keterangan di kantor desa tidak dilayani/ditolak. Penolakan atau tidak dilayani terhadap warga yang mengurus surat-surat di desa dengan identitas berupa kartu tanda penduduk aspal ini dilakukan karena warga tersebut dianggap bukan warga desa Komoro, ini berarti orang tersebut

tidak terdaftar sebagai anggota RT masyarakat desa Komoro. Dari kasus tersebut banyak dijumpai identitas dirinya dalam kartu tanda penduduk tercatat sebagai penduduk desa Komoro, pada hal orang tersebut tinggal pada desa lain dan kecamatan yang lain, bahkan lebih-lebih ada warga masyarakat di luar Kabupaten Dili. Juga diadakan perobekan kartu tanda penduduk tersebut untuk menanggulangi kartu tanda penduduk (KTP) liar. Akibat negatif dari adanya kartu tanda penduduk liar ini adalah :

- Mempengaruhi perbedaan jumlah data penduduk yang ada di desa dengan data yang ada di Kecamatan.
- Nama desa terbawa-bawa karena orang yang memiliki kartu tanda penduduk liar ini tercatat tinggal di desa Komoro pada kartu tanda penduduknya dan tertangkap pada kabupaten lain karena melakukan tindak kejahatan, sehingga mempengaruhi nama baik desa, padahal setelah dicek pada register penduduk desa Komoro atas nama orang tersebut tidak ada.

Dengan adanya kasus kartu tanda penduduk liar inilah, maka aparat desa Komoro menghimbau kepada warga masyarakat agar dalam pengurusan surat-surat, baik itu berupa kartu tanda penduduk maupun surat-surat lainnya agar mengrus sendiri dan datang langsung ke kantor desa, tanpa memakai perantara untuk menghindari timbulnya calo-calo liar.

Di samping itu pula aparat desa selalu mengingatkan pada warga masyarakatnya jika kedatangan tamu yang bermalam harus melapor diri, baik kepada Ketua RT maupun Ketua RW dan Kepala Desa. Kewajiban melapor adalah untuk mengetahui tujuannya datang ke desa Komoro dan berapa hari tamu tersebut menginap. Jika ada warga kedatangan tamu tanpa melapor maka warga tersebut diberikan sanksi berupa peringatan/teguran dari Ketua RT maupun Kepala Desa. Jadi dalam hal ini warga masyarakat Komoro tidak ada alasan untuk tidak melapor diri jika kedatangan tamu karena baik ditiap-tiap RT maupun di kantor desa sudah ditempel pengumuman yang berbunyi "TAMU WAJIB LAPOR 1 x 24 JAM".

D. DISIPLIN DALAM HUBUNGAN KETETANGGAAN

Warga masyarakat desa Komoro dalam hubungan antar warga baik dilingkungan kerabat (famila) maupun diluar anggota keluarga, dapat diperinci dalam 5 hubungan yaitu:

1. Hubungan-hubungan sosial di antara warga
2. Hubungan tolong menolong dalam kesulitan keuangan dan pertolongan lainnya.
3. Hubungan konflik
4. Gosip
5. Peranan tetangga dalam pendidikan anak

Hubungan-hubungan Sosial Di Antara Sesama Warga

Hubungan (kontak) di antara sesama warga masyarakat desa Komoro dapat dikatakan tidak begitu tinggi, antara lain disebabkan keragaman latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan agama serta kesibukan mencari nafkah.

Kesibukan mencari nafkah menyebabkan mobilitas penduduk tinggi, banyak yang datang dan yang pergi sehingga menyebabkan kurang saling mengenal. Sedikit sekali (5 %) responden mengaku mengenal hampir semua warga, sebaliknya cukup banyak (40 %) responden mengaku mengenal sebagian kecil warga masyarakat. Keadaan ditingkat RT agak lebih baik, sekitar 35% responden menyatakan mengenal seluruh keluarga 60 % responden menyatakan mengenal seluruh Kepala Keluarga, dan hanya 5 % responden yang menyatakan mengenal hanya sebagian saja warga RT setempat. Lebih tingginya tingkat saling mengenal dan keakraban dilingkungan warga RT karena wilayah yang relatif sempit dan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh warga RT merupakan rasa kebersamaan.

Hubungan Tolong Menolong Dalam Kesulitan Keuangan Dan Pertolongan Lainnya

Kepadatan penduduk yang majemuk dan kecilnya jarak antara rumah yang satu dengan lainnya rupa-rupanya tidak mempermudah tolong menolong dalam masalah kesulitan keuangan. Bila mengalami kekurangan uang untuk biaya hidup, warga desa Komoro cenderung (50 %) responden minta bantuan terlebih dahulu pada anggota kerabatnya, kemudian (30 %) responden meminta bantuan kepada atasan serta (15 %) responden meminta bantuan kepada teman terdekat dan hanya (5 %) responden minta bantuan pada tetangga.

Meminjan uang kepada tetangga tampaknya dianggap menjatuhkan martabat, bahkan kalau mungkin tetangga tidak perlu mengetahui masa-

lah kesulitan keuangannya.

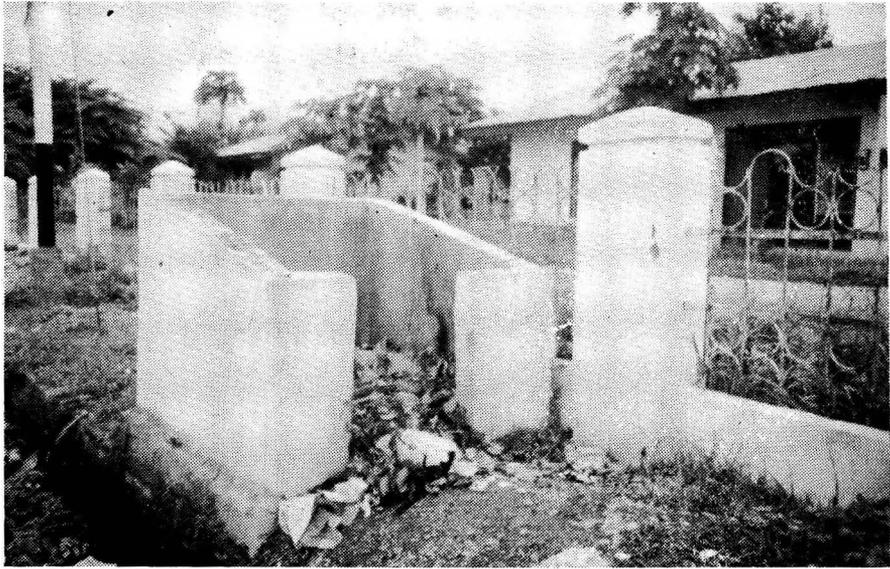
Tetapi kalau menghadapi kesulitan uang untuk kepentingan yang mendesak, seperti anggota keluarga sakit keras, maka tetangga dan atasan menjadi tujuan utama untuk dimintai bantuan (masing-masing 30 %), baru teman terdekat (25 %) dan kerabat (15 %). Untuk keperluan yang mendesak ini, bantuan harus diperoleh dalam waktu yang singkat-singkatnya, dapat diperoleh dari tetanggan, yang baik hati.

Bila kekurangan uang untuk memperoleh barang-barang yang benar-benar diperlukan, sekitar 40 % responden memilih dengan cara kredit. Cara kredit dianggap cukup baik dalam arti tidak perlu meminjan uang bantuan. Walaupun demikian ada 25 % responden yang membeli barang-barang yang diperlukan. Sementara itu, 35% responden merasa tidak perlu memiliki barang-barang walaupun sangat diperlukan jika tidak mempunyai uang, golongan ini berpendapat demikian karena tidak mempunyai penghasilan tetap untuk mencicil pinjaman barang-barang yang diperlukan.

Lain halnya dengan hubungan tolong menolong dalam kegiatan hajatan, sebagian besar (75 %) responden cenderung meminta bantuan kepada tetangga dan hanya sekitar 25 % responden yang lebih senang meminta bantuan kepada kerabat atau teman dekat. Kelihatannya tolong menolong dalam kegiatan hajatan ini ada pengelompokan di antara para warga. Penduduk yang berasal dari luar daerah lebih senang meminta bantuan kepada orang sesama daerahnya.

Demikian pula penduduk asli lebih cenderung meminta bantuan kepada sesama penduduk asli. Namun demikian, latar belakang agama, adat istiadat dan kondisi sosial ikut menentukan dengan siapa prioritas tolong menolong itu dilakukan.

Hubungan tolong menolong ini terlihat pula dalam hal keamanan, bila ada warga masyarakat kecurian, sebagian besar (85 %) responden menyatakan, iktu serta mengusir atau menangkap pencurian, khususnya dengan minta tolong dengan jalan berteriak. Sekitar 15 % responden menyatakan menolong dengan cara lain, seperti melapor kepada yang berwajib yang dilakukan melalui pesawat radio HT maupun melalui pesawat telepon.



Sarana Pembuangan Sampah di Desa Komoro



Sarana kamar mandi keluarga sangat sederhana

Hubungan Konflik

Selain hubungan yang bersifat tolong menolong, hubungan konflik ada pula terjadi di antara warga masyarakat. Konflik ini dapat terjadi antara orang tua dengan orang tua, remaja dengan remaja, antara anak dengan anak, atau antara orang tua dengan remaja atau remaja dengan anak-anak.

Sumber konflik antara warga, berdasarkan jawaban responden sebagian besar pada masalah anak (70 %), masalah batas tanah/pekarangan masing-masing 10 %, serta masalah ternak yang mengganggu tanaman pekarangan berkisar 10 %. Pertengkaran antara anak dapat berkembang menjadi konflik karena keikutsertaan orang tua, hal ini disebabkan pengetahuan dan tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah. Sementara itu batas tanah/pekarangan di daerah padat penduduknya tidak jarang berkembang menjadi konflik. Selanjutnya konflik karena iri hati biasanya bermula dari pergunjungan yang beredar dari satu kelain orang, akhirnya sampai pada orang yang bersangkutan. Demikian halnya konflik masalah ternak yang tidak dikandangkan seperti babi dan kambing sering memasuki pekarangan tetangga sehingga menyebabkan tanaman yang ada dipekarangan tersebut menjadi rusak dan habis dimakan sehingga dapat menimbulkan pertengkaran.

Konflik yang disebabkan masalah anak biasanya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa bantuan orang lain.

Jika dianggap terlalu berat baru diselesaikan lewat pihak ketiga, umumnya Ketua RT/Ketua RW, pemuka masyarakat serta Karang Taruna. Ikutnya pihak ketiga ini biasanya dalam hal anak yang bertengkar sudah selesai tetapi orang tuanya justru bersitegang, akhirnya karena merasa malu dan saling menjaga harga diri antara kedua pihak yang berselisih, masing-masing meminta jasa pihak ketiga.

Penyelesaian konflik secara kekeluargaan dengan bantuan pihak ketiga juga banyak dilakukan pada konflik yang disebabkan oleh iri hati dan konflik ternak. Selanjutnya, konflik yang disebabkan masalah tanah/pekarangan cenderung diselesaikan melalui pengadilan. Secara umum konflik yang terjadi antara warga masyarakat desa Komoro relatif kecil dalam arti tidak pernah meningkat pada pengerahan massa. Konflik yang disebabkan oleh masalah SARA (Suku, Agama dan ras) tidak pernah terjadi. Solidaritas memang ada bila terjadi konflik tetapi dalam frekwensi yang relatif kecil, terutama yang bertalian dengan hubungan kekerabatan.

G o s i p

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, warga masyarakat desa Komoro memiliki penduduk yang padat dengan rumah tempat tinggal yang relatif rapat. Lingkungan yang demikian membuat warga cenderung menggunakan waktu luang untuk mengobrol dengan tetangga khususnya warga perempuan. Tempat-tempat ngobrol warga perempuan antara lain di teras rumah atau di warung/di kios, sambil menyapi anak atau menjaga anak, mereka mengobrol berbagai hal misalnya tentang kehidupan sehari-hari. Sementara itu warga laki-laki sering mengobrol di pos penjagaan siskamling dan rumah-rumah.

Topik pembicaraan umumnya adalah pengalaman hidup masing-masing seperti; anak yang susah makan, tempat belanja yang murah, penggunaan bahan kebutuhan yang lebih baik, susah mencari uang dan kesulitan-kesulitan yang dialami, atau kesempatan-kesempatan kerja di suatu tempat.

Membicarakan tetangga lain jarang sekali dilakukan, hal ini mungkin disebabkan adanya rasa takut dan berkembang menjadi konflik. Walaupun demikian bila menyangkut hal yang mendasar, seperti masalah perkawinan, pelanggaran norma-norma adat, atau agama, dan pencurian, kejadian itu akan cepat sekali berkembang di masyarakat.

Peranan Tetangga Dalam Pendidikan Anak

Dalam hal pendidikan anak, khususnya pendidikan formal setiap orang tua pada masyarakat desa Komoro menginginkan anak-anaknya memiliki pendidikan yang cukup. Tetapi kemampuan ekonomi yang terbatas menyebabkan harapan-harapan itu sering tidak terwujud. Walaupun begitu ada usaha setiap orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya.

Sebagian besar (50 %) responden cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sekolah yang diinginkan sedangkan orang tua hanya memberikan pandangan. Kebebasan ini diberikan agar anak lebih merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan pilihannya. Sementara itu 45 % responden menyerahkan pilihan sekolah ini sepenuhnya kepada anak, sikap ini umumnya didorong ketidak tahuan orang tua pada hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, karena mereka sendiri tidak pernah sekolah. Dalam pada itu 5 % responden menyatakan bahwa pemilihan sekolah mutlak ditangan orang tua, responden ini

berpendapat bahwa walau bagaimanapun orang tua lebih mengetahui dari pada anak, karena itu anak harus menuruti orang tua, khususnya dalam hal pemilihan sekolah.

Dalam hal ini warga masyarakat pendatang sangat keras dalam mendidik anak. Sejak kecil sudah ditanamkan pengertian tentang perjuangan hidup, anak harus bekerja sedang waktu untuk bermain dibatasi pula. Selain pendidikan formal, setiap warga menghendaki anak-anak taat dan patuh pada ajaran agama. Orang tua umumnya menginginkan anak rajin misa ke gereja, rajin mengaji bagi umat Islam, dan atau sembayang menurut ajaran masing-masing. Anak yang berani menentang pendapat orang tua dianggap tidak sopan dan kurang ajar.

Peranan tetangga dalam pendidikan anak secara langsung boleh dikatakan tidak ada. Bila ada tetangga yang membantu belajar, biasanya secara kebetulan (insidental). Peranan tetangga dalam pendidikan anak lebih bersifat moral dan tidak langsung. Bila seseorang cukup menonjol di bidang ekonomi karena faktor pendidikan, keberhasilan itu dapat merangsang anak untuk dapat mencapai sukses seperti yang diraih oleh tetangga tersebut. Selain dari pada itu sikap, perilaku, dan kata-kata sering dicontoh atau ditiru oleh anak-anak. Dalam hal ini peranan tetangga tampaknya cukup menonjol dalam pendidikan anak.

Demikianlah hubungan sosial warga masyarakat desa Komoro umumnya cukup baik dan terbuka walaupun dalam beberapa hal, seperti kesulitan uang ada ketertutupan. Berbagai kegiatan seperti hajatan dan apalagi gotong royong melibatkan hampir semua warga tanpa diminta. Sementara itu saling mengunjungi, niat memperbaiki hubungan bila terjadi konflik, serta menolong bila ada yang kena musibah merupakan bentuk hubungan baik dan terbuka diantara warga masyarakat desa. Walaupun demikian sebagian kecil warga masyarakat cenderung mengutamakan kelompok etnisnya.

Dalam menentukan kehormatan seseorang, umumnya mengutamakan budi pekerti yang baik serta memandang jabatan atau kedudukan seseorang. Dengan kata lain seseorang tidak perlu mengedepankan jabatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat untuk mendapat penghormatan dari warga yang lain.

BAB IV

DISIPLIN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN TEMPAT TEMPAT UMUM DI KECAMATAN DILI BARAT

Kalau kita berbicara tentang lingkungan mau tidak mau kita akan membicarakan suatu obyek kehidupan masyarakat dimana mereka bertempat tinggal. Apakah kehidupan masyarakat itu bertempat tinggal di pedesaan atau di perkotaan yang menjadi tempat tinggal mereka dalam masyarakat. Bahwa kota telah menjadi sasaran urbanisasi yang tidak dapat dihindarkan lagi, dari adanya suatu urbanisasi yang dilakukan oleh orang-orang dari desa dan sekitarnya untuk pindah dan datang di kota dengan maksud untuk tinggal menetap.

Di samping untuk tinggal yang bersifat sementara mencari pengalaman terutama hal ini yang dilakukan oleh generasi muda dari luar kota, ini biasanya untuk tinggal sementara di rumah saudaranya atau kenalannya yang lebih dahulu datang dan menetap di kota dan telah menjadi warga masyarakat kota.

Selain itu kota telah menjadi salah satu tempat kegiatan perkotaan dalam pengolahan administrasi baik administrasi pemerintahan maupun swasta, dalam melaksanakan rencana pembangunan di segala bidang termasuk di dalamnya membangun masyarakat dan lingkungannya, maka dengan sendirinya kota menjadi informasi untuk layanan kepada masyarakat luas, di samping , menjadi tempat kegiatan perekonomian. Dengan demikian kota merupakan tempat pertemuan dari banyak orang dalam mencari informasi, dan berbagai kegiatan, sebagai dampak urbanisasi yang timbul telah membawa berbagai kendala yang berbeda-beda baik sosial, budaya dan ekonomi di lingkungan masyarakat kota. Mereka saling berkompetisi dalam bersaing untuk memperoleh informasi yang lebih cepat, baik itu bagi kepentingan bersama atau kelompok maupun bagi pribadi.

Dalam perkembangan selanjutnya sebagai hubungan demikian saling berlomba satu sama lain untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat daripada kepentingan yang lain. Demikian kompleksnya masyarakat kota ini yang harus menghadapi tantangan-tantangan bagi kepentingan di dalam hidupnya tidak jarang orang sebagai individu di dalam masyarakat yang demikian kompleks tersebut meninggalkan dan mengabaikan

kepentingan-kepentingan umum di lingkungan untuk saling dapat menjaga ketertiban.

Sebagaimana ketertiban di lingkungan pasar/pertokoan, terminal, tempat hiburan (bioskop), dan jalan raya, akan dibahas lebih lanjut. Dalam berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri saling berupaya untuk kerja sama dalam keterkaitan akan kepentingan bersama pula. Hal ini diperlukan hubungan integral yang baik dan serasi agar kerjasama tersebut dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditentukan sangat diharapkan bermanfaat dan mendukung terciptanya ketertiban umum dalam menjalankan berbagai kegiatan masyarakat di kota. Masyarakat kota yang demikian majemuk ini kendati telah melakukan norma-norma atau aturan yang harus ditaati pendukungnya, sangat perlu juga adanya kesadaran yang tinggi bagi setiap pribadi atau individu pada masyarakat tersebut, agar memiliki rasa kedisiplinan dalam hal segala bertindak dan bertingkah laku dalam menjalankan berbagai kegiatan itu.

Dili sebagai ibu kota Propinsi Timor Timur dalam perkembangannya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh urbanisasi dan arus globalisasi, walaupun tata pemerintahan yang paling bawah masih menggunakan sebutan Kepala Desa belum Kepala Kelurahan atau Lurah.

A. DISIPLIN DI LINGKUNGAN PASAR/PERKOTAAN

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi setiap masyarakat sangat diperlukan adanya suatu tempat atau lokasi sebagai sarana pertemuan hubungan antara sesamanya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia harus hidup bersama manusia lain di dalam suatu lingkungan alamnya dalam usaha manusia secara aktif sebagai makhluk sosial. Tempat atau lokasi sebagai sarana pertemuan hubungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dimaksud adalah pasar, yaitu sebagai tempat terjadinya transaksi orang banyak dalam kegiatan jual beli, baik barang maupun jasa dimana antara penjual atau penawar jasa dengan pembeli sebagai pemakai jasa saling bertemu, baik itu pedagang ataupun pembeli dalam melakukan aktifitas.

1. Penanganan Sampah

Masalah yang sangat penting dibicarakan pada era pembanguan

dewasa ini oleh pemerintah adalah pembangunan di segala bidang yang tidak meninggalkan masalah kebersihan lingkungan yang menjadi sebagian dari pada prioritasnya untuk dilaksanakan. Seperti banyak negara yang sedang membangun Indonesia pun menghadapi beberapa masalah mengenai lingkungan hidup manusia, baik masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh kemelaratan dan akibat kepadatan penduduk, maupun masalah pengrusakan dan pengotoran lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses pembangunan. (Soedjatmoko, "Dimensi Manusia Dalam Pembangunan", LP3ES, 1986, hal. 79).

Perhatian pemerintah diantaranya ditetapkan kepada masalah kebersihan pada lingkungan umum. Sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Dili dengan program "DILI BERTAIS" yang penjabarannya adalah Bersih, Tertib, Aman, Indah, Sehat dan Sopan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab I mengenai program fungsional, operasional maupun program khusus. Program yang demikian khas ini sangat perlu sekali akan dukungannya kepada masyarakat luas demi kepentingan bersama masyarakat dan pemerintah. Besarnya dukungan masyarakat itu agar tidak sembarangan membiarkan atau membuat lingkungan menjadi rusak dan kotor, sebagai akibat terjangkitnya berbagai penyakit dan masalah yang timbul. Melihat hal tersebut menurut Kepala Desa Komoro berpendapat bahwa pentingnya lingkungan yang bersih seperti yang diupayakan oleh desa Komoro sebagaimana ibarat rumah atau tempat tinggal agar layak dihuni maka harus dijaga setiap saat akan kebersihannya, demikian juga pentingnya di lingkungan pasar yang menjadi tempat kegiatan mencari nafkah bagi para pedagang untuk mendapatkan untung dalam proses berjual beli. Maka kepada semua pedagang dilibatkan berkewajiban untuk ikut menangani sampah dari akibat dagangannya dalam menjaga kebersihan dan keindahan sehingga membuat betah dan kerasan dalam kegiatan berjual beli, sekaligus dapat menarik simpati para pembeli untuk belanja di pasar.

Bahwa kepedulian masyarakat terhadap kebersihan telah membutuhkan tingkat kedisiplinan kepada aturan-aturan dan norma-norma tertentu menjadi tuntutan utama, termasuk disiplin di lingkungan pasar sebagai tempat bertemunya orang banyak dalam melakukan aktivitas jual-beli maupun hubungan sosial, dituntut keikutsertakannya



Kegiatan Olahraga Karang Taruna Desa Komoro



Kegiatan menambang pasir di sungai Komoro

dalam menangani sampah dari sisa barang-barang dagangan yang mereka bawah ke pasar. Karena akibatnya menimbulkan pencemaran lingkungan yang sangat sensitif bagi lingkungan kehidupan, untuk itu perlu diperhatikan secara serius baik oleh masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari dan pemerintah yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu untuk dijalankan. Kebijakan-kebijaksanaan baik berupa aturan-aturan seperti "**Jagalah Kebersihan**", "**Buanglah Sampah pada Tempatnya**" dan berupa anjuran yang disampaikan setiap kali oleh petugas maupun dari informasi pengetahuan lainnya.

Dalam keikutsertaan dan kewajiban penanganan sampah ini ada kaitan bersama antara petugas pasar, para pedagang itu sendiri maupun masyarakat pembeli untuk diminta pengertiannya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dari partisipasi dan pengertiannya itu diharapkan kepada para pedagang untuk mengambil dan mengurus sampah yang terbuang akibat dari dagangannya setiap hari pada tempat atau lokasi masing-masing mereka berjualan. Dan para pedagang yang memiliki kios agar menjaga kebersihannya di tempat berjualan masing-masing, demikian juga para pembeli yang terdiri dari lapisan masyarakat tidak ketinggalan untuk mendukung partisipasinya agar tidak membuang sampah semuanya saja. Maka dalam penanganan sampah di pasar dilibatkan kepada semua pihak untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih, sebagaimana yang telah diupayakan dalam Dili Bertais di atas. Termasuk lingkungan pasar yang sangat perlu diperhatikan karena pasar tidak lepas dari adanya sampah yang sangat sensitif membuat pemandangan mata menjadi tidak enak. Penanganan sampah di pasar sangat perlu dukungan dari berbagai pihak dalam menerima informasi maupun pengetahuan dalam ikut serta menjaga lingkungan tetap bersih dan indah.

2. Sarana Pembuangan Sampah

Laksananya kegiatan dalam arena ekonomi sehari-hari membuat akibat dari berbagai macam barang dagangan yang di pasarkan telah menimbulkan sampah dan menjadikan lingkungan pasar tidak sedap dipandang mata. Dari akibat sampah inilah telah menggugah kepada banyak orang dalam mengurus terutama oleh Pemerintah Daerah Tk.

II Dili tidak tinggal diam dalam mengurus sampah di lingkungan pasar, sebagaimana pasar Komoro ini yang telah menjadi sampel dalam penulisan ini. Maka Pemerintah Daerah Tk. II Dili telah mengangkat para pegawai untuk ditugaskan di pasar, dengan maksud agar menangani ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar, terutama dalam hal mengurus sampah yang menjadi perhatiannya. Maka pemerintah telah menyediakan berbagai sarana untuk pembuangan sampah, seperti sapu, skop biasa dan skop bergigi, goni, keranjang yang dipakai untuk mengambil sampah yang akan dibuang ke bak sampah, dan gerobak sampah, truk pengangkut sampah sebagai sarana untuk membuang sampah ke luar kota sesuai dengan lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun sarana pembuangan sampah untuk ditampung terlebih dahulu di bak penampungan pertama yang dibangun berupa tembok/dinding berbentuk persegi empat dengan ukuran besar yang terletak di pinggir belakang lokasi pasar, sebelum diangkut oleh truk yang berkeliling untuk membuang sampah. Maksud dibangunnya bak sampah yang terletak di pinggir dan belakang pasar ini agar bau tidak sedap yang ditimbulkan tidak mengganggu dalam kegiatan di pasar untuk berjual beli. Namun tidak semua sampah dari sisa barang-barang dagangan tersebut dibuang, akan tetapi juga sampah yang dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menjadi barang yang laku dipasarkan lagi, seperti botol kaca, plastik bekas ember setelah dibersihkan dan diproses menjadi barang yang menarik. Dan sisa dagangan sayuran yang sudah layu atau rusak karena tidak terjual lagi, semestinya sudah menjadi sampah dan dibuang, ternyata masih terdapat orang yang memanfaatkan untuk dibawa pulang untuk dijadikan makanan ternak di rumah. Kecuali sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan menjadi limbah, tidak sedap dipandang mata dan akan menimbulkan gas-gas beracun, sampah tersebut seperti bungkus dan puntung rokok, kantong plastik, bekas keranjang, kertas dan berbagai sisa bermacam-macam sayuran, buah-buahan dan lainnya harus segera dibuang di tempat yang disediakan, yang kemudian diangkut oleh truk pengangkut sampah yang dioperasikan setiap hari untuk membuang ke luar kota.

3. Disiplin Pemanfaatan Ruang/Tempat Penjualan

Terlaksananya kegiatan dalam arena ekonomi bagi masyarakat kota daerah sampel yaitu desa Komoro untuk mencukupi sehari-hari adalah terdapat di pasar (Mercado). Baik di pasar lama (Mercado lama) sebagai warisan pemerintah Portugis sebelum meninggalkan daerah Timor Timur pada tahun 1975, maupun yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Tk II Dili sebagai pasar yang baru berlokasi di Komoro, setelah berintegrasi ke Negara Kesatuan RI. Mercado lama dan Mercado baru tersebut menjadi tempat khusus untuk berjual beli dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selainkan kegiatan berjual beli ini dapat juga terjadi atau berlangsung pada sembarang tempat. Dengan demikian masyarakat kota lebih cenderung mendatangi pasar tersebut sebagai fasilitas mereka yang terdapat di ibu kota Kecamatan.

Secara garis besar salah satu wujud yang mewarnai adanya suatu pasar adalah banyaknya yang dipasarkan dalam sirkulasi jenis barang dagangan yang di hasilkan dari hasil pertanian atau produksi tanaman seperti, jagung, beras, kacang, kedelai, kelapa, sayur-sayuran, bawang merah, bawang putih, lombok, buah-buahan dan sebagainya, maupun jenis barang-barang yang dihasilkan dari industri rumah tangga (home industri) misalnya gula merah, minyak kelapa, tikar, ronjot (keranjang) dan barang-barang dari hasil proses pabrik yang dalam segi pemasarannya lebih mempunyai nilai baku. Berbagai jenis barang dagangan yang sedemikian rupa dimaksudkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, agar para konsumen tidak menjadi kecewa karena barang-barang yang dibutuhkan sulit didapat, selain dapat menjaga kehidupan dan stabilnya pasar Komoro dapat berjalan dengan baik, juga terhindar dari adanya kemungkinan pasar menjadi sepi atau kurangnya langganan. Akan tetapi pasar bukan saja sebagai tempat berjual beli, namun yang lebih penting adalah bagaimana kesibukan/kegiatan di pasar yang demikian perlu mendapatkan perhatian baik oleh masyarakat pendukungnya maupun oleh pemerintah, agar keberadaannya bisa tertib, aman dan bersih, karena berkat partisipasi, disiplin lingkungan menjadi beban tanggung jawab bersama terutama bagaimana dalam pemanfaatan ruang/tempat berjualan bisa teratur.

Dalam kegiatan di pasar agar bisa selaras dan nyaman berjualan

dari berbagai jenis barang dagangan seperti di atas sangat membutuhkan adanya ruang atau tempat apakah itu berupa kios, bangsal dan tempat di sela-sela bangsal dengan kios yang banyak dimanfaatkan oleh para pedagang. Dari keterangan petugas pasar Jose Pires, menjelaskan kios telah dipila-pilikan sedemikian rupa agar kios yang satu dengan yang lainnya tidak saling terganggu karena dari jenis dagangan yang dipasarkan. Seperti sekelompok deretan kios untuk dagangan cadangan atau pakaian terpisah dengan kios untuk dagangan sandang atau pakaian terpisah dengan kios untuk dagangan beras, demikian juga bagi kios rempah-rempah maupun dagangan barang-barang rumah tangga. Demikian pula bangsal atau los sebagai tempat untuk berdagang sayur-sayuran, buah-buahan, dan berbagai macam dagangan oleh pertanian rakyat diberikan tempat tersendiri. Baik bagi pemilik kios dan para pedagang yang terdapat di los-los tersebut dalam memanfaatkan ruang atau tempat mereka untuk berjualan, pada umumnya dapat mengikuti aturan-aturan dan norma-norma/keputusan yang berlaku dalam pasar, misalnya menempatkan dagangan masing-masing tidak boleh keluar dari batas tempat mereka.

Hal untuk saling menjaga agar tidak terdapat perselisihan, sehingga dapat terjalin hubungan baik antara sesama pedagang. Sedangkan dalam memanfaatkan waktu untuk berjualan mereka berusaha aktif datang berjualan setiap hari, apabila pada suatu hari terdapat penjual yang tidak datang biasanya diganti oleh salah seorang kerabatnya.

Sedangkan bagi para pedagang yang berjualan di antara kios dengan los-los apabila masih terdapat tempat yang dipandang luas, maka banyak dimanfaatkan dengan membuat batas-batas tersendiri sejijin petugas pasar. Biasanya ditata berbentuk garis segi empat dengan ukuran kira-kira 1,5 m x 1,5 m sebagai tanda agar tempat ini tidak dipakai oleh orang lain. Diantara mereka terdapat pedagang musiman, yang berjualan hasil pertanian pada waktu-waktu tertentu saja. Para pedagang musiman ini akan berjualan di pasar bila ada hasil pertaniannya yang siap dipasarkan, maka mereka ini dipandang lebih santai. Berbeda dengan para pedagang yang memiliki kios atau yang terdapat di los-los penjualan, mereka sangat aktif berjualan setiap hari untuk menjaga para langganannya agar tidak kecewa bila suatu saat tidak berjualan.

Dalam melakukan aktifitas sehari-hari para pedagang dalam me-

manfaatkan ruang tempat berjualan tersebut diatas, telah dibiasakan agar mematuhi dan memenuhi kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban tersebut sebagai usaha penanaman rasa disiplin dan menjalin hubungan untuk mengatur ketertiban bersama. Terutama masalah sampah yang perlu penanganan dengan serius, maka para pedagang diwajibkan untuk mengurus sampahnya masing-masing dari sisa barang-barang dagangannya setiap hari, agar tempat mereka untuk berjualan tetap bersih dan dapat betah di pasar. Ketentuan tersebut merupakan penanaman sikap disiplin, yang kemudian akan ditiru oleh pedagang lainnya dalam memelihara kebersihan dan ketertiban yang secara tidak langsung merupakan penerapan berkewajiban bertindak disiplin dalam upaya membudaya Dili sebagai kota bertais.

4. Hubungan antar Sesama Pedagang Petugas Pasar.

Pasar Komoro sebagai bentuk dari suatu pasar perkotaan yang terdapat di wilayah kecamatan Dili Barat, yaitu pasar yang menurut peraturan berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Tingkat II Dili.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab langsung berupa penerapan-penerapan suatu kebijaksanaan, aturan-aturan wajib yang harus dipenuhi, bantuan rehabilitasi, pemasukan pendapatan pajak dan sebagainya. Untuk itu pemerintah telah mengangkat pegawai atau petugas pasar yang diberi tugas untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, penarikan retribusi dan bentuk penarikan pajak dan persewaan lainnya. Disamping itu petugas pasar mempunyai peranan penting untuk mengatur para pedagang supaya letak atau tempat mereka bisa teratur dan tertib, untuk hal ini maka terdapat jalinan hubungan antar sesama pedagang dengan petugas pasar dalam upaya menjaga lingkungan pasar menjadi tertib dan bersih.

Bahwa pasar bukan saja merupakan wadah atau tempat kegiatan berjual beli, akan tetapi pasar juga merupakan tempat komunikasi bertemunya antar sesama pedagang dengan petugas dalam melakukan hubungan. Bagaimana hubungan komunikasi dilakukan oleh sesama pedagang dengan petugas pasar, bahwa para pedagang datang di pasar tidak saja berkepentingan menjajakan barang dagangannya, akan tetapi kehadiran mereka telah memungkinkan adanya suatu hubungan yang saling terkait. Apakah itu dalam hubungan kerja, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Keserasian hubungan mereka tampak terjalin dengan baik dan dapat terjaga antara satu dengan yang lain, hubungan ini tercermin dalam praktek pelaksanaan sehari-hari di pasar. Bila ditinjau lebih lanjut hubungan tersebut dapat dilihat di antaranya :

- a. Bagaimana hubungan antara pedagang dengan petugas pasar terutama dalam hubungan kerja, ekonomi dan sosial, yaitu bahwa petugas sebagai pelaksana dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dalam penerapan peraturan di suatu pihak, dan pedagang dipihak lain dituntut mematuhi-nya. Petugas pasar yang berkewajiban menjaga keteraturan, ketertiban para pedagang dalam kegiatan jual beli dan kemungkinan terjadi pengaduan masalah akibat adanya persengketaan antara pedagang. Petugas pasar secara langsung juga sebagai pelaksanaan, dalam pemungutan retribusi kepada semua pedagang. Retribusi yang dikenakan bagi para pedagang sebesar Rp. 100,- kecuali pedagang pemilik kios yang lebih banyak yaitu Rp. 150,- dalam pungutan setiap hari, selain kemungkinan adanya persewaan ataupun jenis pajak yang lain. Dari pengamatan yang dilakukan terlihat bahwa para pedagang telah memahami dalam memberikan sebagian uangnya, dari hasil penjualan untuk kewajiban membayar retribusi kepada petugas, dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan mereka bersama sebelumnya, yaitu antara pukul 08.00-12.00 dengan maksud setelah dagangan mereka laku terjual dan mendapatkan untung. Pada ketentuan ini sering terjadi yang dilakukan pedagang untuk lebih membayar retribusi pada hari itu, dengan alasan akan diserahkan pada hari esok yang dibayar sekaligus dua hari. Demikian pula setiap pedagang dituntut partisipasinya, dalam menangani sampah dari akibat dagangan masing-masing yang tercecer. Dalam hubungan ekonomi sekalipun, petugas pasar dapat bertemu langsung setiap hari, tetapi bila membutuhkan sesuatu barang petugas juga harus membayar sesuai dengan harga umum, walaupun karena sudah kenal dapat mengambil barang dahulu dan dibayar kemudian. Lain hal dalam hubungan sosial dengan kewajiban mereka lakukan sebagai penyettor di satu pihak dan pemungut pajak dilain pihak, telah terjalin hubungan

kerjasama yang baik dengan kesadaran mereka dapat berjalan dengan lancar. Persaingan diantara mereka tidak pernah terjadi dan telah menunjukkan adanya tegur sapa dengan baik yang mereka lakukan, maupun dengan bentuk humor atau bercanda dan berkelakar yang sering terjadi walaupun dengan maksud memberikan masehat atau petunjuk bila terdapat kekeliruan yang diperbuat mereka. Hubungan petugas pasar dengan pedagang pada hakekatnya cukup akrab.

- b. Hubungan pedagang dengan pedagang dalam kegiatan di pasar, yaitu hubungan kerjasama, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Bahwa hubungan antar pedagang telah terdapat banyak adanya bentuk hubungan kerjasama di dalamnya, yaitu hubungan dalam kegiatan tibal balik satu dengan lainnya yang merupakan kerja sama bila ada yang memerlukan bantuan. Misalnya terdapat pedagang yang harus pergi untuk keperluan mendesak atau mungkin sedang mengantuk sekali, maka pedagang disebelahnya diminta pertolongan untuk membantu dan melayani jika ada pembeli berbelanja.

Unsur kerja sama tersebut merupakan norma-norma yang telah disepakati bersama yaitu boleh mencari untung jika transaksi dengan pembeli memungkinkan mendapat keuntungan. Misalnya pedagang A sedang pergi dan diserahkan kepada pedagang di sampingnya untuk menjaga yaitu pedagang B. Bila terdapat pembeli berbelanja kentang dengan harga Rp 400,- per 1 kg, maka pedagang B bertransaksi ini maka pedagang yang membantu mendapat keuntungan dari penjualan milik pedagang orang lain, dengan tidak mengurangi nilai atau harga pokok dan tidak membuat rugi, demikian juga terdapat jenis barang yang dipasarkan lainnya. Hubungan baik mereka juga dilakukan untuk saling mencari atau memanggil yang bersangkutan jika tidak berada di tempat, agar segera datang melayani pembeli.

Sedangkan dalam bentuk pemasaran mereka saling memberi informasi bila dagangan sedang naik harganya, demikian pula bila sedang turun tidak tinggal diam tetapi memberitahu yang lain.

Demikian pentingnya dalam menjaga pemasaran dan tetapanya harga, maka oleh pedagang rata-rata berusaha mempertahankan harga barang dagangannya untuk menjaga ekonomi pasar. Apabila diketahui salah seorang pedagang memberikan harga yang tidak sama dengan lainnya, pedagang tersebut akan mendapat celaan yang kurang baik, bahwa pedagang tersebut dianggap tidak setiakawan. Lain halnya di dalam hubungan sosial, rata-rata mereka saling memperhatikan teman-temannya bila terdapat salah satu tidak berjualan, disebabkan karena apa, apakah dia sedang sakit atau ada keperluan.

Apabila ternyata ada yang punya kerja tentu memberitahukan yang lain bahwa esok hari tidak berjualan, karena ada kepentingan lain atau kerja di rumah. Melihat hal ini maka teman-teman yang lain juga tidak tinggal diam, mereka akan memperhatikan dengan cara memberi bantuan sekedarnya agar bisa sedikit meringankan bebannya. Norma-norma yang mereka lakukan ini akan berjalan baik dan bergantian bila terdapat teman pedagang mengalami hal yang sama. Dalam memperhatikan teman tersebut ada yang menyempatkan dirinya datang ke rumahnya, bila tidak dapat datang ada juga juga setelah ketemu di pasar.

5. Hubungan Antara Pedagang Dengan Pembeli

Lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana antara pedagang dengan pembeli dalam mengadakan kontak kegiatan di pasar. Pelanggan atau pembeli yang terdiri dari masyarakat luas, sebagaimana masyarakat di desa Komoro sebagai sampel dalam penulisan ini. Maka hubungan di pasar dapat diketahui bagaimana situasi terjadinya interaksi. Sebagaimana disebutkan bahwa interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita, yang didengar atau melalui surat kabar. (Prof. Drs. R. Bintarto "Interaksi Desa Kota"), (P3ES, Jkt, thn. 1986. hal. 62).

Perwujudan hubungan timbal balik dalam pergaulan dengan norma-norma yang mereka lakukan akan terjadi pada waktu sedang mena-

warkan barang dagangan, penjual berusaha menarik para pembeli dengan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku seperti bertindak sopan dalam menarik dan melayani pembeli, pembeli harus dihormati. Misalnya apabila terdapat pembeli lewat depan dagangan, maka pedagang akan membantu melontarkan sapaan seraya mengur "mari ibu silahkan singgah" ini sayuran, buah-buahan bagus dan segar-segar dan lain sebagainya dalam menawarkan dagangan.

Sekalipun pedagang telah berusaha menarik pembeli dengan nada yang lembut dan baik gerak geriknya, apabila ternyata pembeli tidak singgah berbelanja, maka penjual juga tidak menunjukkan sikap kecewa. Dan bila pembeli kebetulan singgah maka pedagang selalu berlaku sopan dalam melayaninya, apabila sipembeli tersebut tidak jadi berbelanja karena di pandang tidak cocok dengan dagangan yang ada, maka walaupun demikian penjualan pun tidak memperhatikan perasaan kesal. Kejadian seperti ini sudah menjadi suatu hal yang biasa terhadap pedagang dan merupakan resiko yang harus dihadapi sendiri dengan kesabaran yang tinggi dalam melayani berbagai pembeli dengan cara mereka sendiri. Karena pembeli yang satu tentu berbeda dengan cara berbelanja pembeli yang lain berbeda lagi dalam melayani kepada langganannya yang sudah setiap hari berbelanja dan lebih faham tentang situasi harga barang-barang pasar yang dibutuhkan. Disamping pelayanan bisa cepat juga harga dapat diberikan lebih miring daripada pembeli lain yang bukan langganannya karena jarang berbelanja kepadanya dan kurang dikenal.

Hubungan kegiatan dipasar seperti diatas, tidak saja terbatas pada kepentingan berjual beli, mereka telah menjalin hubungan yang didalamnya terdapat norma-norma yang tumbuh dari kesadaran mereka untuk dijalankan maupun adanya tata tertib dari kebijaksanaan petugas pasar. Norma-norma maupun tata tertib yang berlaku tersebut dapat mereka lakukan dengan baik dan disiplin dalam menjaga hubungan di lingkungan pasar. Dalam norma-norma yang mereka lakukan misalnya :

- Pedagang selalu memberika pelayanan yang sopan dan baik dalam menghormati pelanggan atau pembelinya, pembeli juga tidak semau-nya sendiri sangat sampai mengecewakan bila cocok dengan barang dagangannya.
- Demikian juga dalam memberikan harga dagangan bila harga telah



Suasana dalam hubungan jual beli di pasar Komoro



Suasana kegiatan di Pasar Komoro

naik, sebaliknya bila harga turun mereka mengatakan sedang turun dan akan memberikan harga umum sama dengan yang lain.

- Bila terdapat pelanggan yang berpesan kebutuhan barangnya untuk disediakan esok hari pedagang berusaha untuk memenuhinya dan bila terpaksa pedagang tidak dapat memenuhi, pembelipun tidak menunjukkan rasa kecewa.

Ketentuan yang harus dijalankan oleh para pedagang maupun pembeli selain menjalin hubungan berupa norma-norma diatas juga telah dijalankan ketentuan yang berlaku apa sejak diterapkan di pasar yang terdiri dari masyarakat luas agar dapat turut serta menjaga lingkungan pasar menjadi bersih tertib dan aman. Ketertiban tersebut terutama penanganan sampah, membayar retribusi, tempat jualan dan sebagainya.

- Dalam penanganan sampah dianjurkan kepada semua pedagang agar mengurus sampahnya sendiri-sendiri yang diakibatkan dari sisa dagangan yang mereka bawa, yaitu sebatas tempat mereka berjualan.

- Dalam meletakkan dagangan tidak boleh melampaui tempat penjualan pedagang lain.

- Demikian pula dalam membayar retribusi setiap hari yang menjadi kewajiban pedagang untuk memenuhinya.

6. Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib

Pasar sebagai tempat transaksi kebutuhan sehari-hari, merupakan tempat pelayanan untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Banyaknya pedagang di pasar bagi keperluan masyarakat, maka banyak pula masalah yang timbul sebagai akibat aktivitas mereka, sehingga diperlukan kebijaksanaan untuk mengatur ketertiban yang harus ditaati oleh para pedagang. Karena tidak jarang terjadi adanya suatu pelanggaran tata tertib, apakah terjadinya pelanggaran tata tertib itu mengenai masalah sampah, membayar retribusi, masalah tempat mereka berjualan dan sebagainya.

Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang maupun pembeli dengan tidak mengindahkan tata tertib seperti di atas, maka terdapat sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib yaitu berupa teguran atau peringatan dengan cara dipanggil langsung kepada pelanggarnya, jika terdapat pedagang yang sering membiarkan sampahnya di tempat berjualan sebelum pulang ke rumah, atau kedatangan sering

tidak membayar retribusi dengan bermacam-macam alasan atau mungkin terdapat pedagang yang memperluas tempat berjualan dengan sengaja mendesak tempat dagangan orang lain atau di sebelahnya. Maka jika terdapat pedagang melanggar tata tertib seperti itu umpamanya dia akan mendapat teguran atau peringatan dari petugas agar tidak mengulang kembali perbuatannya. Biasanya bila kedapatan sekali saja mendapat teguran dia akan dicela oleh pedagang yang lain dan akan dicap bahwa orang tersebut tidak baik. Karena dari perbuatannya yang tidak terpuji tidak dihormati oleh masyarakat secara adat sesuai norma-norma yang berlaku. Bahwa terdapatnya pelanggaran itu merupakan hal yang tabu dan memalukan bagi citra pedagang yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Meskipun selama ini ternyata belum pernah ada diantara pedagang yang mendapat sanksi-sanksi tersebut, karena umumnya para pedagang bisa menjaga diri dalam ikut serta memperhatikan lingkungan menjadi baik. Dengan berpedoman bahwa berdagang di pasar tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk esok hari dan untuk seterusnya selama hayat dikandung badan.

B. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TERMINAL

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berbudaya sangat diperlukan adanya sikap disiplin pada setiap warga masyarakat. Disiplin dalam bekerja dan berdisiplin dalam mentaati peraturan dimana saja berada.

Apakah di terminal atau di lingkungan tempat umum yang lain. Seperti terminal bus yang menjadi salah satu sarana atau tempat berpangkalnya kendaraan umum atau kendaraan penumpang, baik itu berupa bus antar kota, angkutan kota maupun taksi yang telah tersedia untuk naik dan turunnya penumpang memakai jasa angkutan sehingga orang dengan mudah untuk mencari dan mendapatkan kendaraan umum kemana mereka akan bepergian. Selain itu terminal juga menjadi sarana parkir dan peristerahatan untuk sementara waktu guna mendinginkan mesin kendaraan yang telah sekian lama melaju dari satu kota ke kota lain, atau dari satu terminal lain sambil menunggu dan mencari penumpang sebagai muatan. Disamping terminal merupakan tempat bertemunya banyak orang dalam melakukan perjalanan sebagai pemakai jasa juga merupakan tempat orang menjajakan makanan dan mi-

numan bagi yang kehausan. Terdapatnya kegiatan semacam ini diperlukan adanya norma-norma atau peraturan yang mendukung secara positif untuk memelihara ketertiban. Di antara peraturan yang ada tidak meninggalkan peran sertanya para pengemudi untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipatuhi. Terutama adanya peraturan yang telah diterapkan bagi ketertiban di lingkungan terminal, maupun peraturan terkait lainnya untuk dipenuhi. Sebagaimana akan dibahas, berikut ini adalah bagaimana para pengemudi, para penumpang dalam mematuhi peraturan demi ketertiban di lingkungan ini dan bagaimana sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tata tertib.

1. Penumpang dalam Mematuhi Tata Tertib

Para pemakai jasa di terminal yang terdiri dari orang-orang yang datang dari berbagai penjuru kota sangat memerlukan perhatian untuk mendapatkan pelayanan dalam menggunakan jasa dituntut partisipasinya dalam melaksanakan peraturan yang berlaku agar mereka dapat bertindak tertib dalam mengindahkan peraturan. Terminal bus Komoro sebagai sampel dalam penulisan, telah banyak membuat peraturan tata tertib bagi semua pemakai jasa, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat mendukung lingkungan terminal menjadi tertib, aman dan bersih dari akibat perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Pada hakekatnya calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan dapat mengindahkan tata tertib. Karena para pemakai jasa angkutan sebagai penumpang harus mengertai peraturan-peraturan di terminal agar ikut serta menjaga wilayah terminal supaya tetap bersih dan tertib.

Tetapi hasil pengamatan lapangan yang diperoleh di terminal bahwa angkutan ini masih banyak terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya dilaksanakan terutama menyangkut masalah sampah, maupun disiplin para penumpang.

Kepala terminal bus Komoro Bapak Imanuel Maukuru, banyak mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan guna memelihara kebersihan lingkungan, banyak terpampang dalam bentuk tulisan "**Jagalah kebersihan**", buanglah sampah pada tempatnya "Jangan menyeberang pada jalur bus", serta disediakannya tempat duduk bagi para calon penumpang untuk antri menunggu bus di terminal. Hal-hal yang tidak terpenuhi adalah masih terdapatnya sampah yang terbuang di lantai terminal sam-

pah tersebut sangat bervariasi dari berbagai jenis seperti; bekas bungkus makanan, minuman, bungkus rokok, puntung rokok, kantong plastik, kulit buah-buahan dan lain sebagainya, dalam bentuk sampah kering berserakan di terminal dan tidak sadap dipandang mata.

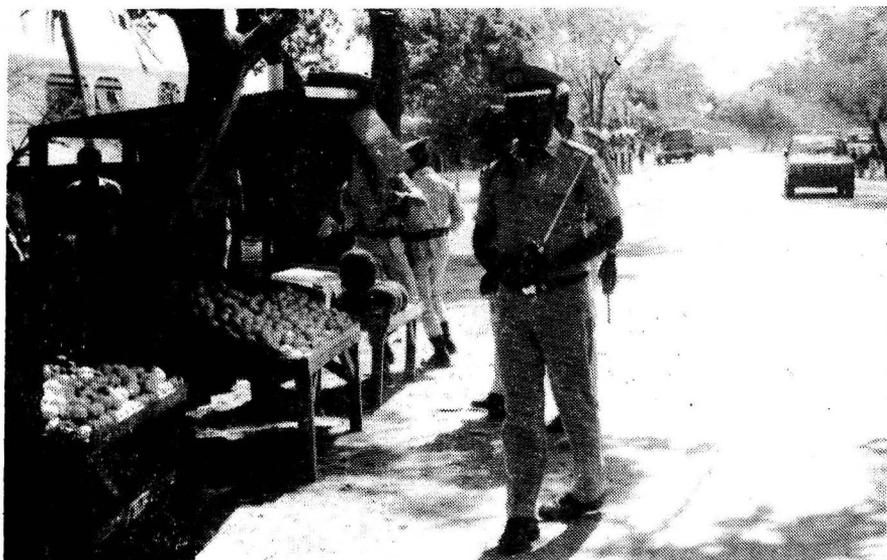
Keadaan seperti ini sering juga terjadi pada terminal lain sebagaimana di terminal Komoro yang masih perlu mendapat perhatian sesuai dengan fungsinya. Kedatangan banyak orang dengan maksud singgah sesaat sering tidak tahu atau lupa apa yang sebenarnya dilakukan, diantaranya membuang sampah seenaknya pada sembarang tempat.

Tindakan semacam ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak menyenangkan, dari sifat kelalaian ini mereka telah beranggapan bahwa di terminal sudah ada petugas kebersihan sendiri. Sikap yang tidak menyenangkan ini tidak dapat menjaga lingkungan, menurut pendapat bapak Imanuel Maukuru (pimpinan terminal) bahwa mereka lakukan karena kurang menghargai adanya peraturan, atau kurang sampainya informasi yang mereka terima, di samping mereka sebenarnya malas melakukan perbuatan yang ringan dan gampang untuk dikerjakan, dengan membuang sampah pada kotak sampah yang telah tersedia di terminal secara primer. Tersedianya kotak sampah tersebut sebenarnya telah memberikan motivasi dan mengingatkan mengajak kepada semua orang untuk berbuat yang positif.

Di samping hal di atas, juga masih seringnya terdapat tindakan yang dilakukan para pemakai jasa (penumpang) menyeberang atau memotong jalan pintas pada jalur kendaraan bus di terminal, tindakan mereka yang tidak terpikirkan sebelumnya bagaimana akibat yang akan terjadi dari kelengahan ini, tampak bahwa mereka semata mengejar waktu ingin cepat mendapatkan bus yang dicari, sehingga enggan melewati halte yang diperuntukkan khusus bagi para pemakai jasa tersebut, atau tidak mau meninggalkan kendaraan yang akan ditumpangi.

Menunggu dan antri kendaraan di terminal bus Comoro tidak berbeda seperti di terminal bus lain yang sudah ramai penggunaan fasilitasnya, para penumpang dengan sabar menunggu kendaraan yang telah lama belum juga datang. Mereka dengan menahan perasaan bersabar bahwa kendaraan umum bukanlah dipergunakan satu atau dua orang, melainkan bagi keperluan orang banyak yang memerlukan jasa angkutan untuk itu saling dapat memahami.

Dalam perjalanan naik bus terdapat penumpang yang sopan dengan



Penertiban jual beli di sembarang tempat oleh Polisi Pamong Praja



Suasana di perkotaan kota Dili

mempersilahkan masuk memberi tempat duduk bagi ibu-ibu atau orang tua yang lebih diutamakan dari pada anak muda dan anak sekolah yang lebih rela berdiri memberi keleluasan kepada mereka. Sebaliknya ungkapan rasa terima kasih atas perhatian mereka terlintas pula dalam ucapan obrigado (terima kasih) dalam bersopan santun terasa membuat kedamaian dalam perjalanan.

Rasa kebersamaan, tenggang rasa satu dengan lainnya saling membutuhkan ketenangan dan keselamatan di terminal bus tersebut sebagai cermin partisipasi mereka dalam memelihara ketertiban di lingkungan umum.

Bahwa peraturan serta tata tertib yang berlaku telah dijadikan suatu ketentuan untuk ditaati sepenuhnya, sebagaimana masyarakat di terminal Komoro telah berpartisipasi sebagai penumpang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, dan bermaksud memelihara ketertiban di lingkungan terminal.

Apabila terdapat calon penumpang yang tak sopan melanggar tata tertib atau mendapat teguran dan peringatan dari petugas. Upaya tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang dikatakan oleh Imanuel Maukuru bahwa tata tertib yang diberlakukan sangat mendukung kelancaran suatu kegiatan atau pekerjaan, dan akan menumbuhkan perlakuan adil serta semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping upaya memperluas informasi kepada setiap orang untuk memahami peraturan dan perkembangan yang ada. Maka keberadaan lingkungan terminal akan menjadi tertib, amam dan bersih tergantung kepada partisipasi masyarakat sebagai pendukung menjaga lingkungan terminal tersebut.

2. Pengemudi Dalam Mematuhi Tata Tertib

Berikut ini akan disinggung bagaimana para pengemudi angkutan umum dalam melakukan tindakan-tindakan di terminal atau di dalam perjalanan, yang menjadi bagian daripada tempat mereka bekerja dan berkewajiban patuh kepada norma-norma dalam melayani penumpang-penumpangnya, dan tata tertib/peraturan di terminal. Dari pengamatan yang dilakukan di terminal Komoro, Dili. Bahwa para pengemudi dalam melakukan pengangkutan tidak terdapat yang mengadakan paksaan dalam melayani penumpang-penumpangnya, justru mereka telah berusaha untuk menarik simpati kepada calon penumpang dengan dibantu

oleh awak bus dalam menawarkan jasa angkutannya, sekaligus menunjukkan arah rute yang ditempuh. Penawaran jasa perjalanan itu misalnya; Komoro-Komoro atau Bekoca-Bekora dengan gerak-gerik yang baik dan menunjuk arah bus mereka berparkir, dan mempersilahkan mari pak, ibu silahkan naik, bus masih kosong tempat duduknya dan lain sebagainya dalam tata cara menarik simpati penumpang. Mereka menawarkan dengan bernada sungguh-sungguh dan diharapkan kenderaannya akan segera penuh dengan penumpang. Mereka tampak gembira bila terdapat banyak penumpang di dalam kenderaannya, sebaliknya bila terdapat orang yang menolak untuk tidak naik, pengemudi tidak menunjukkan rasa kesal, karena hal semacam itu sudah biasa mereka hadapi setiap hari sebagai penawar jasa perjalanan.

Penumpang sebagai pemakai jasa angkutan bus harus dihormati dan dijaga keselamatannya selama mereka dalam perjalanan naik kendaraan bus. Sejak mereka naik sampai turun kembali dari kendaraan. Bila ada barang bawaan penumpang perlu dibantu karena barang bawaan itu dipandang berat, maka kondektur atau konjak membantu membawa naik atau menurunkan. Pelayanan kepada para penumpang ini adalah sebagai usaha memperlancar jalannya angkutan dan menjaga hubungan baik dengan para penumpang. Demikian juga dalam menolong dan membantu menunjukkan tempat duduk yang masih kosong untuk mereka tempati.

Dalam menjaga keselamatan para penumpangnya, pengemudi tidak bisa semuanya sendiri mengemudikan kendaraan menyimpang dari tertib lalu lintas. Diantaranya pengemudi selalu memberikan kesempatan para penumpangnya untuk turun dari kendaraan bila betul-betul kendaraan sudah berhenti dan tidak lagi bergerak di tempat parkir yang benar. Demikian juga di dalam memberikan kesempatan penumpang untuk naik, pengemudi harus memperhatikan bagaimana situasinya apakah sudah pada tempat duduk dan posisi yang aman. Karena pengemudi menyadari bahwa mengemudikan kendaraan terdapat risiko yang tinggi, maka konsentrasi, kesabaran dan kesadaran mengendalikan mesin bagi pengemudi sangat dituntut suatu ketrampilan yang dimiliki, bila hal-hal tersebut tidak dikerjakan dengan disiplin yang tinggi dapat mengakibatkan kecelakaan.

Bahwa sikap yang dilakukan oleh para pengemudi diatas, adalah merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mema-

matuhi dan menghormati peraturan atau tata tertib di terminal, sebagaimana yang diberlakukan dan terpampang di dalam terminal misalnya :

- Jagalah Kebersihan
- Jagalah Keselamatan Penumpang
- Dilarang saling mendahului
- Dilarang ngebut di dalam terminal
- Kendaraan harap parkir pada tempatnya
- Patuhilah Rambu-rambu lalu lintas

Karena itu peraturan tata tertib tersebut tidak dapat dipandang sebagai hiasan semata, yang kurang mendapat perhatian. Akan tetapi dipandang sebagai pedoman yang harus dipatuhi di terminal, yang didukung oleh rasa kebersamaan dalam berdisiplin antara pengemudi maupun penumpang sebagai subyek dalam menjaga lingkungan, supaya tertib, aman dan bersih.

3. Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib

Dengan adanya tata tertib di terminal merupakan keterikatan bersama untuk dipatuhi para pengemudi atau penumpang sebagai pemakai jasa. Maka dalam keterikatan rasa kebersamaan dalam mematuhi tata tertib di terminal tersebut, menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati oleh para pemakai jasa tersebut, terutama pengemudi harus dapat menunjang keteladanan dalam melaksanakan peraturan di terminal, yang akan diikuti oleh para penumpang yang terdiri dari masyarakat luas. Keterikatan rasa kebersamaan untuk berdisiplin di terminal dalam mentaati tata tertib di satu pihak, dan di lain pihak dengan terdapatnya suatu pelanggaran tata tertib, dalam upaya menciptakan keseimbangan terhadap rasa adil kepada pemakai jasa di terminal akan dikenakan sanksi-sanksi.

Bila pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengemudi dia akan dikenakan sanksi menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, diberi suatu peringatan tetapi masih melanggar tata tertib di terminal. Apakah tindakan pelanggaran itu berupa ngebut di dalam terminal, atau memarkir kendaraannya seenaknya saja dan dalam bentuk yang lain. Demikian juga bila ada penumpang yang diketahui melanggar tata tertib, misalnya membuang sampah sembarangan atau menyeberang pada jalur kendaraan bus dan lain sebagainya, dia akan dikenakan sanksi beru-

pa teguran atau peringatan dari petugas terminal, dengan maksud supaya perbuatannya tidak diulangi kembali.

Adapun maksud terdapatnya sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tata tertib di atas, adalah merupakan wujud tindak lanjut dalam memberikan pembinaan secara langsung yang disampaikan oleh petugas sendiri. Di mana dia dipandang lebih dekat dalam penanganan ketertiban di terminal. Meskipun sanksi-sanksi tersebut dipandang ringan bagi para pelanggarannya, yang sebenarnya telah mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam menyebar luaskan informasi. Bahwa dilingkungan umum seperti terminal sangat membutuhkan penanganan dan perhatian serius dalam menjaga lingkungan menjadi aman, bersih dan teratur.

C. DISIPLIN DI LINGKUNGAN TEMPAT HIBURAN

Kalau kita perhatikan tentang tempat hiburan dewasa ini umumnya masyarakat memandang bahwa bioskop merupakan tempat hiburan yang paling digemari oleh sebagian masyarakat, sesuai dengan peran dan keinginan bagi masing-masing orang. Karena bioskop sangat bervariasi dalam pertunjukan-pertunjukan actingnya, biasanya kadar kebosanannya lebih kecil dari pada kadar kesenangan yang diperoleh sebagai hiburan. Bagi orang-orang kota bioskop merupakan bagian daripada kebutuhan hiburan yang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun tidak berarti bahwa bioskop adalah merupakan satu-satunya hiburan yang paling utama, karena masih juga terdapat hiburan lain yang disenangi setelah bioskop itu, misalnya menonton Televisi atau mandi di pantai, bermain di taman, atau bertamasya di tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya.

1. Mematuhi Peraturan Di Dalam Gedung Bioskop

Gedung bioskop "SEROJA TEATER" adalah satu-satunya tempat hiburan film yang ada di kota Dili. Bahwa gedung bioskop tersebut telah menjadi sarana atau ajang pertemuan orang-orang penggemar film, baik tua maupun muda mempunyai tujuan yang sama yaitu menonton sambil menikmati film sebagai hiburan yang menjadi salah satu bagian dari kesenangan hidupnya. Terutama para pemuda dan pemudi tidak mau ketinggalan akan kegemaran menonton di bioskop, dan setiap orang perlu mendapatkan hiburan karena hiburan menurut pendapat Djasmani (pegawai gedung bioskop); mengatakan bahwa hiburan

merupakan kebutuhan rohani yang harus terpenuhi jika tidak terpenuhi dapat melemahkan semangat. Apalagi setelah sekian lama melaksanakan sesuatu pekerjaan berat, tentu orang akan merasa lelah dan kelelahan ini akan pulih kembali menjadi segar bila telah terpenuhinya kebutuhan hiburan atau dengan rekreasi lainnya.

Misalnya untuk menghilangkan rasa kesal cara yang dilakukan adalah diantaranya dengan hiburan menonton di bioskop. Setelah kebutuhan rohani terpenuhi maka badan akan menjadi segar kembali dan bersemangat untuk melaksanakan suatu pekerjaan, disamping tidak menutup kemungkinan terhadap kebutuhan jasmani juga perlu diperhatikan untuk mengimbangi kesehatan badan kesehatan badan dengan cara berolahraga seperti senam atau main volly ball dan sebagainya.

Dalam uraian selanjutnya, bahwa bertemunya orang banyak pada suatu tempat hiburan menonton di bioskop, di dalam suatu ruangan atau gedung yang diusahakan oleh pimpinan bioskop "Seroja Teater" telah mengambil suatu kebijaksanaan yang berupa penerapan aturan atau norma-norma tertentu, dan diberlakukan kepada setiap orang terutama yang sedang memanfaatkan waktunya untuk menikmati hiburan di lingkungan bioskop. Adapun aturan atau norma-norma itu adalah :

- Jagalah Kebersihan
- Buanglah sampah pada tempatnya
- Dilarang merokok di dalam gedung bioskop
- Duduklah dengan tertib dan sopan
- Belilah karcis di loket, dan sebagainya

Sebagaimana aturan atau norma-norma tersebut telah terdapat secara nasional diberbagai tempat lingkungan bioskop di mana saja, seperti halnya yang diterapkan di gedung bioskop "Seroja Teater" Dili, dan terpampang berupa tulisan yang terdapat di tempat-tempat yang strategis, maksudnya agar setiap pengunjung dapat mengetahui dan mengerti untuk turut menjaga lingkungan. Disamping setiap pertunjukan dan pemutaran film berlangsung, dapat berjalan lancar dan tertib tidak ada gangguan yang tidak diinginkan.

Kendati demikian peraturan atau norma-norma yang harus ditaati, masih juga terdapat orang lain yang tidak mengindahkan peraturan sebagaimana mestinya. Maka sebagai usaha apa yang dilakukan oleh pimpinan gedung bioskop "Seroja Teater" Dili memperlakukan peraturan atau norma-norma itu kepada setiap pengunjung sejak mereka da-

tang sampai selesai menonton film dan pulang.

Apa yang dilakukan orang yang tidak mengindahkan norma-norma tersebut terutama adalah masalah sampah yang mereka buang di sembarang tempat, dan merokok di dalam gedung bioskop, yang akan menimbulkan asap sehingga mengganggu kejelasan gambar pada layar bioskop, serta mengganggu pernapasan penonton lainnya.

Selain itu ada yang duduk seenaknya untuk sekedar nampang, agar dilihat orang banyak lebih berani dan keren tidak ketinggalan jaman.

Sementara keluarga pergi rekreasi menonton di bioskop untuk sekedar mencari kesenangan, dan ingin mengendorkan syaraf-syaraf yang tegang guna memperoleh kekeluasaan dengan menikmati film supaya rasa lelah dapat kembali segar dan bergairah. Sekalipun rekreasi ini merupakan hak setiap orang dan tidak dapat diganggu atau dipengaruhi orang lain, namun karena orang merupakan makhluk sosial dalam lingkungannya, orang tidak boleh atau bisa bertindak semaunya sendiri tanpa menghiraukan norma-norma pada lingkungan. Norma-norma pada lingkungan bioskop yang dimaksud adalah keterkaitan mereka terhadap suatu peraturan main yang berlaku, maksudnya agar para pengunjung sebagai pemakai jasa dituntut untuk mentaati peraturan sebagaimana yang disebutkan di atas. Selain setiap pemutaran film dimulai, sebelumnya telah ditayangkan adanya slide pemberitahuan atau peringatan ketentuan bagi penonton, misalnya "**Dilarang Merokok**" Buanglah sampah pada tempatnya" "Duduklah dengan sopan", "film segera di mulai" dan lain sebagainya.

Pemberitahuan atau suatu anjuran yang demikian sederhana ini telah dapat memberikan manfaat yang besar kepada setiap pengunjung, bahwa mereka telah diingatkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Sepanjang pengamatan bapak Edi Hari Winarno (pimpinan pengelola bioskop Seroja Teater) menginformasikan bahwa tidak terdapat keributan-keributan yang berarti, apabila pengunjung memandang terdapat adanya kejanggalan atau merasa tidak puas akan tata tertib yang disajikan dalam bentuk slide seperti di atas. Sebagai contoh; dengan adanya anjuran untuk tidak merokok di dalam gedung bioskop selama film diputar boleh dikatakan rata-rata para penonton dapat mengindahkan, karena sifat naluri manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kelompok mereka tunjukkan keberadaanya sebagai kebersamaan.

Walaupun sering masih terdapat satu atau dua orang yang tetap me-

rokok sambil menonton film yang sedang berlangsung. Biasanya mereka telah menyadari dan memilih tempat yang paling dianggap aman tidak mengganggu orang di sekitarnya. Dari pengertian orang seperti ini dapat dimaklumi sebagai alasan sepanjang asap rokoknya tidak mengganggu dalam arti yang serius pada kejelasan gambar pada layar bioskop, dan membuat pengapnya di dalam ruangan. Sedangkan anjuran untuk membuang sampah di dalam gedung masih banyak terdapat sampah yang berserakan, apakah itu berupa bekas bungkus kacang, permen, puntung rokok dan sebagainya sekalipun telah tersedia tong sampah di dalam gedung. Dari pengamatan dapat diketahui bahwa umumnya selama pemutaran film berlangsung penonton malas dan enggan untuk pergi dengan permissi melewati penonton lainnya, juga takut keburu hilang dari layar untuk mengikuti alur cerita film, sehingga mereka mengambil jalan singkat membuang sampah di sekitarnya. Akhirnya petugas kebersihan gedung bioskop yang turun tangan menyapu setiap hari kewajibannya. Demikian juga terhadap anjuran yang lain seperti duduklah dengan sopan rata-rata para pengunjung dapat mematuhi, untuk ikut serta menjaga lingkungan umum supaya tertib, aman dan nyaman dinikmati semua orang, disamping dapat membawa diri yang akan dihargai pula oleh orang lain.

2. Batas Usia Penonton Yang Harus Dipatuhi

Membicarakan lingkungan bukan saja terletak pada penanganan sampah yang dibuang di sembarang tempat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, akan tetapi membicarakan orang banyak sebagai subyektif pada lingkungan bioskop perlu diperhatikan adanya ketertiban yang menjadi ketentuan sebagai penonton film yang baik. Terutama dalam ketentuan usia penonton di bioskop sangat penting untuk diperhatikan ketertibannya, disamping usia penonton bioskop sangat sensitif, dan peka dapat mempengaruhi segi kejiwaan anak-anak, bila jenis filmnya tidak sesuai dengan porsinya sebagai penonton, terutama bagi anak-anak dapat menonton film untuk semua umur atau 13 tahun ke atas, sedang dengan batasan umur 17 tahun ke atas yang khusus bagi orang dewasa. Pandangan seperti ini bahwa usia dibawah 17 tahun masih merupakan anak-anak yang sangat sensitif dan peka kejiwaannya, mereka mudah terpengaruh, dan dikawatirkan jangan sampai setelah dewasa menjadi orang yang salah asuh bila adegan di bios-

kop itu bukan porsi yang sebenarnya diberikan.

Umpamanya menonton film yang beradegan/berbau sex yang dapat mengakibatkan anak-anak usia dini menjadi cepat dewasa sebelum waktunya, sehingga orang sering mengatakan anak dewasa karena "karbitan".

Badan sensor film telah menentukan batasan umur bagi penonton di bioskop sesuai dengan keadaan cerita film terutama bagi anak-anak berusia dini tersebut diatas dipandang sebagai anak yang masih polos atau lugu, maka sebelumnya mereka terlebih dahulu mendapat pendidikan awal di bangku sekolah, bimbingan orang tua dalam menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan sebagainya, agar kelak setelah dewasa tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik. Karena usia sekitar 17 tahun masih merupakan usia remaja yang masih dalam panca roba penuh dinamika, juga secara ekonomi mereka belum mempunyai penghasilan sendiri.

Baru pada suatu periode tertentu tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak di bawah umur tersebut diberi kesempatan menonton di bioskop untuk umum, apakah pemutaran film itu diadakan oleh pihak pengelola bioskop sesuai dengan jadwalnya atau merupakan paket dari program pemerintah. Kesempatan tersebut biasanya bertujuan memberikan kesempatan mencari hiburan sebagai rekreasi atau memberikan kesempatan melalui film supaya anak dapat terlatih dalam menerima informasi yang benar melalui media film yang mengandung unsur-unsur pendidikan bagi pengembangan daya pikir anak-anak, melalui film dari paket atau program pemerintah untuk mencapai program-program tertentu.

Adanya suatu batasan usia penonton tersebut diatas menunjukkan perhatian kepada masyarakat luas, bahwa keberadaan bioskop bukan hanya sekedar untuk hiburan melainkan juga untuk keperluan informasi yang dipandang sebagai media menarik dan menyenangkan orang banyak. Maka keberadaan film harus dipisahkan antara fungsi dan tujuannya, apakah itu sesuai dengan porsinya untuk anak-anak atau khusus untuk orang dewasa.

Lain halnya bagi usia di atas 17 tahun, dari pandangan umum menyatakan bahwa usia tersebut sudah dianggap dewasa dan sudah matang cara berpikir untuk menentukan dan membedakan mana yang dapat bermanfaat dan yang tidak.



Suasana di terminal bis Komoro



Pelanggaran Lalu Lintas oleh kendaraan umum

Maka dengan adanya pembatasan usia penonton bioskop dengan tegas dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bahwa bioskop di satu pihak menjadi tempat hiburan yang menarik, tetapi di pihak lain akan bila dikaji lebih dalam terdapat banyak manfaatnya, yaitu merupakan media film yang menarik yang cepat dimengerti untuk mengetahui sejarah dan kebudayaan suatu bangsa.

3. Cara Memperoleh Karcis

Gedung bioskop yang menarik didatangi orang banyak sebagai penonton film dalam mencari hiburan, terdapat tata tertib yang merupakan peraturan yang harus diikuti yaitu, bagaimana orang dapat memperoleh karcis sebagai tanda masuk menonton di bioskop.

Bahwa di gedung disediakan loket penjualan karcis tanda masuk untuk nonton film, tersedianya loket pembelian karcis tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada para penonton, disamping mereka tidak direpotkan harus berdasarkan merebut membeli karcis bila pertunjukkan film menarik.

Dalam memberikan kemudahan untuk memperoleh karcis tersebut adalah merupakan pelayanan karcis dalam upaya menghindari kemungkinan terjadinya penyerobotan, walaupun menurut pandangan Bapak Djasmani (staf pimpinan bioskop), bahwa selama ini di gedung bioskop Seroja Dili tidak direpotkan oleh para penonton dalam pencarian atau cara memperoleh karcis, baik mereka melalui cara menyerobot masuk gedung bioskop tanpa menggunakan karcis atau memakai cara memalsukan karcis. Maka terdapatnya suasana yang demikian telah memperlihatkan bahwa para penonton telah memilih kedisiplinan, dalam melaksanakan tindakan-tindakan dalam memahami tata tertib yang berlaku, dan tidak mau menang sendiri. Terutama kedisiplinan mereka dalam mematuhi peraturan, yang dilakukan harus di antri membeli karcis di loket, tidak terdapat salah seorang yang menyerobot ingin mendapatkan karcis terlebih dahulu, dengan mengdesak penonton lain yang ikut antri lebih dahulu. Dari sikap yang dimiliki oleh para penonton tersebut telah menjaga diri sendiri, bahwa dilingkungan umum orang telah mendapat hak dan perlakuan yang sama, maka mereka harus tenggang rasa dan dapat mengendalikan diri.

4. Sanksi-Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib

Telah diuraikan diatas, bahwa bertemunya orang banyak pada tem-

pat hiburan seperti menonton di bioskop di dalam ruangan atau gedung, telah diberlakukan adanya tata tertib untuk mengatur tempat tersebut supaya menjadi nyaman. Tata tertib yang berlaku itu merupakan kebutuhan bersama dilingkungan umum seperti itu. Tidak membedakan kepada semua orang/penonton sebagai pemakai jasa dituntut untuk mentaati agar tercipta suatu lingkungan yang aman untuk dinikmati. Sebagaimana contoh yang telah diusahakan di gedung bioskop Seroja Dili, bahwa di dalam menjaga lingkungan agar menjadi bersih, aman dan tertib, maka terdapat tulisan-tulisan yang menjadi peringatan seperti "Jagalah Kebersihan", Buanglah sampah pada tempatnya atau sebelum dilaksanakan pemutaran film ini telah didahului adanya slide pemberitahuan atau peringatan yang merupakan norma-norma misalnya "Dilarang Merokok", Duduklah dengan sopan" dan lain sebagainya. Tata tertib atau peraturan yang sekilas tampak sederhana tersebut dapat memberikan manfaat yang besar kepada semua pengunjung, bahwa mereka diingatkan untuk tidak mengabaikan lingkungan dan membuat pelanggaran, terhadap tata tertib. Menurut pandangan bapak Djasmani bila terdapat penonton yang melanggar tata tertib atau peraturan tersebut, tidak mematuhi larangan merokok atau membuang sampah seenaknya di dalam gedung bioskop, dia akan mendapatkan sanksi-sanksi yang dikenakan apakah itu berupa teguran, peringatan, atau anjuran dari petugas gedung bioskop. Dari informasi yang diperoleh bila ada penonton yang diketahui melanggar tata tertib membuat keributan atau merokok di dalam gedung di waktu film sedang diputar, dia merasa malu kepada sesama teman penonton yang lain setelah mendapat teguran dari petugas, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Sekalipun pada akhir-akhir ini boleh dikatakan rata-rata para penonton dapat mengindahkan norma-norma di atas karena pada hakekatnya manusia sebagai insan sosial didalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat hidup sendiri. Maka rasa kebersamaan dalam menjaga suatu lingkungan sangat penting bagi mereka, untuk menciptakan suasana yang aman, bersih dan tertib.

D. DISIPLIN DI JALAN RAYA

Dalam perkembangan perhubungan dewasa ini tampak lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, demikian pula telah diikuti oleh perkembangan mobilitas manusia yang tidak pernah akan berhenti, dan akan selalu tumbuh mengikuti angan dan keinginan untuk memenuhi kebutu-

han. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada tahun-tahun berikut tuntutan masyarakat meningkat pula untuk pindah atau pergi dari satu tempat ke tempat lain begitu besar, baik itu untuk kegiatan yang berkaitan dengan lapangan kerja ataupun kegiatan sosial dan sebagainya. Namun untuk kelancaran transportasi dan mobilitas penduduk dibutuhkan fasilitas jalan raya sebagai sarana pendukung kelancaran lalu lintas, karena tuntutan dan keinginan masyarakat sebagai pemakai banyak digunakan oleh setiap orang, maka pada tulisan ini akan membahas bagaimana menjadi pemakai jalan yang baik termasuk bagaimana mengajak para pemakai jalan menjadi disiplin.

1. Ketidak disiplin di Jalan Raya

Sering kita jumpai di jalan bahwa para pemakai jalan beranggapan ia yang harus didahulukan sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas, tidak mau mengalahnya pemakai jalan dapat disebabkan tidak adanya rambu-rambu bahwa harus mengalah, dan lebih sering disebabkan pemakai jalan tersebut tidak menyadari dampak apa yang akan terjadi dari tindakan itu. Dari meningkatnya mobilitas penduduk yang tidak pernah akan berhenti mempengaruhi keseimbangan dari banyak masyarakat sebagai pemakai jalan, bila tidak terdapat pelaksanaan perbaikan jalan serta kelengkapan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari perhatian terhadap lalu lintas di jalan raya terutama bagi setiap pemakai jalan akan dapat seimbang pula untuk berbuat disiplin.

Dengan meningkatnya mobilitas penduduk yang tidak pernah berhenti yang telah disebutkan di atas, maka akan meningkat pula jumlah kendaraan yang dibutuhkan sebagai sarana transportasi penduduk dalam menunjang terjangkaunya mobilitas para pemakai jalan terutama oleh para pengemudi. Kegiatan transportasi tersebut berupa kendaraan beroda dua, roda empat dan lain sebagainya.

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

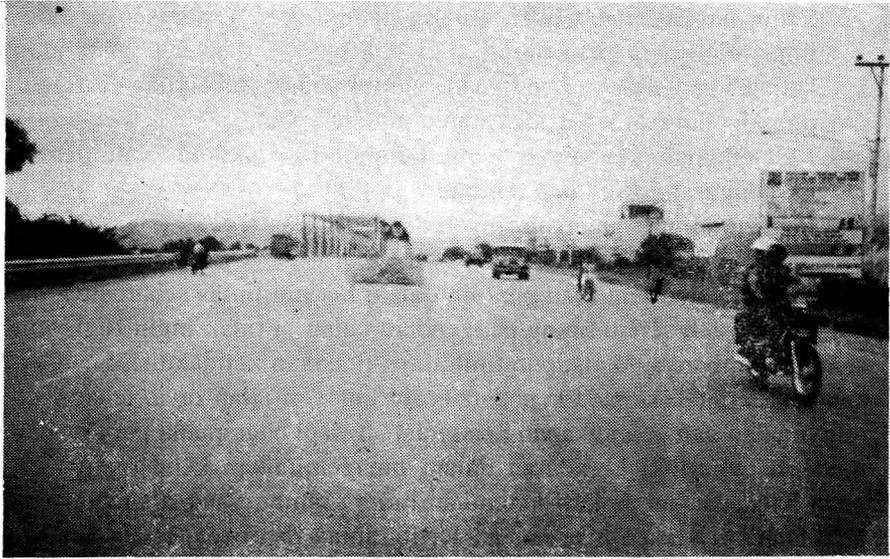
Tabel : 13 Jumlah Kendaraan di Timor Timur Tahun 1987-1992

| No. | Jenis Kendaraan | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Mobil Penumpang | 1472 | 1572 | 1714 | 1799 | 1878 | 1993 |
| 2. | Mobil Bus | 203 | 227 | 244 | 302 | 372 | 546 |
| 3. | Mobil Barang | 2649 | 2729 | 2813 | 2971 | 3127 | 3541 |
| 4. | Kereta Gandengan | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Kereta Tempel | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Sepeda Motor | 5767 | 6108 | 6778 | 7481 | 8065 | 9325 |
| | J u m l a h | 10091 | 10636 | 11559 | 12553 | 13442 | 15405 |

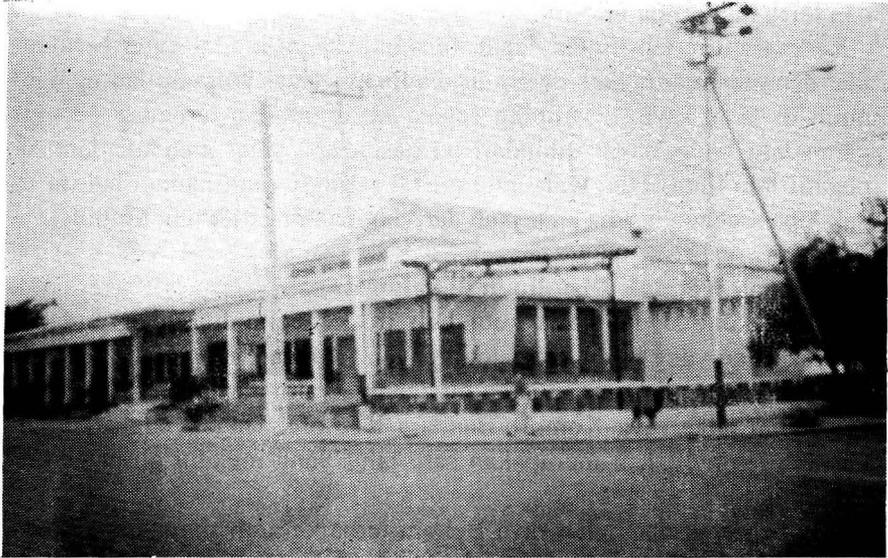
Data : Sumber data sampai semester I 1992 Polwil/Samsat Dili

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat suatu peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya bertambah, dengan bertambahnya kendaraan dapat dirasakan kepadatan lalu lintas di jalan raya semakin tidak terkendali dan tidak dibarengi dengan pelebaran atau perbaikan jalan serta tanda jalan untuk dapat diikuti oleh para pengemudi. Apabila hal semacam ini tidak diperhatikan besar kemungkinan di tahun-tahun berikutnya jalan raya akan penuh sesak adanya kendaraan yang tidak tertampung, dan cenderung penanganan jalan raya semakin sulit.

Dampak yang bakal terjadi dalam arus lalu lintas, banyak pengemudi dan pemakai jalan yang lain, telah mengejar kepentingannya dan berebut ingin cepat tanpa menghiraukan yang lain, sehingga dari akibat tidak tertampungnya kendaraan di jalan raya menimbulkan para pengemudi tidak berdisiplin. Ketidak disiplin para pengemudi kendaraan di jalan raya tersebut telah mendorong keinginan pengemudi untuk mengambil jalan pintas yaitu dengan cara melanggar rambu-rambu apakah itu dilakukan dengan melanggar lampu merah, atau mengambil jalan lain untuk menghindari kemacetan, yang sebenarnya jalan tersebut tidak dapat untuk dilewati dari berbagai jenis kendaraan umum yang besar. Seringnya terjadi pelanggaran di jalan raya disebabkan kurang disiplinnya para pengemudi dapat dilihat dalam analisis dan evaluasi pelanggaran lalu lintas, yaitu telah diesbutkan dalam data dari Polwil/Samsat Dili diantaranya adalah :



Tidak ada tanda jalan sebagai pemisah jalur Lalu Lintas



Gedung Bioskop Seroja Teater

- Lebih banyak disebabkan kurang disiplin dan kendaraan berlalu lintas oleh para pengemudi angkutan umum, hal tersebut terjadi karena banyaknya kendaraan umum tidak sebanding dengan jumlah pemakai jalan angkutan umum tersebut.
- Kelengkapan kendaraan yang kurang diperhatikan oleh pemilik/pengusaha angkutan umum.
- Pengemudi menganggap ringan denda tilang.

Perhatian yang demikian penting dalam berlalu lintas seharusnya dapat diikuti oleh setiap orang/pengendara kalau ia tidak ingin rugi yang akan menimpanya. Walaupun timbulnya tindakan ketidaksiplinan bukan saja terletak kepada kepadatan lalu lintas di jalan raya, lebar sempitnya jalan dan kelengkapan kendaraan. Tetapi bagaimana para pengemudi itu memiliki kesadaran dalam mengemudikan kendaraanya dengan baik, dan mengikuti ketentuan rambu-rambu yang mengatur dan membuat perjalanan bisa lancar, tertib, aman dan cepat tanpa ada kemacetan lalu lintas. Bahwa kesadaran dalam bertindak disiplin kiranya terletak kepada mentalitas manusianya sampai dimana mereka miliki, dan telah menerima informasi berlalu lintas yang diperoleh dan diserap.

Kesadaran berlalu lintas dapat dipakai sebagai modal yang bermanfaat dan menguntungkan dalam usaha memperluas ketrampilan mengemudi di jalan raya, disamping segala kemungkinan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dihindari termasuk apa yang menjadi dampak negatif lalu lintas lain, walaupun masih sering terjadi namun hal ini tidak lepas sebagai usaha agar jauh dari dampak negatif yang timbul.

2. Dampak Ketidak-Disiplinan di Jalan Raya

Bahwa kondisi geografis kota Dili tidak begitu luas dan terdapat banyak jalan yang berbelok-belok dengan tikungan yang tajam, disamping banyak persimpangan jalan raya utama yaitu dari jalan raya Bekora sampai jalan raya Komoro/Bandara Komoro dengan jarak tempuh kurang lebih 12 Km merupakan satu jalur yang melalui pusat perkotaan Dili.

Bila bergerak dari jalan raya Bekora terus ke arah timur merupakan jalan raya menuju kota Kabupaten Manatuto, Baucau, Lospalos dan kota Viqueque di sektor timur. Sedang dari jalan raya Comoro ke arah barat adalah menuju Liquica, Atambua, Ambeno, sampai Kupang ibukota

Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Dili ke selatan ada jalan raya yang menuju Aileu, Maubesi, Ainaro, Same dan Ermera, Bobonaro.

Meskipun telah diatur demikian rupa tata letak ruang maupun jalur-jalur lalu lintas, beserta rambu-rambu pada jalur utama maupun pada persimpangan jalan dengan perhatian terhadap rambu-rambu perlu diletakkan di tempat mudah dilihat dan strategis. Karena mengingat bahwa pemakai jalan di sini bukan hanya pengemudi kendaraan roda empat saja tetapi juga pengendara sepeda motor maupun sepeda biasa, gerobak dorong, pejalan kaki dan semua orang yang memakai jalan, mereka itu dapat menerima dampak ketidakdisiplinan di jalan raya.

Dampak yang diterima oleh para pemakai jalan tersebut tidak terlepas dari kelengahan dan ketidakdisiplinan para pemakai jalan itu sendiri atau para pemakai jalan lain. Maka setiap waktu sering terjadi suatu pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang tidak dapat dihindari lagi, sebagaimana pada tabel di bawah ini yang memperlihatkan adanya suatu kecelakaan lalu lintas.

Tabel 14
Data Laka Lantas Tahun 1991/1992

| No | Bulan | DATA LAKA LANTAS TAHUN 1991/1992 | | | | | | | | | | | Ket. | |
|-----|-----------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|------|------|-------|
| | | PELAKU | | | | | | | | | | | | |
| | | USIA | | | | | | Profesi | | | | | | |
| | | | 16-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | SPR | PNS | TNI | PEL | LAIN | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | April | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | | |
| 2. | Mei | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | | |
| 3. | Juni | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | | |
| 4. | Juli | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 5. | Agustus | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 6. | September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7. | Oktober | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8. | Nopember | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 9. | Desember | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10. | Januari | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11. | Pebruari | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 12. | Maret | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 13. | April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| | Jumlah | - | 3 | 12 | 7 | 3 | - | 10 | 3 | - | 2 | 10 | 49 | |

1 : Polwil/Samsat Tahun 1991/1992 Dili.

Bagaimanapun serius perhatian ataupun penanganan berlalu lintas yang harus dilakukan oleh para pemakai jalan itu, bila di satu pihak tidak diimbangi oleh pihak yang lain untuk saling memperhatikan tentang kedisiplinan berlalu lintas di jalan raya, yang merupakan keterikatan bersama dalam menjaga keselamatan. Kalau mereka tidak menginginkan kecelakaan harus memiliki kesadaran mematuhi tata tertib lalu lintas.

Di samping adanya kondisi jalan raya di kota Dili yang masih sempit yang makin meningkat dengan arus bolak balik atau berlawanan arah, sedang garis tengah sebagai tanda pemisah jalur kurang jelas untuk diperhatikan oleh setiap pengendara, dari arah mereka bergerak dan harus memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Kecelakaan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor manusia. Sekalipun telah banyak jalan dilengkapi dengan trotoar di samping kanan kiri jalan untuk fasilitas para pejalan kaki, namun belum ada jalur khusus untuk jalur cepat atau jalur lambat yang mengatur kendaraan bermotor harus bergerak melalui jalur cepat sedangkan kendaraan tak bermotor harus lewat di jalan lambat. Pejalan kakipun harus memilih jalur yang aman yaitu berjalan di trotoar. Dengan kondisi jalan yang belum lengkap dengan jalur khusus dan terbatasnya tempat-tempat penyeberangan bagi pejalan kaki yang tersedia, rambu-rambu maka para pemakai jasa di jalan raya yang demikian majemuk telah mendapatkan tantangan untuk kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan berlalu lintas dengan baik. Yaitu sebagai upaya menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya.

3. Mematuhi Peraturan Lalu Lintas Di Jalan Raya

Berkaitan dengan ketidak disiplinian lalu lintas, telah terdapat dampak negatif yang telah diterima oleh pengemudi kendaraan umum di kota Dili, dari pendapat Paolo De Fatima, besar kemungkinan disebabkan kesalahan dan kelengahan karena mereka kurang memahami bagaimana mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya dengan tertib dan baik, sehingga sering terjadi pelanggaran yang membawa akibat kecelakaan.

Kurang memahaminya etika tersebut dari informasi yang diperoleh bahwa rata-rata para pengemudi kendaraan terutama terdorong untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) masih berorientasi semata diper-

gunakan untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka kurang banyak keinginannya untuk memahami rambu-rambu lalu lintas yang harus diikuti dan ditaati, apakah itu tanda larangan jalan, larangan berkecepatan tinggi atau tanda lalu lintas lain yang harus dipatuhi di jalan.

Melihat bahwa sangat pentingnya jalan raya sebagai sarana berlalu lintas yang digunakan oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat sebagai pemakai jalan wajib disiplin mematuhi peraturan lalu lintas. Maka apa yang dilaksanakan oleh Polwil adalah dengan mengadakan pembinaan, berupa penyebarluaskan informasi berlalu lintas kepada masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi, selain pembinaan secara khusus mengadakan penataran bagi para pengemudi yang setiap 2 bulan sekali, dengan cara bergilir agar seluruh pengemudi tidak ada yang ketinggalan untuk memperoleh penataran. Materi yang diberikan khusus mengenai lingkup peraturan-peraturan berlalu lintas, serta memberi motivasi atau dorongan supaya para pengemudi memiliki ketrampilan berlalu lintas dengan baik, dan merupakan usaha mempertinggi kesadaran dan kedisiplinan para pengemudi di kota Dili. Disamping hal tersebut telah dihimbau agar membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga kepedulian sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan PMI misalnya dalam pemberian sokongan dana serta sumbangan/donor darah.

Perlunya dipahami peraturan-peraturan lalu lintas, oleh para pemakai jalan di kota Dili agar menjadi pemakai jalan yang baik dan aman terhadap pelanggaran berlalu lintas di jalan raya, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebaik-baiknya diantaranya adalah:

- Para pemakai jalan perlu menyadari bahwa umumnya sarana jalan dan rambu-rambu belum lengkap untuk dapat diikuti sepenuhnya agar menjadi pemakai jalan yang amam. Misalnya beberapa perempatan atau persimpangan belum dilengkapi lampu lalu lintas sehingga setiap pengendara harus hati-hati dengan memperlambat kendaraannya untuk memberi kesempatan bagi kendaraan yang lebih dahulu masuk.
- Dalam kondisi seperti di atas pada persimpangan yang telah dilengkapi lampu lalu lintas, kendaraan yang ada pada jalur utama harus diberi kesempatan terlebih dahulu dan kendaraan dari arah lain harus mengalah.

- Para pemakai jalan; baik pejalan kaki, sepeda motor, pengemudi mobil dan sepeda harus taat mengikuti rambu-rambu, kita harus berperilaku tidak mau menang sendiri.
- Para pemakai jalan yang lebih lambat seperti pengendara sepeda, harus selalu memberi kesempatan kepada pemakai jalan yang lebih cepat seperti mobil dan sepeda motor untuk mendahuluinya.
- Para pengemudi kendaraan harus lebih dapat memperhatikan keselamatan kendaraan atau pemakai jalan yang lain dan selalu beranggapan bahwa pemakai jalan yang mempunyai hak yang sama dalam memakai jalan.
- Para pejalan kaki harus berjalan pada jalur yang telah tersedia dan harus menyebrang di tempat penyeberangan, dan mereka harus menunggu dalam kondisi yang aman.
- Kita perlu memberi pengertian serta penyadaran semua pihak mengenai pentingnya menjaga lingkungan di samping itu perlu diberikan sanksi yang keras bagi pelanggar lalu lintas dan harus diberlakukan tanpa pandang bulu dan kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran.

Tegasnya bahwa semua pihak sebagai pemakai jalan harus dapat menyadari kondisi lingkungan jalan raya bahwa semuanya memiliki hak yang sama dan tidak bersikap ingin menang sendiri tetapi memberi kesempatan dan menghormati pemakai jalan yang lain.

Selain itu kondisi kendaraan harus selalu dalam keadaan baik atau baik jalan, untuk menghindari kecelakaan yang diakibatkan oleh keadaan kendaraan yang kurang baik seperti misalnya; rem yang sudah mati dsb.

Apabila semua pengemudi sudah mematuhi peraturan tata tertib lalu lintas dan kendaraan terawat dengan baik dan Undang-Undang (lalu lintas) No. 14 Tahun 1992 sudah memasyarakat maka tercapailah upaya meningkatkan disiplin nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

BAB V
UPAYA PEMBINAAN DISIPLIN
PADA MASYARAKAT KOTA

Upaya pembinaan disiplin pada masyarakat kota Dili pada hakekatnya dilaksanakan baik secara formal maupun non formal. Upaya pembinaan tersebut dilakukan :

- a. Pembinaan oleh Pemerintah
- b. Pembinaan oleh Tokoh Masyarakat

A. PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH

Dalam rangka menciptakan disiplin pada masyarakat kota maka pemerintah Daerah Tingkat II Dili melalui Bappeda Tk.II Dili telah mengadakan koordinasi dengan Instansi-instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam pembangunan kota Dili.

Adapun Instansi-instansi terkait tersebut antara lain :

1. Instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dili.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dili adalah memberikan bimbingan mengenai pembangunan tata guna tanah secara langsung kepada masyarakat maupun melalui aparat desa (dalam hal ini Kepala Desa).

Dalam pembinaan ini disampaikan tentang :

- a. Proses pembinaan untuk mendapatkan SK hak atas tanah.
- b. Proses untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah.
- c. Permohonan pendaftaran balik nama sertifikat hak tanah.

a. Proses untuk mendapatkan Sk hak atas tanah.

Proses untuk mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dili dengan melampirkan persyaratan antara lain :

1. Alas hak berupa Surat Keputusan pemberian hak atas tanah (SKPHAT) dan sejenisnya.
2. Bagi Instansi pemerintah/Swasta, site lokasi (dari Bupati) dan IPPT (dari Gubernur).
3. Identitas pemohon
4. Gambar situasi tanah (GS).

Apabila persyaratan-persyaratan tersebut telah langkah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dili, meneruskan permohonan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Timor Timur untuk diproses Su-

rat Keputusannya, dan didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kabupaten Dili untuk penerbitan sertifikatnya.

b. Proses untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Proses untuk mendapatkan sertifikat antara lain :

1. Permohonan pengukuran untuk mendapatkan salinan peta situasi/GS, dengan melampirkan persyaratan :

- Surat permohonan
- Foto copy identitas diri (KTP, SIM)
- Alas hak di atas tanah yang dimohon
- Mengisi formulir model "A"
- Membayar biaya administrasi
- Untuk instansi dilengkapi site lokasi, ijin prinsip pencadangan tanah (IPPT), berita acara pembebasan tanah.

c. Permohonan pendaftaran sertifikat hak, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- SK pemberian hak atas tanah.
 - Gambar situasi/salinan peta situasi.
 - Tanda bukti setor uang pemasukan kas negara dan dana YDL.
 - Identitas pemohon.
 - Membayar biaya pendaftaran dan administrasi.
- Angka 1 s/d 4 asli dan foto copy rangkap 4 (empat).

d. Permohonan pendaftaran balik nama sertifikat hak atas tanah persyaratan yang harus dipenuhi :

- Akta PPAT/Surat Keterangan warisan.
- Sertifikat asli.
- Identitas pemohon dan (penjual, penghibah)
- Tanda lunas PBB bulan terakhir tahun berjalan.
- Mengisi formulir model "A".
- Membayar biaya pendaftaran dan administrasi.

Catatan : khusus untuk balik nama berdasarkan jual beli tanah pertanian sebagian yang akan dialihkan menjadi tanah peruntukan bangunan harus dilengkapi :

- Foto copy Akta Jual Beli dan KTP rangkap 3 (tiga)
- Surat permohonan.
- Materai Rp. 1.000.- (3 lembar).



Upaya dalam ajakan mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas



Tampak rapi berjualan di tempat rekreasi

Apabila ada permohonan dari okupan (pemukiman masyarakat liar), Kantor Pertanahan Kabupaten Dili tidak melayani akan tetapi memberikan pengertian-pengertian pada pemohon menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kantor Bupati Daerah Tingkat II Dili.

Berbagai upaya pembinaan pada masyarakat kota Dili yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Dili adalah terlihat pada :

a. Usaha-usaha Pemerintah Daerah TK. II Dili dalam rangka penerbitan bangunan-bangunan liar/tanpa surat ijin mendirikan bangunan (IMB) adalah :

- Melalui Kantor Badan Pertanahan Tk. II Dili telah diadakan penyuluhan dan inventarisasi pemilikan tanah masyarakat yang mempunyai bangunan liar.

- Dalam penertiban bangunan Pemerintah Daerah Tk. II Dili membentuk TIM penertiban bangunan yang diketuai oleh Wali Kota Administratif Dili yang anggota-anggotanya adalah instansi terkait, untuk bangunan baru yang tidak memiliki IMB diupayakan pencegahan, sedangkan bangunan yang sudah terlanjut tidak mempunyai IMB dilakukan pendataan.

b. Usaha pengembangan kota Dili untuk mengatasi kepada penduduk sebagai akibat urbanisasi, untuk sementara antara lain melalui pengambilan sebagian penduduk yang baru ke daerah asalnya dan di samping itu pula dilakukan dengan menempatkan penduduk ke arah timur yaitu ke Hera dan Manatuto.

c. Usaha pengaturan dan penertiban Kartu Tanda Penduduk bagi warga masyarakat Dili dimana Pemerintah Daerah Tingkat II Dili telah menetapkan peraturan Daerah nomor : 11 tahun 1985 dan telah diubah untuk pertama kali dengan peraturan Daerah Nomor : 06 tahun 1991 tentang Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk didelegasikan kepada masing-masing Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Dili, namun untuk penerbitannya setiap KTP yang sudah selesai ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan wajib distempel timbul di Kantor Kabupaten Dili sekaligus merupakan tugas monitor/pengawasan.

d. Dalam rangka kebersihan penyuluhan agar ternak yang berkeliaran

dapat ditertibkan atau dikendalikan. Tim tersebut dibantu oleh Camat dan Kepala Desa masing-masing untuk menertibkan lingkungannya.

e. Dalam rangka menciptakan arus lalu lintas guna memperlancar arus lalu lintas di depan pasar, maka pemerintah Daerah Tingkat II Dili secara rutin menertibkan para pedagang, baik yang berada di depan pintu masuk maupun di dalam pasar. Secara rutin mulai awal bulan September 1992 Polisi lalu lintas telah melaksanakan pengaturan, pengendalian arus lalu lintas sebagai berikut :

I. Jam 06.00 - 10.00 Wita

II. Jam 12.00 - 14.00 Wita

III. Jam 16.00 - 18.00 Wita

Disamping itu rambu-rambu lalu lintas telah dipasang sesuai dengan kebutuhan.

f. Upaya untuk memelihara disiplin karyawan adalah memberi contoh teladan dari setiap pimpinan (atasan) seterusnya perlu bimbingan dan pembinaan secara berkesinambungan, setiap karyawan sebaliknya ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya sehingga dapat meningkatkan kreativitas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu perlu diperhatikan hak dan kewajibannya. Bagi yang melanggar diberi hukuman yang obyektif dalam arti harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya.

3. Wali Kota Dili.

Upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Wali Kota Dili dalam mendukung programnya tentang DILI BERTAIS (bersih, tertib, aman, indah, sehat dan sopan) yang telah dicanangkan sejak tahun 1987, namun upaya mewujudkan baru terlaksana sejak Januari 1990. Untuk itu dalam upaya menjadikan Dili sebagai Kota Bertais ada 3 (tiga) program pokok yang dilaksanakan oleh Wali Kota sebagai berikut :

a. Program fungsional yakni melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi struktur kelembagaan Kotif.

b. Program operasional yakni melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah kepada tujuan-tujuan operasional dengan ciri-ciri sebagaimana dicanangkan dengan semboyan BERTAIS yakni Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kesehatan dan Kesopanan.

c. Program khusus yakni melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui terobosan-terobosan khususnya melalui BERTAISS sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dibidang "Environment & city life-style" dimana berupa untuk menutupi kekurangan-kekurangan, yang ada dengan jalan menghimpun dana dan daya warga kota yang ingin berpartisipasi dalam mengembangkan kota Dili dalam segala aspek kehidupan.

Ketiga program pokok KOTIF telah melaksanakan kendatipun dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya terlaksana. Secara efektif dan efisien karena sikon, namun demikian berbagai upaya telah dilakukan oleh Wali Kota, baik dalam meningkatkan kualitas pegawai (disiplin, etos kerja) maupun dalam upaya melaksanakan terobosan tertentu dalam melaksanakan program-program tersebut.

Kendala-kendala yang bersifat struktural/mendasar baik berasal dari dalam instansi Wali Kota sendiri seperti kualitas pegawai, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas (alat dan pendanaan yang terbatas) maupun yang berasal dari masyarakat umum, khususnya warga kota yang belum sadar akan kewajibannya, umpamanya dalam menjaga kebersihan, membiarkan binatangnya berkeliaran dan sebagainya, pada hal telah ada aturan-aturannya yang dianggap sudah diketahui oleh masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan melaksanakan patroli Polisi Pamong Praja membuka forum pembinaan informal melalui pertemuan walikota dengan pemuda-pemuda warga kota Dili, pembinaan dan dialog melalui RRI serta pembinaan melalui jalur pembinaan fungsional, yakni teguran-teguran lisan/tulisan langsung kepada warga melalui aparat Desa.

Di samping itu pula upaya pembinaan yang dilakukan adalah dengan mengadakan berbagai perlombaan/kegiatan khususnya berbagai perlombaan baik dibidang olah raga maupun dibidang lainnya seperti lomba kebersihan antar desa, instansi dan lainnya termasuk upaya menghidupkan kembali penertiban koran daerah. Kegiatan ini ditetapkan pada setiap tanggal 10 Oktober.

4. Instansi Koperasi

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh koperasi adalah untuk mendirikan KUD. Maka untuk mencapai agar KUD dapat mandiri harus

mempunyai dan mengikuti 12 kriteria yang telah menjadi pedoman sebagai ketentuannya :

- a. Mempunyai anggota penuh minimal 25 dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya.
- b. Pelayanan kepada anggota minimal 60 % dan volume usaha KUD secara keseluruhan, dalam arti jumlah penjualan minimal 60 % dalam usaha, harus lebih besar kepada jumlah anggota. Dimaksudkan agar jumlah penjualan harus lebih besar usahanya di dalam dari pada di luar supaya untung yang dicapai dapat memenuhi target.
- c. R A T dilaksanakan tepat waktu minimal 3 tahun berturut-turut, yaitu pada Bulan Januari - Maret dalam pelaksanaannya. Jika di luar itu sudah dikatakan tidak tepat pelaksanaan R A T.
- d. Pengurus dan BP semuanya berasal dari anggota dengan jumlah minimal pengurus 5 orang dan BP 3 orang, dimana pengurus dan Badan Pengurus harus diambil dari anggota sendiri.
- e. Modal minimal 25 juta rupiah.
- f. Hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan (ungualied). Tujuannya adalah membina dalam segi administrasi, mencoba atau mengelola keuangan jangan sampai tidak sesuai dengan pemeriksaan, dengan maksud betul-betul tidak ada penyelewengan.
- g. Batas toleransi usaha terhadap rencana usaha KUD (program dan non program) : 20 %. Keterangan : Koperasi diarahkan membuat rencana atau membuat pendapatan anggaran belanja, rencana anggaran yang ditetapkan jangan sampai meleset dengan batas antara 20 % sampai 25 %.
- h. Ratio keuangan : Ligwiditas antara 150 - 200 %

Solfaditas : 100%

Keterangan :

Ligwiditas : Kemampuan untuk membayar utang-utang setiap saat. Jangan sampai kas kosong sedapat mungkin 2 : 1 yang artinya mempunyai harta/modal 2 dan terdapat dan koperasi dapat berjalan baik.

Solfaditas : Untuk membayar hutang bila koperasi dibubarkan agar harta/modal dengan hutang yang ada paling tidak ber-banding 1 : 1 yang arttinya agar tidak dibenani hutang bila koperasi bubar.

Rentebiktas : Untuk mendapatkan keuntungan jangan sampai modal di bawah bunga bank.

i. Volume usaha minimal Rp. 250.000,-/ anggota - tahun.

Keterangan : Modal Rp. 25.000,- perbulan perorang di koperasi supaya anggota lebih banyak membeli barang di koperasi sendiri agar tidak belanja di luar.

j. Sarana usaha layak dan dikelola sendiri.

k. Tidak ada penyelewengan yang merugikan KUD oleh pengurus.

l. Tidak ada tunggakan

Disamping mengadakan pembinaan koperasi juga memberikan bantuan kepada Koperasi Unit Desa, adapun bantuan tersebut yang ada pada koperasi adalah :

1. Donasi : yaitu bantuan cuma-cuma dapat berupa tanah, bangunan, gedung dan sebagainya terutama dari pemerintah daerah baik tingkat I, II.

2. Refoltinfan : bantuan lunak/ bergilir baik berupa gedung maupun uang.

3. Kredit lunak : kredit lunak merupakan bantuan dari Menteri/BU-MN/Departemen Koperasi.

5. Instansi Kesehatan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan dalam rangka menciptakan kehidupan keluarga yang sehat, bersih dan sejahtera dilakukan dengan 2 jalan yaitu :

a. Pembinaan secara langsung kepada masyarakat.

b. Pembinaan secara tidak langsung kepada masyarakat.

a. Pembinaan secara langsung kepada masyarakat.

Pembinaan ini dilakukan oleh Aparat Kesehatan yang ada di desa (PUSKESMAS) adalah tentang :

1. Kebersihan lingkungan

Dalam upaya memberikan pembinaan kebersihan lingkungan pada masyarakat, maka aparat kesehatan yang ada di desa terjun secara langsung ke masyarakat/ke rumah-rumah dengan memberikan penyuluhan tentang cara-cara menciptakan kebersihan lingkungan antara lain :

- Rumah hendaknya ada ventilasi tidak ada lubang tempat persem-bunyian tikus.

- Lantai rumah hendaknya disemen sehingga terhindar dari kelembahan.
- Jangan berludah di sembarang tempat lebih-lebih di kamar tidur maupun di ruang tamu.
- Tidak boleh membuang sampah dengan sembarangan.
- Jika mempunyai ternak hendaknya dikandangkan dan kandang tersebut jauh dari rumah sehingga tidak mengganggu kesehatan.
- Kalau mandi dan mencuci harus memakai sabun.
- Jika membuang air harus memanfaatkan MCK yang sudah tersedia, sehingga tidak jongkok di sekitar pekarangan.
- Anak-anak kalau bermain, bermainlah di tempat yang bersih dan jangan bermain di sekitar kandang ternak.

2. Memanfaatkan PUSKESMAS sebagai balai pengobatan.

Disini juga masyarakat diberikan penyuluhan, apabila sakit agar segera datang ke Puskesmas untuk berobat sehingga tidak menunggu-nunggu sakit keras dulu baru dibawa ke Puskesmas ini dapat menimbulkan akibat yang fatal.

3. Meningkatkan kesehatan bayi dan penyuluhan KB.

Dalam upaya pembinaan tentang meningkatkan kesehatan bayi, maka aparat kesehatan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat yang mempunyai anak balita, agar setiap bulan datang ke Posyandu untuk mengetahui perkembangan bayinya. Dan pada kesempatan itu pula disampaikan tentang perlunya membatasi kelahiran anak dengan mengikuti program KB (Keluarga Berencana), sehingga dengan mengikuti program tersebut kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dapat tercipta.

b. Pembinaan secara tidak langsung kepada masyarakat.

Pembinaan dalam menciptakan keluarga sehat, bersih, dan sejahtera ini dilakukan dengan melalui iklan-iklan pada siaran radio (RRI) dan pemasangan plakat-plakat di jalan-jalan umum.

B. PEMBINAAN OLEH TOKOH MASYARAKAT

Upaya pembinaan disiplin pada masyarakat kota khususnya masyarakat desa Komoro dilakukan oleh Tokoh-tokoh masyarakat seperti :

1. Kepala Desa
2. Babinsa/Binpolda
3. Ketua TIM Penggerak PKK
4. Ketua Karang Taruna
5. Ketua RT/RW

1. Pembinaan oleh Kepala Desa

Upaya pembinaan disiplin terhadap masyarakat desa Komoro baik itu pembinaan disiplin tertib administrasi kebersihan lingkungan, disiplin lapor melapor baik menyangkut mobilitas maupun kena musibah, kerukunan di antara warga, sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta pembinaan pada stafnya agar senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang ada. Pembinaan ini biasanya dilakukan oleh kepala desa pada saat memberikan amanat pada upacara bendera tanggal 17 setiap bulan, dimana Kepala Desa sebagai pembina (Inspektur upacara) di samping itu pula pembinaan juga biasa dilakukan pada rapat-rapat rutin.

2. Pembinaan oleh Babinsa/Binpolda

Pembinaan yang dilakukan oleh Babinsa/Binpolda, biasanya lebih menekankan pada masalah ketertiban dalam administrasi dan pada masalah keamanan.

- Masalah tertib administrasi, dalam pembinaan ini Babinsa/Binpolda bekerja sama dengan Kepala Desa dengan menyampaikan secara langsung kepada warga masyarakat yang datang ke kantor desa yang hendaknya mengurus surat-surat, pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar warga masyarakat semakin sadar dan mengerti tentang tertib administrasi seperti dalam mengurus KTP harus membawa surat pengantar dari RT dan lebih-lebih bila mengurus KTP baru (pindahan) warga harus menyertakan surat pindah domisili dari daerah asal, dalam pembinaan ini juga disampaikan sanksi apabila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan maka warga tersebut tidak dilayani dalam pengurusan administrasinya.

- Masalah keamanan, pembinaan dalam masalah keamanan dirasa sangat perlu dilakukan, mengingat kondisi masyarakat Timor Timur pada umumnya memerlukan penanganan yang serius dalam bidang keamanan, untuk itu Babinsa/Binpolda yang ada di desa selalu memberikan pembinaan kepada warga masyarakat agar turut serta menciptakan kondisi yang aman. Oleh karena mata pencaharian warga masyarakat desa Komoro beraneka ragam, ada yang menjadi pegawai, ABRI, pedagang, sopir, buruh serta petani, maka warga masyarakat yang mata pencahariannya sebagai karyawan maupun ABRI karena tugasnya tidak selalu dapat terus menerus hadir dengan berjaga malam pada pos-pos keamanan (sis-kamling), untuk itu keamanan lingkungan sebagian terbesar diserahkan kepada Hansip, maka dari itulah dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman maka Babinsa/Binpolda bekerja sama dengan Kepala Desa memberikan bimbingan kepada Hansip yang ada di masyarakat. Pada saat memberikan bimbingan, dituntut tanggung jawab hansip dalam menjaga stabilitas keamanan.

3. Pembinaan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.

Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK adalah :

- Membina kepengurusan (organisasi) agar mampu secara maksimal melaksanakan semua program PKK Desa.
- Memberikan pembinaan tentang kegiatan kewanitaan agar mampu mengembangkan daya pikir dan kreasi serta meningkatkan hubungan antara anggota PKK yang semakin akrab guna persatuan dan kesatuan, sasaran pada pembinaan ini adalah seluruh anggota PKK Desa.
- Membina membentuk kelompok belajar usaha seperti : Ketrampilan menjahit, ketrampilan memasak, ketrampilan tenun tais dengan tujuan agar mampu membuka lapangan kerja sendiri.
- Membina meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara kepada setiap anggota PKK desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam memperingati hari-hari besar nasional dan daerah untuk itu diadakan berbagai kegiatan lomba.
- Membina untuk membuka usaha-usaha seperti perkiosan, simpan pinjam dengan tujuan meningkatkan penghasilan serta taraf hidup keluarga.

4. Pembinaan oleh Ketua Karang Taruna.

Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Karang Taruna adalah :

- Membina kepengurusan agar maupu secara maksimal melaksanakan semua program, dalam memberikan pembinaan ini sasarannya adalah seluruh anggota Karang Taruna Desa. Karang Taruna rayon dan Karang Taruna ranting.
- Membina kegiatan kepemudaan dengan tujuan mengembangkan daya pikir dan kreasi serta meningkatkan hubungan antara pemuda supaya semakin akrab guna persatuan dan persatuan.
- Membina untuk mendirikan kelompok belajar usaha dengan tujuan membuka lapangan kerja bagi pemuda.
- Membina membentuk kegiatan bakti sosial seperti penghijauan lingkungan desa, ketertiban lingkungan desa, jamban keluarga dan MCK umum dengan tujuan memelihara dan melestarikan alam lingkungan desa dan meningkatkan kebersihan lingkungan desa dan meningkatkan cara hidup sehat.
- Membina untuk mendirikan usaha seperti; usaha industri bataco, penambangan batu, pasir dan pengadaan air bersih, dengan tujuan membuka lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan serta pengadaan dana Kas Karang Taruna.
- Membina meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara dengan berpartisipasi pada hari-hari besar nasional dan daerah dengan mengadakan kegiatan lomba olahraga antar desa.

5. Pembinaan oleh Ketua RT/RW

Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua RT/RW adalah menyangkut tentang kerukunan di antara warga/tetangga. Dalam pembinaan tersebut juga disampaikan kepada warga apabila mempunyai suatu masalah diantara warga, maka warga tersebut harus segera melapor pada Ketua RT atau pun Ketua RW sehingga dapat segera secara bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut, seandainya juga tidak bisa diselesaikan maka masalah tersebut baru diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dan di samping itu pula apabila warga kedatangan tamu yang hendak menginap maka warga tersebut harus segera melapor kepada Ketua RT/Ketua RW.

Pembinaan secara tidak langsung juga diberikan pada saat-saat pertemuan diantara warga pada waktu kerja bakti, waktu santai, arisan diantara keluarga dan lain-lain.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dili sebagai ibu kota Propinsi Timor Timur dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah mengalami banyak peristiwa bersejarah.

Pada abad XVII, pemerintah kolonial Belanda yang sudah menguasai kepulauan Nusantara bagian barat, mulai mengembangkan daerah jajahannya ke bagian timur Nusantara, sehingga bangsa Portugis yang sudah lebih dahulu menguasai Nusa Tenggara Timur dan Maluku terdesak.

Pada tahun 1652, Kupang jatuh ke tangan Belanda, Lifau yang kemudian menjadi pusat pemerintahan jajahan Portugis di pulau Timor mulai terancam. Pada tahun 1705 Lifau dikepung kaum Tupas di bawah pimpinan keluarga Antonio de Hornay dan Mateus da Costa yang terkenal dengan nama perang Oekusi.

Pada tahun 1761 muncul lagi seorang Tupas yang kuat yaitu : Francisco de Hornay da Costa, yang berambisi menegakkan kembali kekuasaan Tupas di pulau Timor. Menghadapi serangan yang terus-menerus dari kaum Tupas maka pada tanggal 11 Agustus 1769 Gubernur Portugis di Lifau Antonio Jose Teles de Menezes meninggalkan Lifau dengan kapal menuju ke arah Timur melalui Batugede. Pada tanggal 10 Oktober 1769 rombongan Gubernur Antonio Jose Teles de Menezes mendarat di sebuah dataran berpaya-paya pada sebuah teluk yang terlindung pulau Atauro. Karena letaknya strategis untuk pertahanan dari kemungkinan serbuan bangsa Belanda maupun kaum Tupas, maka dataran berpaya yang banyak ditumbuhi pohon aidila (pepaya) dijadikan tempat tinggal Gubernur Portugis.

Sejak tanggal 10 Oktober 1769, lokasi ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Portugis di pulau Timor. Demikianlah menurut etimologinya "Dili" berasal dari kata " aidila " yang pada masa dahulu banyak tumbuh di tempat ini.

Dili sebagai pusat pemerintahan Timor Portugis sampai tahun 1865 masih berada di bawah pemerintahan Goa, kemudian tahun 1870 Timor Portugis dijadikan koloni dengan seorang Gubernur yang harus bertanggung jawab kepada Macao. Baru pada tahun 1896 Gubernur Portugis di Dili berada langsung di bawah pemerintah pusat Lisabon, pada waktu itu yang menjabat Gubernur adalah Celestino da Silva.

Usaha pendidikan di Timor Portugis sebenarnya diawali oleh para Misionaris yang pada tahun 1734 membuka sekolah di Oekusi. Tahun 1734 membuka Seminari di Manatuto. Pastor Medeiros pada tahun 1878 membuka sekolah di Dili, Manatuto, Lacro, Liquica dan Bazartete. Tahun 1879 Suster-suster Canosians membuka sekolah dan asrama putri di Dili.

Pada tahun 1936 Pastor Jaime Garcia Goulart membuka Seminari Diosisan di Soibada. Peranan pendidikan Seminari Soibada di bawah pimpinan Pastor Januario Coelho da Silva sangat penting artinya bagi masyarakat Timor, karena melalui pendidikan ini merupakan generasi yang memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan " modern ". Pada tahun 1950 Seminari ini dipindahkan ke Dili.

Pemerintah Portugis sendiri baru pada tahun 1915, membuka pendidikan dasar, tetapi perkembangannya sangat lambat. Pada tahun 1970-1971 hanya 28 % dari jumlah anak yang bersekolah, tiga tahun kemudian diantara penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun kira-kira 90,8 % masih buta huruf, dan dari penduduk yang berusia lebih dari 20 tahun ada 92,8 % yang masih buta huruf.

Pada tahun 1952 di Dili didirikan sekolah Liceu, pada tahun 1961 siswa Liceu (setingkat SMA) ada 175 orang tetapi pada tahun 1967 naik menjadi 833 orang.

Urbanisasi terhadap kota Dili sudah mulai terjadi pada tahun 1970, pada waktu itu penduduk kota Dili baru mencapai 17.000 orang atau 2,5 % dari seluruh penduduk Timor Portugis yang berjumlah 610.000 orang.

Perkembangan Kota Dili.

Perkembangan dan pertumbuhan kota Dili sejak menjadi ibu kota Propinsi Timor Timur demikian pesat bila dibandingkan dengan kota Dili saat masih di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Portugis, fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, lalu lintas, komunikasi dan perkembangan teknologi.

Dengan perkembangan kota Dili yang demikian pesat maka pemerintah telah mengantisipasi melalui Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1981 yaitu Kota Dili ditetapkan sebagai kota administratif; perkembangan dan kemajuan pada Kecamatan Dili Barat dan Dili Timur telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan sebagai kota administratif (lihat perkembangan penduduk dan pendidikan pada Bab I).

gunakan untuk mencari pekerjaan. Sehingga mereka kurang banyak keinginannya untuk memahami rambu-rambu lalu lintas yang harus diikuti dan ditaati, apakah itu tanda larangan jalan, larangan berkecepatan tinggi atau tanda lalu lintas lain yang harus dipatuhi di jalan.

Melihat bahwa sangat pentingnya jalan raya sebagai sarana berlalu lintas yang digunakan oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat sebagai pemakai jalan wajib disiplin mematuhi peraturan lalu lintas. Maka apa yang dilaksanakan oleh Polwil adalah dengan mengadakan pembinaan, berupa penyebarluaskan informasi berlalu lintas kepada masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi, selain pembinaan secara khusus mengadakan penataran bagi para pengemudi yang setiap 2 bulan sekali, dengan cara bergilir agar seluruh pengemudi tidak ada yang ketinggalan untuk memperoleh penataran. Materi yang diberikan khusus mengenai lingkup peraturan-peraturan berlalu lintas, serta memberi motivasi atau dorongan supaya para pengemudi memiliki ketrampilan berlalu lintas dengan baik, dan merupakan usaha mempertinggi kesadaran dan kedisiplinan para pengemudi di kota Dili. Disamping hal tersebut telah dihimbau agar membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga kepedulian sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan PMI misalnya dalam pemberian sokongan dana serta sumbangan/donor darah.

Perlunya dipahami peraturan-peraturan lalu lintas, oleh para pemakai jalan di kota Dili agar menjadi pemakai jalan yang baik dan aman terhadap pelanggaran berlalu lintas di jalan raya, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebaik-baiknya diantaranya adalah:

- Para pemakai jalan perlu menyadari bahwa umumnya sarana jalan dan rambu-rambu belum lengkap untuk dapat diikuti sepenuhnya agar menjadi pemakai jalan yang amam. Misalnya beberapa perempatan atau persimpangan belum dilengkapi lampu lalu lintas sehingga setiap pengendara harus hati-hati dengan memperlambat kendaraannya untuk memberi kesempatan bagi kendaraan yang lebih dahulu masuk.
- Dalam kondisi seperti di atas pada persimpangan yang telah dilengkapi lampu lalu lintas, kendaraan yang ada pada jalur utama harus diberi kesempatan terlebih dahulu dan kendaraan dari arah lain harus mengalah.

rat Keputusannya, dan didaftarkan pada Kantor Pertahanan Kabupaten Dili untuk penerbitan sertifikatnya.

b. Proses untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Proses untuk mendapatkan sertifikat antara lain :

1. Permohonan pengukuran untuk mendapatkan salinan peta situasi/GS, dengan melampirkan persyaratan :

- Surat permohonan
- Foto copy identitas diri (KTP, SIM)
- Alas hak di atas tanah yang dimohon
- Mengisi formulir model "A"
- Membayar biaya administrasi
- Untuk instansi dilengkapi site lokasi, ijin prinsip pencadangan tanah (IPPT), berita acara pembebasan tanah.

c. Permohonan pendaftaran sertifikat hak, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- SK pemberian hak atas tanah.
 - Gambar situasi/salinan peta situasi.
 - Tanda bukti setor uang pemasukan kas negara dan dana YDL.
 - Identitas pemohon.
 - Membayar biaya pendaftaran dan administrasi.
- Angka 1 s/d 4 asli dan foto copy rangkap 4 (empat).

d. Permohonan pendaftaran balik nama sertifikat hak atas tanah persyaratan yang harus dipenuhi :

- Akta PPAT/Surat Keterangan warisan.
- Sertifikat asli.
- Identitas pemohon dan (penjual, penghibah)
- Tanda lunas PBB bulan terakhir tahun berjalan.
- Mengisi formulir model "A".
- Membayar biaya pendaftaran dan administrasi.

Catatan : khusus untuk balik nama berdasarkan jual beli tanah pertanian sebagian yang akan dialihkan menjadi tanah peruntukan bangunan harus dilengkapi :

- Foto copy Akta Jual Beli dan KTP rangkap 3 (tiga)
- Surat permohonan.
- Materai Rp. 1.000.- (3 lembar).



Upaya dalam ajakan mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas



Tampak rapi berjualan di tempat rekreasi

c. Program khusus yakni melaksanakan kegiatan-kegiatan melalui terobosan-terobosan khususnya melalui BERTAISS sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dibidang "Environment & city life-style" dimana berupa untuk menutupi kekurangan-kekurangan, yang ada dengan jalan menghimpun dana dan daya warga kota yang ingin berpartisipasi dalam mengembangkan kota Dili dalam segala aspek kehidupan.

Ketiga program pokok KOTIF telah melaksanakan kendatipun dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya terlaksana. Secara efektif dan efisien karena sikon, namun demikian berbagai upaya telah dilakukan oleh Wali Kota, baik dalam meningkatkan kualitas pegawai (disiplin, etos kerja) maupun dalam upaya melaksanakan terobosan tertentu dalam melaksanakan program-program tersebut.

Kendala-kendala yang bersifat struktural/mendasar baik berasal dari dalam instansi Wali Kota sendiri seperti kualitas pegawai, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas (alat dan pendanaan yang terbatas) maupun yang berasal dari masyarakat umum, khususnya warga kota yang belum sadar akan kewajibannya, umpamanya dalam menjaga kebersihan, membiarkan binatangnya berkeliaran dan sebagainya, pada hal telah ada aturan-aturannya yang dianggap sudah diketahui oleh masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan melaksanakan patroli Polisi Pamong Praja membuka forum pembinaan informal melalui pertemuan walikota dengan pemuda-pemuda warga kota Dili, pembinaan dan dialog melalui RRI serta pembinaan melalui jalur pembinaan fungsional, yakni teguran-teguran lisan/tulisan langsung kepada warga melalui aparat Desa.

Di samping itu pula upaya pembinaan yang dilakukan adalah dengan mengadakan berbagai perlombaan/kegiatan khususnya berbagai perlombaan baik dibidang olah raga maupun dibidang lainnya seperti lomba kebersihan antar desa, instansi dan lainnya termasuk upaya menghidupkan kembali penertiban koran daerah. Kegiatan ini ditetapkan pada setiap tanggal 10 Oktober.

4. Instansi Koperasi

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh koperasi adalah untuk mendirikan KUD. Maka untuk mencapai agar KUD dapat mandiri harus

mempunyai dan mengikuti 12 kriteria yang telah menjadi pedoman sebagai ketentuannya :

- a. Mempunyai anggota penuh minimal 25 dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya.
- b. Pelayanan kepada anggota minimal 60 % dan volume usaha KUD secara keseluruhan, dalam arti jumlah penjualan minimal 60 % dalam usaha, harus lebih besar kepada jumlah anggota. Dimaksudkan agar jumlah penjualan harus lebih besar usahanya di dalam dari pada di luar supaya untung yang dicapai dapat memenuhi target.
- c. R A T dilaksanakan tepat waktu minimal 3 tahun berturut-turut, yaitu pada Bulan Januari - Maret dalam pelaksanaannya. Jika di luar itu sudah dikatakan tidak tepat pelaksanaan R A T.
- d. Pengurus dan BP semuanya berasal dari anggota dengan jumlah minimal pengurus 5 orang dan BP 3 orang, dimana pengurus dan Badan Pengurus harus diambil dari anggota sendiri.
- e. Modal minimal 25 juta rupiah.
- f. Hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan (ungualied). Tujuannya adalah membina dalam segi administrasi, mencoba atau mengelola keuangan jangan sampai tidak sesuai dengan pemeriksaan, dengan maksud betul-betul tidak ada penyelewengan.
- g. Batas toleransi usaha terhadap rencana usaha KUD (program dan non program) : 20 %. Keterangan : Koperasi diarahkan membuat rencana atau membuat pendapatan anggaran belanja, rencana anggaran yang ditetapkan jangan sampai meleset dengan batas antara 20 % sampai 25 %.
- h. Ratio keuangan : Ligwiditas antara 150 - 200 %

Solfaditas : 100%

Keterangan :

Ligwiditas : Kemampuan untuk membayar utang-utang setiap saat. Jangan sampai kas kosong sedapat mungkin 2 : 1 yang artinya mempunyai harta/modal 2 dan terdapat dan koperasi dapat berjalan baik.

Solfaditas : Untuk membayar hutang bila koperasi dibubarkan agar harta/modal dengan hutang yang ada paling tidak ber-banding 1 : 1 yang arttinya agar tidak dibenani hutang bila koperasi bubar.

1. Kepala Desa
2. Babinsa/Binpolda
3. Ketua TIM Penggerak PKK
4. Ketua Karang Taruna
5. Ketua RT/RW

1. Pembinaan oleh Kepala Desa

Upaya pembinaan disiplin terhadap masyarakat desa Komoro baik itu pembinaan disiplin tertib administrasi kebersihan lingkungan, disiplin lapor melapor baik menyangkut mobilitas maupun kena musibah, kerukunan di antara warga, sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta pembinaan pada stafnya agar senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang ada. Pembinaan ini biasanya dilakukan oleh kepala desa pada saat memberikan amanat pada upacara bendera tanggal 17 setiap bulan, dimana Kepala Desa sebagai pembina (Inspektur upacara) di samping itu pula pembinaan juga biasa dilakukan pada rapat-rapat rutin.

2. Pembinaan oleh Babinsa/Binpolda

Pembinaan yang dilakukan oleh Babinsa/Binpolda, biasanya lebih menekankan pada masalah ketertiban dalam administrasi dan pada masalah keamanan.

- Masalah tertib administrasi, dalam pembinaan ini Babinsa/Binpolda bekerja sama dengan Kepala Desa dengan menyampaikan secara langsung kepada warga masyarakat yang datang ke kantor desa yang hendaknya mengurus surat-surat, pembinaan ini dilakukan dengan tujuan agar warga masyarakat semakin sadar dan mengerti tentang tertib administrasi seperti dalam mengurus KTP harus membawa surat pengantar dari RT dan lebih-lebih bila mengurus KTP baru (pindahan) warga harus menyertakan surat pindah domisili dari daerah asal, dalam pembinaan ini juga disampaikan sanksi apabila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan maka warga tersebut tidak dilayani dalam pengurusan administrasinya.

- Masalah keamanan, pembinaan dalam masalah keamanan dirasa sangat perlu dilakukan, mengingat kondisi masyarakat Timor Timur pada umumnya memerlukan penanganan yang serius dalam bidang keamanan, untuk itu Babinsa/Binpolda yang ada di desa selalu memberikan pembinaan kepada warga masyarakat agar turut serta menciptakan kondisi yang aman. Oleh karena mata pencaharian warga masyarakat desa Komoro beraneka ragam, ada yang menjadi pegawai, ABRI, pedagang, sopir, buruh serta petani, maka warga masyarakat yang mata pencahariannya sebagai karyawan maupun ABRI karena tugasnya tidak selalu dapat terus menerus hadir dengan berjaga malam pada pos-pos keamanan (sis-kamling), untuk itu keamanan lingkungan sebagian terbesar diserahkan kepada Hansip, maka dari itulah dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang aman maka Babinsa/Binpolda bekerja sama dengan Kepala Desa memberikan bimbingan kepada Hansip yang ada di masyarakat. Pada saat memberikan bimbingan, dituntut tanggung jawab hansip dalam menjaga stabilitas keamanan.

3. Pembinaan oleh Ketua Tim Penggerak PKK.

Pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK adalah :

- Membina kepengurusan (organisasi) agar mampu secara maksimal melaksanakan semua program PKK Desa.
- Memberikan pembinaan tentang kegiatan kewanitaan agar mampu mengembangkan daya pikir dan kreasi serta meningkatkan hubungan antara anggota PKK yang semakin akrab guna persatuan dan kesatuan, sasaran pada pembinaan ini adalah seluruh anggota PKK Desa.
- Membina membentuk kelompok belajar usaha seperti : Ketrampilan menjahit, ketrampilan memasak, ketrampilan tenun tais dengan tujuan agar mampu membuka lapangan kerja sendiri.
- Membina meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara kepada setiap anggota PKK desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam memperingati hari-hari besar nasional dan daerah untuk itu diadakan berbagai kegiatan lomba.
- Membina untuk membuka usaha-usaha seperti perkiosan, simpan pinjam dengan tujuan meningkatkan penghasilan serta taraf hidup keluarga.

Usaha pendidikan di Timor Portugis sebenarnya diawali oleh para Misionaris yang pada tahun 1734 membuka sekolah di Oekusi. Tahun 1734 membuka Seminari di Manatuto. Pastor Medeiros pada tahun 1878 membuka sekolah di Dili, Manatuto, Lacro, Liquica dan Bazartete. Tahun 1879 Suster-suster Canosians membuka sekolah dan asrama putri di Dili.

Pada tahun 1936 Pastor Jaime Garcia Goulart membuka Seminari Diosisan di Soibada. Peranan pendidikan Seminari Soibada di bawah pimpinan Pastor Januario Coelho da Silva sangat penting artinya bagi masyarakat Timor, karena melalui pendidikan ini merupakan generasi yang memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan " modern ". Pada tahun 1950 Seminari ini dipindahkan ke Dili.

Pemerintah Portugis sendiri baru pada tahun 1915, membuka pendidikan dasar, tetapi perkembangannya sangat lambat. Pada tahun 1970-1971 hanya 28 % dari jumlah anak yang bersekolah, tiga tahun kemudian diantara penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun kira-kira 90,8 % masih buta huruf, dan dari penduduk yang berusia lebih dari 20 tahun ada 92,8 % yang masih buta huruf.

Pada tahun 1952 di Dili didirikan sekolah Liceu, pada tahun 1961 siswa Liceu (setingkat SMA) ada 175 orang tetapi pada tahun 1967 naik menjadi 833 orang.

Urbanisasi terhadap kota Dili sudah mulai terjadi pada tahun 1970, pada waktu itu penduduk kota Dili baru mencapai 17.000 orang atau 2,5 % dari seluruh penduduk Timor Portugis yang berjumlah 610.000 orang.

Perkembangan Kota Dili.

Perkembangan dan pertumbuhan kota Dili sejak menjadi ibu kota Propinsi Timor Timur demikian pesat bila dibandingkan dengan kota Dili saat masih di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Portugis, fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, lalu lintas, komunikasi dan perkembangan teknologi.

Dengan perkembangan kota Dili yang demikian pesat maka pemerintah telah mengantisipasi melalui Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1981 yaitu Kota Dili ditetapkan sebagai kota administratif; perkembangan dan kemajuan pada Kecamatan Dili Barat dan Dili Timur telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serempak sebagai kota administratif (lihat perkembangan penduduk dan pendidikan pada Bab I).

Dili sebagai kota yang berkembang ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan heterogenitas masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan penduduk kota Dili sangat dipengaruhi oleh deras nya arus urbanisasi dari daerah belakang dan sekitarnya serta kedatangan penduduk dari luar daerah, baik sebagai aparat pemerintah, pedagang dari luar daerah, baik sebagai aparat pemerintah, pedagang dan lain-lain. Kota Dili sebagai pusat pelayanan dengan berbagai fasilitas telah mempunyai daya tarik bagi penduduk pendatang dari daerah belakang dan sekitarnya.

Masalah yang timbul akibat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota Dili. Adapun pertumbuhan penduduk yang tinggi dan belum dapat diimbangi dengan pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan di kota Dili.

Berbagai masalah yang muncul antara lain :

1. Adanya persaingan masyarakat untuk mendapatkan prasarana dan sarana, menyebabkan munculnya sikap individualis yang kurang memperhatikan kepentingan sesama.
2. Sejumlah warga kota masih bersikap dan berperilaku seperti di daerah asalnya.
3. Adanya pemukiman yang belum dapat memenuhi persyaratan kesehatan.
4. Adanya pencemaran lingkungan dan sampah yang tertimbun di beberapa tempat.
5. Tingkat kedisiplinan warga kota terhadap peraturan dan kaidah-kaidah sosial belum melembaga.
6. Meningkatnya kebutuhan komunikasi, transportasi dan masalah lalu lintas.
7. Banyaknya pencari kerja yang belum memiliki keterampilan.
8. Terbatasnya pasaran kerja dan kesempatan kerja.
9. Adanya peminum dan pemabuk yang sering mengganggu ketenangan masyarakat.
10. Munculnya wanita tuna susila dan kriminilitas/pencurian.

B. SARAN - SARAN

Akibat pertumbuhan dan perkembangan kota Dili yang sangat pesat, telah membawa dampak munculnya berbagai permasalahan kehidupan perkotaan.

Untuk itu kiranya layak apabila disampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi penyelenggara pemerintahan kota serta warga masyarakat kota pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada warga kota, Struktur pemerintahan desa yang masih terdapat di Kotif Dili perlu segera ditingkatkan menjadi kelurahan.
2. Lembaga-lembaga pemerintahan kota, LMD dan LKMD perlu ditingkatkan peranannya dalam upaya meningkatkan pembangunan Kota Dili.
3. Perlu dibentuknya yayasan atau lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Perlu ditingkatkan upaya pembangunan perumahan sederhana bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
5. Perlu ditingkatkan penyediaan latihan-latihan kerja bagi generasi muda/ angkatan kerja dalam berbagai bidang ketrampilan.
6. Mengupayakan kesempatan kerja baik dalam kota Dili maupun di daerah lain bagi para pencari kerja.
7. Mengupayakan peningkatan disiplin warga kota terhadap peraturan tata tertib Kotif Dili dan kaidah sosial kemasyarakatan.
8. Meningkatkan tertib lalu lintas dan kebersihan di tempat-tempat umum.
9. Mengupayakan peningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil melalui berbagai bidang usaha.
10. Meningkatkan siskamling masyarakat dan lokalisasi WTS yang jauh dari tempat pemukiman.
11. Meningkatkan pelayanan PAM bagi warga Kota Dili.
12. Meningkatkan upaya penghijauan dan fasilitas bermain bagi anak-anak, serta tempat olah raga.

13. Meningkatkan penyuluhan Dili Bertaiss dalam berbagai tempat dan kesempatan bagi warga kota.

Demikianlah antara lain saran-saran yang kiranya layak disampaikan dalam rangka upaya meningkatkan kota Dili sebagai Kota Madya dan kota Bertaiss, agar mampu memberikan pelayanan kepada warga kota dengan partisipasi dari warga kota Dili sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bintarto, R.
1986 "Interaksi Desa Kota". Jakarta : LP3ES
2. Gunawan, Ryadi dan
Harnoko, Darto.
1984/1985 "Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta". Yogyakarta : Direktorat Jarahnitra Depdikbud.
3. Hagul, Peter.
1985. "Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat". Jakarta: CV. Rajawali.
4. Hassan, Fuad.
1985. "Renungan Budaya". Jakarta : Balai Pustaka.
5. Kartodirdjo, Sartono
1978. "Sejarah Nasional Indonesia III". Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Koentjoroningrat (Ed)
1982. "Masalah-masalah Pembangunan". Jakarta : LP3ES.
7. Kristyanto, Aries.
1984. "Metodologi Penelitian Pedesaan". Jakarta : CV. Rajawali.
8. Lopian, AB. dan Chaniago.
1988. "Timor Timur Dalam Gerak Pembangunan". Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Martins, Joao.
1985. "Kunci Pembangunan Manusia Tiimorense".
_____ : _____.

10. Poespowardoyo, Soerjanto.
1989. "Strategi Kebudayaan". Jakarta : PT. Gramedia.
11. Soedjatmoko.
1986. "Dimwensi Manusia dalam Pembangunan". Jakarta : LP3ES.
12. Sedyawati, Ed dkk.
1986/1987. "Sejarah Kota Jakarta". Jakarta : Direktorat Jarahnitra Depdikbud.
13. Sua, E. A.
1987. "Motivos Artisticos Timorenses". Lisbon : Integração Instituto de Invesgação.
14. Susilo, P.
1991. "Dili Selayang Pandang". Dili : Bahan Informasi Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan.
15. Wouder, Van.
1985. "Klen, Mitos dan Kekuasaan". Jakarta : Grafiti Perss.
16. Marten do Rosario, P.
1984. "Karya Misi di Timor Timur". ____ : Kanwil Departemen Agama Propinsi Timor Timur.
17. _____
"Provincia Ultramarina de Macau". (Descobrimiento Estabelecimento Portugues Em Timor)". _____: _____

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Djasmani
Umur : 24 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan/Jabatan : Pembantu Pimpinan Bioskop Seroja Teatre.
Agama : Islam
Alamat : Pantai Kelapa C. 27 Comoro
2. Nama : Dr. Robert Quaria
Umur : 34. tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan/Jabatan : Dokter Puskesmas Comoro
Agama : Katolik
Alamat : Comoro, Dili Barat
3. Nama : Edi Hari Winarno
Umur : 40 tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan/Jabatan : Pimpinan Bioskop Seroja Teatre
Agama : Islam
Alamat : Pantai Kelapa C. 27 Comoro
4. Nama : Ernesto da Costa
Umur : 43 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa
Agama : Katolik
Alamat : Kampung Baru RT. II Rw III
5. Nama : Genoveva Adao
Umur : 25 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT. V.
Agama : Katolik
Alamat : Kampung Hidup Baru RT V, RW 05

6. Nama : Imanuel Maukuru
 Umur : 46 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Terminal Comoro
 Agama : Katolik
 Alamat : Palapaso, Motael, Dili Barat
7. Nama : Jose Piris
 Umur : 43 tahun
 Pendidikan : Tidak Tamat SD
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Pasar, merangkap Satpam Pasar Comoro
 Agama : Katolik
 Alamat : Bebung, Comoro, Dili Barat
8. Nama : Maria da Silva
 Umur : 47 tahun
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris PKK Desa
 Agama : Katolik
 Alamat : Kampung Baru
9. Nama : Mustamin
 Umur : 46 tahun
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Karang Taruna
 Agama : Islam
 Alamat : Kampung Baru Rt VIII, Rw 05
10. Nama : Rico Subroto, SE.
 Umur : 34 tahun
 Pendidikan : Sarjana
 Pekerjaan/Jabatan : Wira Swasta/pemilik toko
 Agama : Katolik
 Alamat : Comoro

11. Nama : S. Sakurhu
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan/Jabatan : Babinsa Desa Comoro
Agama : Protestan
Alamat : Asrama Korem Rt. III, Rw 08
12. Nama : Tiku Pasang, BSc
Umur : 41 tahun
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan/Jabatan : Kasi BLK Koperasi
Agama : Katolik
Alamat : Kántor Departemen Koperasi, Dili
13. Nama : Victorino de A. Dos Santos
Umur : 37 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Comoro
Agama : Katolik
Alamat : Kampung Merdeka RT. III, Rw IV

PEMBINAAN DISIPLIN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Perpustakaan
Jenderal K.

711.
SU
p

Dicetak oleh :
Perum PNRI - Dili